



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN TAHUNAN BPSDM TAHUN 2021

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akademi Kompetensi
Hukumnya Layan & Berpiji & Berkeadilan



**SEMAKIN REFORMASI
PASTI HUKUM**

**PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA**

Diterbitkan oleh

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

Penyusun :

Tim Penyusun Laporan Kinerja BPSDM Hukum dan HAM 2020

BPSDM Hukum dan HAM

Jl. Raya Gandul No. 4

Depok Jawa Barat, 16512

Telp . 021-7540123

www.bpsdm.kemenkumham.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayahNya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan, serta Penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2021 dengan baik dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Hukum dan HAM.



Sebagai perwujudan pertanggungjawaban dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, maka disusunlah Laporan Tahunan BPSDM Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2021 sebagai gambaran tentang hasil kegiatan dan program yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM pada tahun 2021. Informasi yang terdapat dalam Laporan Tahunan BPSDM Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2021 dapat menjadi bahan dalam pengambilan keputusan dalam melaksanakan kegiatan pada masa yang akan datang. Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada seluruh pihak, baik internal maupun eksternal Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM yang telah mendukung dan membantu proses penyusunan laporan ini.

Depok, Februari 2022
Kepala Badan Pengembangan SDM
Hukum dan HAM



Dr. Asep Kurnia
NIP. 19661119 198603 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	5
C. Ruang Lingkup Pembahasan	5
D. Sistematika Pelaporan	6
BAB II DATA RENCANA KERJA	7
A. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM	7
B. Rencana Strategis BPSDM Hukum dan HAM	10
C. Sasaran Kinerja BPSDM Hukum dan HAM	11
1. Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM	11
2. Pusat Penilaian Kompetensi	14
3. Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan	16
4. Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM	20
5. Politeknik Ilmu Pemasaryakatan (POLTEKIP)	22
6. Politeknik Imigrasi (POLTEKIM)	24
7. Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM	26
D. Rencana Penyerapan Anggaran BPSDM Hukum dan HAM	29
E. Sumber Daya Manusia BPSDM Hukum dan HAM	30
BAB III CAPAIAN KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM	31
A. Capaian Kinerja BPSDM Hukum dan HAM	31
1. Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM	34
2. Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan	42

3. Pusat Penilaian Kompetensi	50
4. Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM	55
5. Politeknik Ilmu Pemasarakatan (POLTEKIP)	65
6. Politeknik Imigrasi (POLTEKIM)	74
7. Balai Pendidikan dan Pelatihan Diklat Hukum dan HAM	85
B. Implementasi Reformasi Birokrasi	87
C. Kegiatan Kerja Sama BPSDM Hukum dan HAM	92
D. Prestasi BPSDM Hukum dan HAM	93
BAB IV PENUTUP	102
A. Simpulan	102
B. Saran	105



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rencana Pelatihan Teknis Dan Kepemimpinan	18
Tabel 2.2 Rencana Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak	19
Tabel 2.3 Rencana Kerja Sekretariat TA. 2021	21
Tabel 2.4 Rencana Kegiatan POLTEKIP	23
Tabel 2.5 Rencana Pelatihan Klasikal pada Badiklat Hukum dan HAM	28
Tabel 2.6 Rencana Pelatihan <i>E-Learning</i> Pada Badiklat Hukum dan HAM	28
Tabel 2.7 Rencana Penyerapan Anggaran TA. 2021	29
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Bidang Program Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM	34
Tabel 3.2 Capaian Kinerja bidang Penyelenggaraan Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM	35
Tabel 3.3 Capaian Pelatihan di Bidang Fungsional dan HAM Metode Klasikal/PJJ	36
Tabel 3.4 Capaian Pelatihan di Bidang Fungsional dan HAM Metode <i>E-Learning</i>	39
Tabel 3.5 Capaian Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan	40
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Bidang Evaluasi dan Laporan Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM	41
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Bidang Program Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan	42
Tabel 3.8 Capaian Kinerja Bidang Penyelenggara Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan	43
Tabel 3.9 Capaian Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan Metode Klasikal/PJJ	44
Tabel 3.10 Capaian Pelatihan Teknis Dan Kepemimpinan Metode Blended	45
Tabel 3.11 Capaian Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan Metode <i>E-Learning</i>	45
Tabel 3.12 Capaian Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak	49
Tabel 3.13 Capaian Kinerja Bidang Evaluasi dan Laporan Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan	49
Tabel 3.14 Capaian Kinerja Bidang Program Pusat Penilaian Kompetensi	50
Tabel 3.15 Capaian Kinerja Bidang Penyelenggaraan Pusat Penilaian Kompetensi	51
Tabel 3.16 Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Administrasi/Fungsional di Lingkungan Kantor Wilayah	52

Tabel 3.17 Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Administrasi/Fungsional di Unit Eselon I	52
Tabel 3.18 Penilaian Preferensi Kompetensi Melalui Metode <i>Online (Situational Judgement Test)</i>	52
Tabel 3.19 Penilaian Kompetensi Teknis Melalui Metode <i>Online (English Placement Test)</i>	53
Tabel 3.20 Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Inpassing (Non-DIPA BPSDM Hukum dan HAM)	53
Tabel 3.21 Capaian Kinerja Bidang Sistem Informasi Pusat Penilaian Kompetensi	54
Tabel 3.22 Capaian Kinerja Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM	55
Tabel 3.23 Realisasi Anggaran Bagian Program dan Kerja Sama	59
Tabel 3.24 Realisasi Bagian Umum Kepegawaian	59
Tabel 3.25 Realisasi Anggaran Bagian Keuangan	59
Tabel 3.26 Realisasi Anggaran Bagian Pengelolaan BMN, Umum, dan Humas	60
Tabel 3.27 Nilai SAKIP BPSDM Hukum dan HAM 2019-2021	62
Tabel 3.28 Komposisi Taruna POLTEKIP	65
Tabel 3.29 Prestasi Taruna/i Politeknik Ilmu Pemasaryakatan Pada Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan (OPTK) 2021	68
Tabel 3.30 Anggaran Politeknik Pemasaryakatan	73
Tabel 3.31 Komposisi Taruna POLTEKIM	74
Tabel 3.32 Prestasi Taruna/i Politeknik Imigrasi Pada Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan (OPTK) 2021	77
Tabel 3.33 Realisasi Anggaran Politeknik Imigrasi	84
Tabel 3.34 Capaian Kinerja Balai Diklat Hukum dan HAM	85
Tabel 3.35 Capaian Pelatihan Pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM	85
Tabel 3.36 Implementasi Reformasi Birokrasi BPSDM Hukum dan HAM	87
Tabel 3.37 Tabel Kegiatan Kerjasam BPSDM Hukum dan HAM	92
Tabel 3.38 Target Kinerja BPSDM Hukum dan HAM	95
Tabel 3.39 Rencana Aksi BPSDM Hukum dan HAM Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	99
Tabel 3.40 Target Kinerja Kantor Wilayah	100
Tabel 4.1 Realisasi Anggaran BPSDM Hukum dan HAM	104

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Pagu Anggaran BPSDM Hukum dan HAM TA. 2021 (Sebelum Pandemi Covid-19)	3
Grafik 1.2 Pagu Anggaran BPSDM Hukum dan HAM TA. 2021 (Setelah Pandemi Covid-19)	3
Grafik 2.1 Rencana Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Fungsional dan HAM	13
Grafik 2.2 Rencana Kegiatan Diklat Pembimbing Kemasyarakatan	13
Grafik 2.3 Rencana Kegiatan Penilaian Kompetensi	16
Grafik 2.4 Rencana Kegiatan POLTEKIM	25
Grafik 2.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	30
Grafik 2.7 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	30
Grafik 3.1 Capaian Kinerja BPSDM Hukum dan HAM	31
Grafik 3.2 Perbandingan Rencana dan Realisasi Anggaran 2021	32
Grafik 3.3 Anggaran Belanja BPSDM Hukum dan HAM	33
Grafik 3.4 Perbandingan Capaian Penyerapan Anggaran BPSDM Hukum dan HAM 2019-2021	33
Grafik 3.5 Jumlah Taruna POLTEKIP 2021	66
Grafik 3.6 Jumlah Taruna Poltekim Berdasarkan Tingkat (Angkatan)	75
Grafik 3.7 Jumlah Taruna Poltekim Berdasarkan Program	75
Grafik 4.1 Capaian Peserta Pelatihan Tahun 2021	102
Grafik 4.2 Capaian Diklat Prioritas Nasional	103

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Tahunan BPSDM Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2021 merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban atas tugas pokok dan fungsi BPSDM Hukum dan HAM sesuai dengan Permenkumham Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang hukum dan HAM dalam rangka meningkatkan kualitas SDM aparatur hukum dan HAM. Pengembangan SDM oleh BPSDM Hukum dan HAM dilaksanakan melalui program Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan, Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM, Politeknik Imigrasi, dan Politeknik Ilmu Pemasaryakatan,. Selain mengemban tugas untuk melakukan Pengembangan Kompetensi, BPSDM Hukum dan HAM juga mendapatkan amanat untuk menyelenggarakan Penilaian Kompetensi oleh Pusat Penilaian Kompetensi dalam rangka pemetaan kompetensi aparatur sehingga dapat dimanfaatkan dalam pembentukan pola karir dan pengembangan pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Pada Tahun Anggaran 2021, BPSDM Hukum dan HAM telah menyelenggarakan pelatihan dengan berbagai metode pelatihan yaitu, metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), e-learning, serta Blended Learning dengan menggunakan anggaran DIPA BPSDM Hukum dan HAM maupun anggaran PNPB dari Unit Eselon I. Blended Learning ini merupakan metode pelatihan yang baru dilaksanakan pada tahun 2021 dengan pertimbangan bahwa walaupun pelatihan sudah dilaksanakan secara PJJ, namun beberapa mata pelatihan tetap perlu dilakukan secara tatap muka. Berdasarkan data yang ada, sebanyak 20.984 peserta telah mengikuti dan menyelesaikan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM di tahun 2021 dengan rincian yaitu sebanyak 9.913 peserta mengikuti pelatihan dengan metode klasikal, PJJ, maupun *blended learning* serta sebanyak 11.071 mengikuti pelatihan dengan metode e-learning. Sebagai pemenuhan kegiatan berskala program prioritas nasional, BPSDM Hukum dan HAM menyelenggarakan pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan dengan menggunakan metode PJJ di tahun 2021. Sebanyak 270 peserta mengikuti pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak dan 320 peserta mengikuti pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan sehingga total aparatur penegak hukum yang mengikuti pelatihan berskala program prioritas nasional adalah 590 peserta dengan keterangan bahwa seluruh peserta yang mengikuti pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan lulus 100%.

Melalui Politeknik Ilmu Pemasaryakatan (POLTEKIP) dan Politeknik Imigrasi (POLTEKIM) BPSDM Hukum dan HAM mencetak kader di bidang pemasaryakatan dan keimigrasian. Pada tahun 2021 sebanyak 1.207 taruna mengikuti pendidikan kedinasan POLTEKIP dan sebanyak 1.141 taruna

mengikuti pendidikan kedinasan POLTEKIM. Di bulan Desember, sejumlah 498 taruna tingkat IV telah melaksanakan wisuda di Gedung BPSDM Hukum dan HAM dengan rincian 250 taruna POLTEKIP dan 248 taruna POLTEKIM.

Disamping menyelenggarakan pengembangan kompetensi dan pendidikan kedinasan, BPSDM Hukum dan HAM juga mengemban tugas penyelenggaraan penilaian kompetensi bagi aparatur Kementerian Hukum dan HAM melalui Pusat Penilaian Kompetensi. Selama tahun 2021, Pusat Penilaian Kompetensi telah melakukan penilaian kompetensi aparatur kepada 19.281 pegawai melalui kegiatan Uji Kompetensi, *Assessment Center*, *Situational Judgment Test* dan *English Placement Test*. Diharapkan dari hasil penilaian kompetensi yang dilakukan bisa memetakan potensi kompetensi aparatur Kementerian Hukum dan HAM sehingga bisa dimanfaatkan dalam pembentukan pola karir dan pengembangan pegawai.

Dari sisi penyerapan anggaran, Per 31 Desember 2021 BPSDM Hukum dan HAM telah melakukan realisasi anggaran sebesar **Rp277.973.836.683,-** atau telah mencapai **98,89%** dari anggaran yang terdapat dalam DIPA BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2021 sebesar **Rp281.179.671.000,-** berikut rinciannya:

NO	SATKER	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	Pusbang Diklat Fungsional dan HAM	8.192.143.000	7.720.877.405	94,24
2	Pusat Penilaian Kompetensi	2.008.155.000	1.985.067.530	98,85
3	Pusbang Diklat Teknis dan Kepemimpinan	9.425.186.000	9.072.108.285	96,25
4	Sekretariat	162.054.702.000	160.412.511.784	98,98
5	POLTEKIM	30.088.452.000	29.952.798.170	99,5
6	POLTEKIP	30.754.684.000	30.704.347.416	99,84
7	BADIKLAT Kep. Riau	10.855.306.000	10.639.337.982	98,01
8	BADIKLAT Jawa Tengah	12.532.658.000	12.361.494.512	98,63
9	BADIKLAT Sulawesi Utara	15.268.385.000	15.125.293.599	99,06
Jumlah		281.179.671.000	277.973.836.683	98,8

Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi aparatur di bidang hukum dan HAM, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh BPSDM. Selama tahun 2021, kendala utama yang dihadapi adalah penyebaran covid-19 di Indonesia. Merebaknya covid-19 memaksa terjadinya *refocusing* anggaran yang berimbas pada tidak terlaksananya beberapa kegiatan yang telah direncanakan pada awal tahun. Disamping itu, metode pelatihan yang biasa dipakai selama ini,

klasikal, harus ditinggalkan dan digantikan dengan metode pembelajaran jarak jauh memanfaatkan aplikasi *Zoom*. Permasalahan dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk kegiatan adalah kurangnya kualitas jaringan yang berimbas pada kurang maksimalnya proses pembelajaran. Pun, demikian dengan pembelajaran metode *e-learning* masih menghadapi kendala terutama kurangnya minat pegawai untuk mengikuti pelatihan berbasis teknologi informasi. Kendala tidak hanya ditemui pada proses pengembangan kompetensi, tetapi juga ditemukan pada kegiatan penilaian kompetensi, salah satunya adalah kurangnya jumlah tenaga asesor yang ada dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM jika harus melakukan penilaian kompetensi kepada 15 ribu orang pegawai per tahunnya.

BPSDM Hukum dan HAM harus segera melakukan perbaikan agar pelaksanaan tugas dan fungsinya berjalan dengan baik antara lain perlu dilakukan pelatihan bagi tenaga pengajar dan penyelenggara pelatihan agar pelaksanaan pelatihan dengan metode pembelajaran jarak jauh dapat berjalan dengan optimal, pengarahan kepada pimpinan unit kerja untuk terus mendukung dan mengawasi pegawai yang mengikuti pelatihan metode *e-learning*, peningkatan jumlah assessor melalui jalur inpassing atau penerimaan CPNS, sementara untuk meminimalisir revisi anggaran diharapkan harus lebih selektif dalam melakukan pergeseran anggaran untuk revisi kegiatan. Dan yang terakhir perlu adanya pemantauan secara berkala terhadap Perjanjian Kinerja Pimpinan Tinggi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM sehingga dapat dipantau perkembangan dan kendala yang dihadapi.



BAB I PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen mendasar dan paling menentukan dalam setiap pengelolaan organisasi. Sumber daya manusia merupakan penentu jalan-tidaknya ataupun maju mundurnya organisasi. Sebaik apapun sistem yang telah disusun atau dilengkapi dan apapun sarana dan prasarana yang tersedia dalam organisasi, tanpa didukung oleh keberadaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang memadai, maka berbagai kelengkapan tersebut tidak akan berarti banyak bagi keberadaan organisasi. Dengan sumber daya manusia pula, sistem sarana dan prasarana yang ada dalam organisasi dapat terus disempurnakan. Oleh karena itu, suatu organisasi harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompetensi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi.

Agar sumber daya manusia yang dimiliki berkualitas dan berkompetensi maka sudah seharusnya suatu organisasi memiliki sistem pengembangan sdm yang terstruktur dengan baik sehingga hasil pengembangan sdm sesuai dengan apa yang diharapkan. Pengembangan pegawai merupakan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan maupun pengetahuan umum bagi pegawai agar pencapaian tujuan lebih efisien. Dalam proses pelaksanaan pengembangan pegawai, terdapat dua aspek kegiatan yang saling terkait yaitu kegiatan pelatihan dan kegiatan pengembangan sdm itu sendiri (Simamora, 1997). Kedua hal tersebut memiliki tujuan untuk menghasilkan kegiatan pengembangan kompetensi SDM yang efektif yang berujung pada terciptanya SDM yang berkompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi.



Pemerintah Republik Indonesia juga melihat pentingnya pengembangan Aparatur Sipil Negara dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah dengan memasukkan proses pendidikan dan pelatihan sebagai bentuk pengembangan kompetensi pegawai ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Pasal 63 Ayat 4). Pendidikan dan pelatihan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan penguasaan teori dan keterampilan terhadap suatu persoalan untuk mencapai tujuan. Upaya ini dilakukan untuk memperbaiki tingkat produktifitas para pegawai dalam bekerja dan mengembangkan sumber daya manusia dalam menghadapi segala kemungkinan yang terjadi akibat perubahan lingkungan. Melalui Pendidikan dan pelatihan dapat membantu para pegawai menambah pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat menjalankan pekerjaan secara efektif, dan efisien.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM sebagai salah satu institusi pemerintah turut serta melaksanakan pengembangan ASN di bidang hukum dan HAM dengan menyelenggarakan berbagai jenis pendidikan dan pelatihan antara lain Pendidikan dan pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan HAM dan Pendidikan Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasaryakatan (POLTEKIP) dan Politeknik Imigrasi (POLTEKIM). Diharapkan setelah mengikuti diklat ASN hukum dan HAM dapat meningkatkan keahlian (*skill*), kemampuan (*ability*), sikap (*attitude*) dan pendidikan dan pengetahuan (*knowledge*). Untuk mendukung pengembangan kompetensi yang efektif, maka perlu dilakukan penilaian dan pemetaan kompetensi pegawai Kementerian Hukum dan HAM yang diselenggarakan oleh Pusat Penilaian Kompetensi.

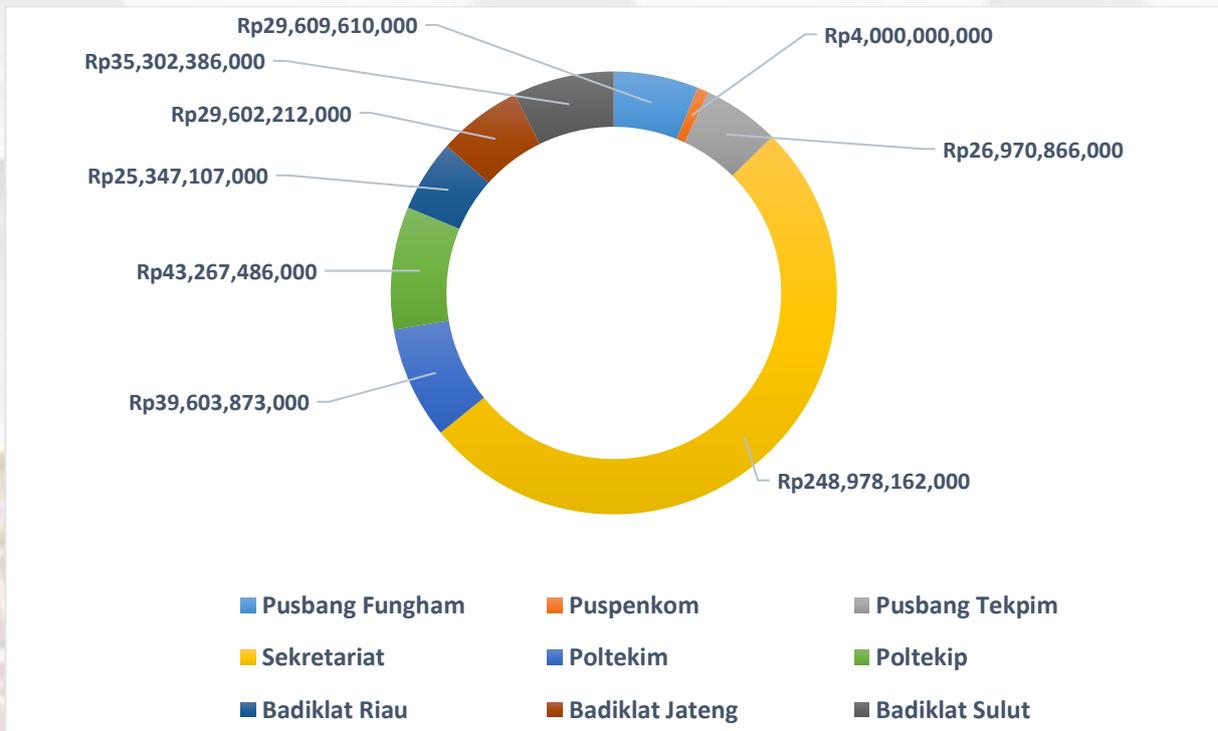
Alokasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2021 BPSDM Hukum dan HAM mendapat alokasi anggaran sejumlah Rp. 456.720.163.000,- yang dipergunakan untuk pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Namun sejak merebaknya wabah

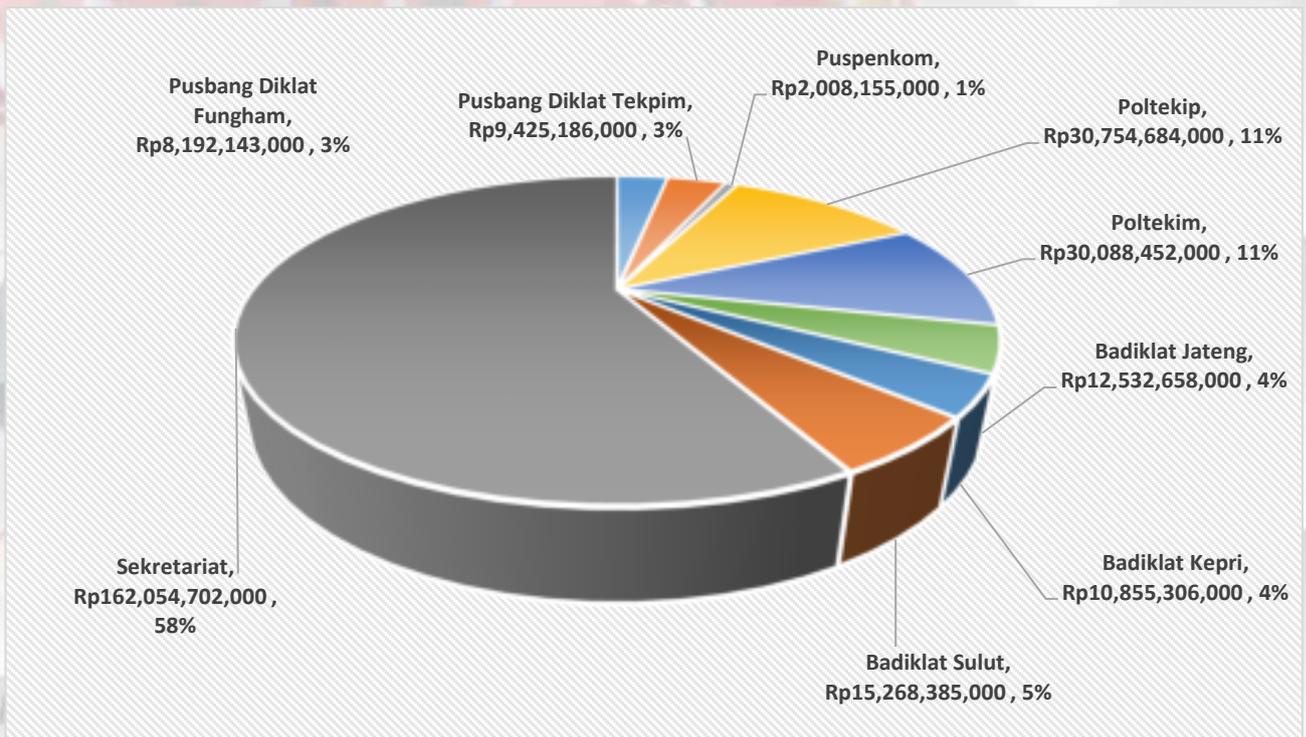


virus corona di Indonesia sejak bulan Maret 2020, mengakibatkan anggaran yang diterima oleh BPSDM Hukum dan HAM mengalami pengurangan guna mendukung program pemerintah yang fokus mengatasi pandemi virus corona. Sehingga sejak bulan Juni 2021 anggaran yang dimiliki oleh BPSDM Hukum dan HAM untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebesar Rp281.179.671.000 dengan rincian sebagai berikut:

**Grafik 1. 1 Pagu Anggaran BPSDM Hukum dan HAM TA. 2021
(Sebelum Pandemi Covid 19)**

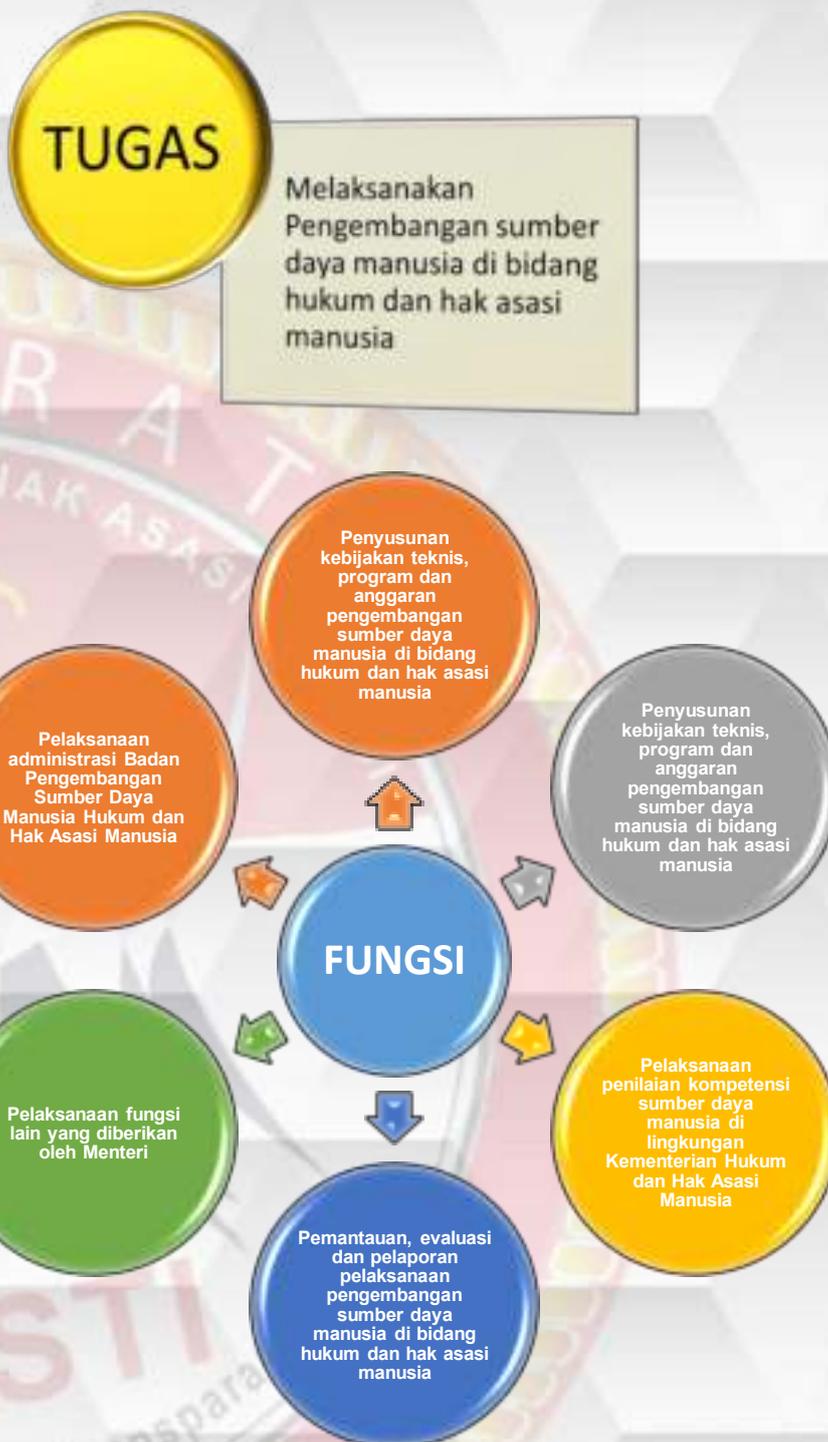


**Grafik 1. 2 Pagu Anggaran BPSDM Hukum dan HAM TA. 2021
(Setelah Pandemi Covid 19)**



Tugas dan Fungsi BPSDM Hukum dan HAM

Kedudukan, Tugas dan Fungsi BPSDM Hukum dan HAM merupakan salah satu unsur penunjang pelaksanaan tugas pokok Kementerian di bidang pengembangan sumber daya manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri. BPSDM Hukum dan HAM sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :



Struktur Organisasi BPSDM Hukum dan HAM



B. Maksud dan Tujuan

Laporan Tahunan merupakan laporan yang disusun sebagai hasil evaluasi kegiatan yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM selama satu tahun kegiatan. Maksud dan Tujuan pembuatan Laporan Tahunan 2021 BPSDM Hukum dan HAM untuk:

- Memberikan informasi kepada pimpinan organisasi berkenaan tingkat keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan pada Tahun 2021;
- Bahan masukan Pimpinan BPSDM Hukum dan HAM dalam hal pengambilan keputusan berkenaan dengan model pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia hukum dan HAM serta program kerja yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM.

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan pada Laporan Tahun 2021 BPSDM Hukum dan HAM sebagai berikut:

- Program kegiatan yang dilaksanakan oleh BPSDM Hukum dan HAM baik dalam bentuk Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) maupun non-diklat pada tahun 2021;
- Pengelolaan Anggaran BPSDM Hukum dan HAM selama tahun anggaran 2021.

D. Sistematika Pelaporan

Sistematika Laporan Tahunan BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2021 tidak terlepas dalam Pedoman Penyusunan Laporan Tahunan Kementerian Hukum dan HAM, adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN;

Pada Bagian ini menguraikan gambaran umum dari satuan kerja dan hal-hal yang mendasari disusunnya laporan tahunan.

BAB II DATA;

Bagian ini menyajikan data dan kenyataan yang ada dilapangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja.

BAB III CAPAIAN KINERJA DAN IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI;

Bagian ini menyajikan analisa terhadap data dan kenyataan di lapangan mengenai hambatan serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN;

Bagian ini membuat saran dan usulan untuk mendapatkan pemecahan dan penyelesaian dari permasalahan yang ada.

BAB II

DATA RENCANA

KERJA



BAB II

DATA RENCANA KERJA

A. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM

Bab ini akan menguraikan tentang data kegiatan BPSDM Hukum dan HAM tahun 2021 berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir. Setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh BPSDM Hukum dan HAM mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Selain itu, Laporan Tahunan BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2020 juga memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BPSDM Hukum dan HAM yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 maupun Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.



Visi Kementerian Hukum dan HAM

Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan bahwa seluruh instansi pemerintahan harus memprioritaskan peningkatan produktivitas sebagai hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Setiap kegiatan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Selain itu Presiden juga menegaskan tugas pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi Kementerian Hukum dan HAM



Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu (1) penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, (2) perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara serta (3) pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan;
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Tujuan Kementerian Hukum dan HAM

Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
3. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.
4. Terlindunginya hak asasi manusia.
5. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.
6. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.
7. Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.



Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan.

1. Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan
2. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM
3. Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik

4. Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional
5. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI
6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
7. Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di bidang hukum dan HAM
8. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien

B. Rencana Strategis BPSDM Hukum dan HAM



Sasaran dan Indikator Kinerja Utama BPSDM Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2021

Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM

Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh Pengguna
Persentase Sumber Daya Manusia di bidang Hukum dan HAM yang mendapatkan pengembangan kompetensi
Persentase Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya

Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi di bidang Pemasarakatan dan Keimigrasian

Persentase lulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan

C. Sasaran Kinerja BPSDM Hukum dan HAM

1. Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM

Tugas Pokok dan Fungsi



Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pendidikan dan pelatihan fungsional dan Hak Asasi Manusia.

Fungsi Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan HAM adalah:

- Penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran di bidang pendidikan dan pelatihan fungsional dan hak asasi manusia;
- Penyusunan pedoman dan program penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional dan hak asasi manusia;
- Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional dan hak asasi manusia;
- Koordinasi dan pembinaan teknis substantif penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional dan hak asasi manusia;
- Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional dan hak asasi manusia;
- Pelaksanaan urusan tata usaha pusat.

Sasaran dan Indikator Kinerja Pusbang Diklat Fungsional dan HAM

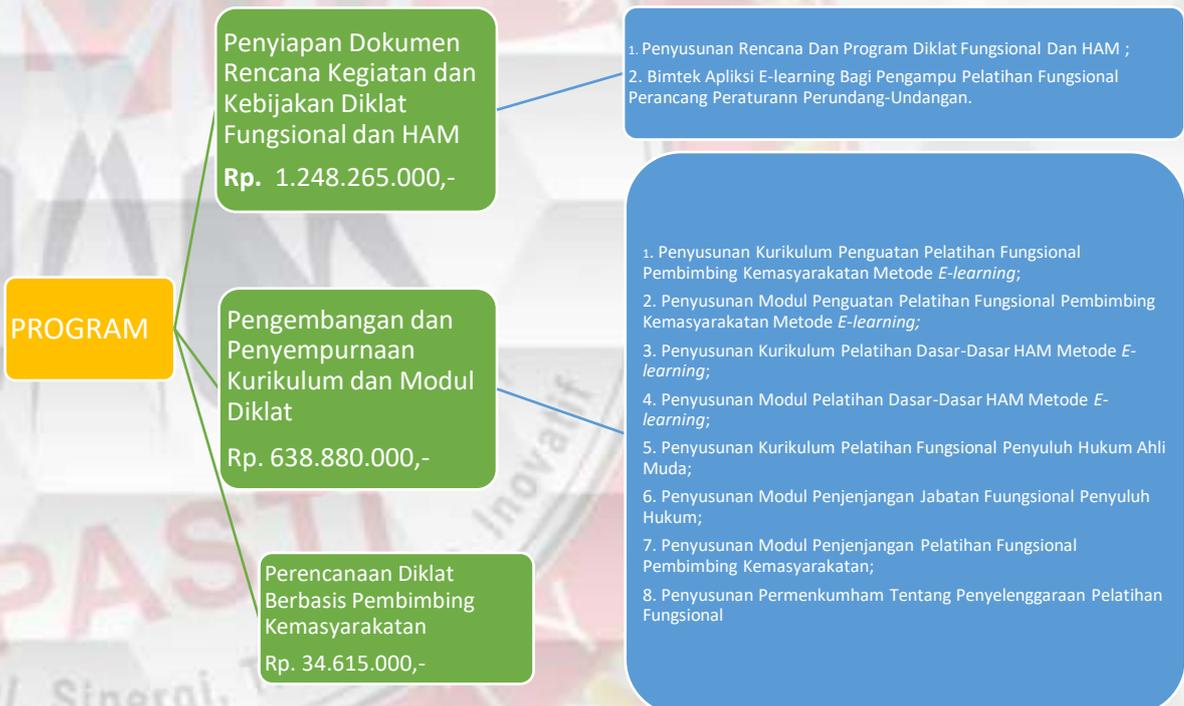


Rencana Kerja

Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM pada tahun 2021 menganggarkan sebanyak Rp8.192.143.000,- untuk pengembangan diklat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Berikut kegiatan Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM Tahun 2021:

A. Bidang Program

Program pengembangan diklat fungsional dan HAM mempunyai anggaran sebesar Rp1.533.686.000,- yang terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut :



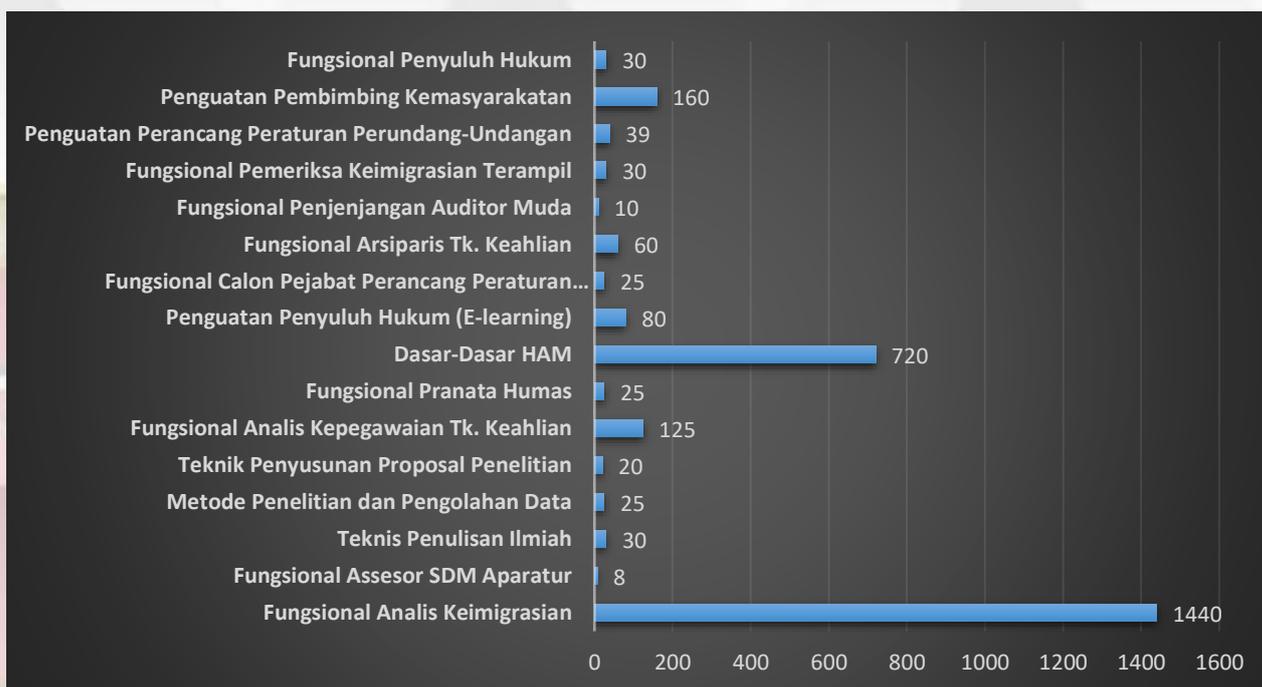
B. Bidang Penyelenggaraan

Penyelenggaraan kegiatan pelatihan pada Pusbang Diklat Fungsional dan HAM secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua 2 yaitu:

1. Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi di Bidang Fungsional dan HAM

Dengan anggaran sebesar Rp4.915.679.000,- ditargetkan pada tahun anggaran 2021 sebanyak 2.827 orang dapat ditingkatkan kompetensi melalui berbagai jenis pelatihan sebagai berikut

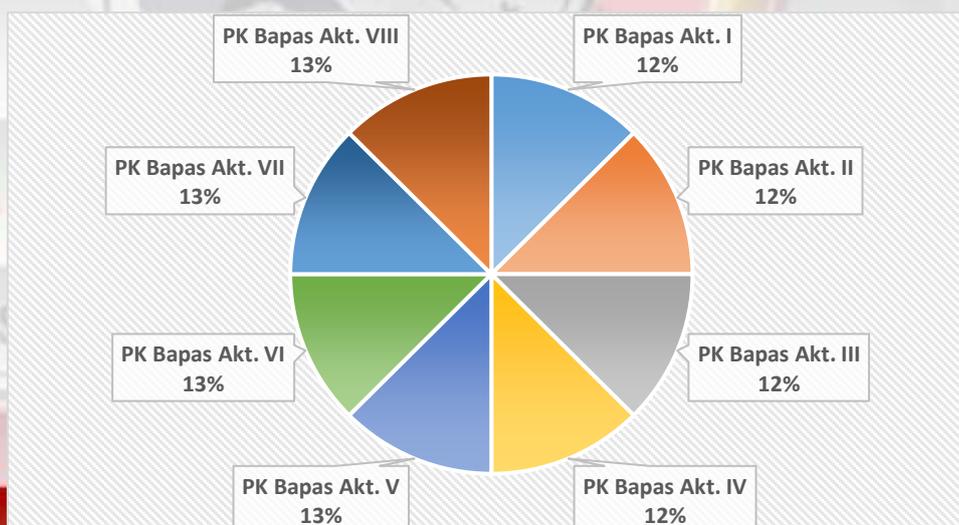
Grafik 2. 1 Rencana Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Fungsional dan HAM



2. Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi di Bidang Pembimbing Kemasyarakatan

Anggaran sebesar Rp1.057.966.000,- disediakan untuk menghasilkan lulusan pelatihan di bidang Pembimbing Kemasyarakatan sebanyak 320 orang yang terbagi dalam 8 angkatan.

Grafik 2. 2 Rencana Kegiatan Diklat Pembimbing Kemasyarakatan



C. Bidang Evaluasi Dan Pelaporan

Pada tahun 2021, Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pusbang Diklat Fungsional dan HAM memiliki anggaran sebesar Rp647.762.000,- untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan dan menyusun laporan penyelenggaraan diklat berbasis fungsional dan HAM sebanyak 54 laporan, serta anggaran sebesar Rp37.050.000,- untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan dan menyusun laporan penyelenggaraan diklat berbasis pembimbing kemasyarakatan sebanyak 8 laporan.

2. Pusat Penilaian Kompetensi

Tugas Pokok dan Fungsi

Pusat Penilaian Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan penilaian kompetensi dan pengelolaan system informasi bidang pengembangan sumber daya manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Fungsi Pusat Penilaian Kompetensi adalah:

- a. Penyiapan penyusunan Kebijakan Teknis, Program dan Anggaran Penilaian Kompetensi;
- b. Penyusunan Standarisasi dan Penilaian Kompetensi;
- c. Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penilaian Kompetensi;
- d. Pengelolaan System Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Pusat



Sasaran dan Indikator Kinerja Pusat Penilaian Kompetensi



Rencana Kerja

Anggaran sebesar Rp2.008.155.000,- diberikan kepada Pusat Penilaian Kompetensi untuk menyelenggarakan kegiatan penilaian kompetensi bagi aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan target tersusunnya dokumen profil kompetensi aparatur Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 4.800 dokumen. Berikut rencana kegiatan Pusat Penilaian Kompetensi pada Tahun 2020:

1. Bidang Program

Bidang Program diberikan anggaran sebesar Rp1.218.627.000,- untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan terkait penilaian kompetensi sebagai berikut:

Penyusunan Rencana Program Penilaian Kompetensi

- Penyusunan Rencana Program Penilaian Kompetensi
- Evaluasi Penyelenggaraan Dan Pemanfaatan Hasil Penilaian Kompetensi
- Peningkatan Kapasitas Calon Assesor
- Peningkatan Kapasitas Manajemen Dan Aesor Dalam Melakukan Wawancara Berbasis Kompetensi

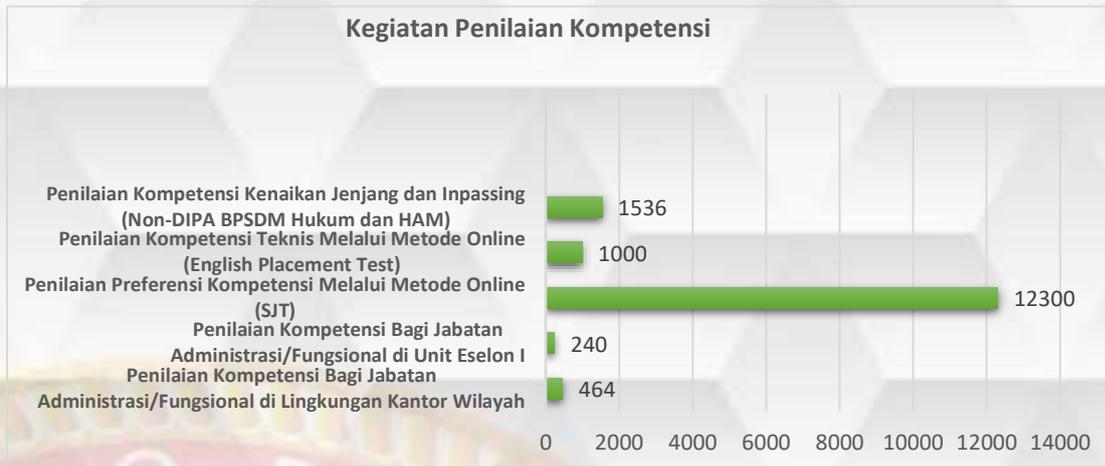
Penyusunan Instrumen, Analisa dan Standarisasi Pengembangan SDM

- Penyusunan Soal Prediksi Kompetensi
- Penyusunan Soal Prediksi Kompetensi Level IV
- Penyusunan Sub Indikator Kompetensi Manajerial Dan Sosial Kultural
- Peningkatan Kapasitas Manajemen Penilaian Kompetensi
- Penyusunan Soal Prediksi Kompetensi Level I
- Penyusunan Soal Prediksi Kompetensi Level III
- Penyusunan Sub Indikator Kompetensi Manajerial Dan Sosiokultural Level II

2. Bidang Penyelenggaraan

Bidang Penyelenggaraan dengan pagu anggaran sebesar Rp488.186.000,- pada tahun anggaran 2021 merencanakan melaksanakan kegiatan penilaian kompetensi sebagai berikut:

Grafik 2. 3 Rencana Kegiatan Penilaian Kompetensi



3. Bidang Sistem Informasi dan Jaringan

Untuk mendukung penggunaan teknologi informasi dalam pengembangan kompetensi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Bidang Sistem Informasi dan Jaringan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 301.342.000,- yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Bimtek Learning Manajemen Sistem Rumah Belajar
- Workshop Peningkatan Kapasitas Penggunaan Aplikasi Rumah Belajar
- Assessment Peremajaan Server

3. Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan

Tugas Pokok

Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pendidikan dan pelatihan teknis dan kepemimpinan.

Fungsi Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan adalah:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program dan anggaran di bidang pendidikan dan pelatihan teknis dan kepemimpinan;
2. Penyusunan pedoman dan program penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan kepemimpinan;
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan kepemimpinan;

4. Koordinasi dan pembinaan teknis substansi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan kepemimpinan;
5. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan kepemimpinan; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha Pusat.

Sasaran dan Indikator Kinerja Pusbang Diklat Teknis dan Kepemimpinan



Rencana Kerja

Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan pada Tahun 2021 menganggarkan pagu sebesar Rp9.425.186.000,- untuk melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi di bidang Teknis dan Kepemimpinan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta pelatihan berbasis kompetensi di Bidang Pelatihan Terpadu SPPA Bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada masing-masing bidang pada Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan :

A. Bidang Program

Bidang Program Pusbang Diklat Teknim memiliki pagu anggaran sebesar Rp922.268.000,- yang digunakan untuk menyelenggarakan berbagai macam kegiatan terkait perencanaan penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi di bidang teknis dan kepemimpinan serta diklat berbasis kompetensi di bidang SPPA bagi aparat penegak hukum. Berikut rincian rencana kegiatan pada Bidang Program:

Penyiapan Dokumen Rencana Kegiatan dan Kebijakan Diklat Teknis dan Kepemimpinan

- Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pada Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan
- Workshop Pengembangan Kompetensi Metode Corporate University

Pengembangan dan Penyempurnaan Kurikulum dan Modul Diklat

- Penyusunan Modul Best Practice Kemenkumham Corporate University

Perencanaan Diklat SPPA Bagi Aparatur Penegak Hukum

B. Bidang Penyelenggaraan

Untuk tahun anggaran 2021 Bidang Penyelenggaraan Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan memiliki target mengembangkan kompetensi aparatur hukum dan HAM di bidang Teknis dan Kepemimpinan sebanyak 36.628 orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp7.154.179.000,- serta pengembangan di bidang SPPA sebanyak 270 target lulusan dengan anggaran sebesar Rp735.200.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Rencana Pelatihan Teknis Dan Kepemimpinan

No	Nama Diklat	Target
1	PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TK.II	60
2	PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR	320
3	PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS	280
4	PELATIHAN DASAR CPNS	1.160
5	PELATIHAN TIM ASSESOR PMPRB	40
6	PELATIHAN PENYUSUNAN LAKIP	50
7	PELATIHAN REFORMASI BIROKRASI METODE <i>E-LEARNING</i> (10 AKT)	895
8	PELATIHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN TINGKAT DASAR METODE <i>E-LEARNING</i>	120
9	PELATIHAN MUATAN TEKNIS SUBSTANSI LEMBAGA METODE <i>E-LEARNING</i>	895
10	PELATIHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN TINGKAT LANJUTAN METODE <i>E-LEARNING</i>	200
11	PELATIHAN PELAYANAN PUBLIK TINGKAT DASAR METODE <i>E-LEARNING</i>	107
12	PELATIHAN PELAYANAN PUBLIK TINGKAT LANJUTAN METODE <i>E-LEARNING</i>	198

13	PELATIHAN MANAJEMEN RESIKO	59
14	PELATIHAN AUDIT IT	32
15	PELATIHAN PETUGAS PENGAMANAN TINGKAT LANJUTAN METODE <i>E-LEARNING</i>	1.026
16	WORKSHOP CALON TENAGA PENGAJAR LATSAR	364
17	PENDIDIKAN KHUSUS KEIMIGRASIAN BAGI PIMTI MADYA	2
18	PENDIDIKAN KHUSUS KEIMIGRASIAN BAGI ANALIS KEIMIGRASIAN UTAMA I	1
Total		5.809

Tabel 2. 2 Rencana Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak

No	Nama Diklat	Target
1	PELATIHAN TERPADU SPPA BAGI APGAKUM ANGKATAN 56	30
2	PELATIHAN TERPADU SPPA BAGI APGAKUM ANGKATAN 57	30
3	PELATIHAN TERPADU SPPA BAGI APGAKUM ANGKATAN 58	30
4	PELATIHAN TERPADU SPPA BAGI APGAKUM ANGKATAN 59	30
5	PELATIHAN TERPADU SPPA BAGI APGAKUM ANGKATAN 60	30
6	PELATIHAN TERPADU SPPA BAGI APGAKUM ANGKATAN 61	30
7	PELATIHAN TERPADU SPPA BAGI APGAKUM ANGKATAN 62	30
8	PELATIHAN TERPADU SPPA BAGI APGAKUM ANGKATAN 63	30
9	PELATIHAN TERPADU SPPA BAGI APGAKUM ANGKATAN 64	30
Total		270

C. Bagian Laporan dan Evaluasi

Anggaran Bagian laporan dan Evaluasi sebesar Rp592.914.000,- dengan target laporan yang disusun sebanyak 51 laporan penyelenggaraan pelatihan adapun untuk kegiatan laporan diklat Sistem Peradilan Pidana Anak dianggarkan sebesar Rp20.625.000,- dengan target sebanyak 9 laporan penyelenggaraan pelatihan.

4. Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM

Tugas Pokok dan Fungsi



Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM agar pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur hukum dan HAM bisa berjalan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan.

Fungsi Sekretariat Badan, adalah:

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi dan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Pengelolaan urusan barang milik negara, hubungan masyarakat dan umum;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- f. Pelaksanaan dan Koordinasi kerja sama pengembangan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- g. Pelaksanaan dan koordinasi fasilitasi pelaksanaan penataan kelembagaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia hukum dan Hak Asasi Manusia

Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM



Rencana Kerja

Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM pada Tahun 2021 menganggarkan sebesar Rp162.054.702.000,- untuk mendukung terlaksanannya kegiatan diklat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, berikut rencana kegiatan Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM :



Tabel 2. 3 Rencana Kerja Sekretariat TA. 2021

Bagian	Anggaran	Kegiatan
Pengelolaan Barang Milik Negara, Hubungan Masyarakat Dan Umum	Rp.139.909.742.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Administrasi BMN dan Umum 2. Penyediaan Informasi Publik 3. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi 4. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran 5. Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan 6. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
Keuangan	Rp.20.692.753.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Pelaksanaan Anggaran 2. Rekonsiliasi BPSDM Hukum dan HAM 3. Penyusunan Laporan Keuangan 4. Gaji dan Tunjangan 5. Belanja Uang Lembur
Kepegawaian	Rp.867.053.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian 2. Pengembangan Mandiri Pegawai 3. Pembinaan Mental Fisik dan Disiplin Pegawai 4. Administrasi Fasilitas RB, SPIP, Pembangunan ZI, WBK dan WBBM 5. Pencetakan Publikasi Pembangunan ZI 6. Administrasi Jabatan Dan Pemeberhentian Pegawai 7. Orasi Ilmiah 8. Penerbitan Jurnal Widyaiswara 9. Pengembangan Pegawai Silent Mindful Listening

		10. Corporate Culture Specialist
Program dan Kerjasama	Rp585.154.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Evaluasi dan Laporan 2. Penyusunan Program dan Rencana Kerja Anggaran 3. Pembinaan Administrasi Kerjasama dan Kelembagaan

5. Politeknik Ilmu Pemasarakatan (POLTEKIP)

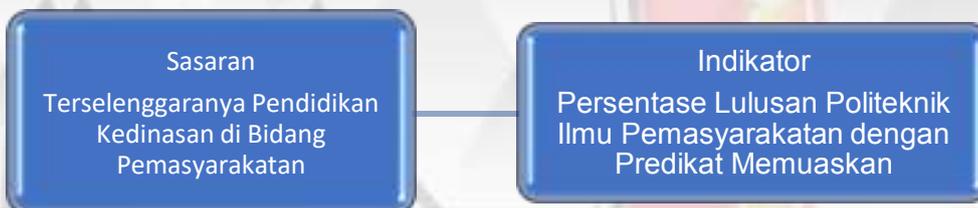
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pemasarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi pada jalur pendidikan program Diploma IV yang ditujukan pada keahlian terapan di bidang Pemasarakatan.

Fungsi Poltekup antara lain:

1. Penyusunan rencana dan program pendidikan;
2. Penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang Pemasarakatan;
3. Pelaksanaan penelitian terapan Pemasarakatan;
4. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
5. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
6. Pelaksanaan pengawasan internal;
7. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
8. Pelaksanaan administrasi umum; dan
9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan



Sasaran dan Indikator Kinerja Pendidikan Kedinasan POLTEKIP



Rencana Kerja

Politeknik Ilmu Pemasaryakatan pada Tahun 2021 menganggarkan sebesar Rp. 30.088.452.000,- untuk rencana pendidikan kedinasan di bidang Pemasaryakatan dengan rincian sebagai berikut :



Grafik 2. 4 Rencana Kegiatan POLTEKIP

No	Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi
1	Pendidikan Taruna Tingkat I	4436719000.00	4436514000
2	Pendidikan Taruna Tingkat II	4,316,642,000	4,315,793,500
3	Pendidikan Taruna Tingkat III	4,290,744,000	4,290,592,000
4	Pendidikan Taruna Tingkat IV	4,387,092,000	4,386,963,000
5	Masa basis calon taruna Politeknik Ilmu Pemasaryakatan	2587238000	2587122000
6	Layanan SDM	829,322,000	826,757,245
7	Layanan sarana internal	1,555,501,000	1,554,453,252
8	Layanan umum	694,390,000	686553636
9	Gaji dan Tunjangan	4,979,444,000	4,949,147,883
10	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2,675,210,000	2,668,068,900
11	Layanan monitoring dan evaluasi internal	2,382,000	2,382,000
	Jumlah	30,754,684,000	30,704,347,416

6. Politeknik Imigrasi (POLTEKIM)



Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Imigrasi, Politeknik Imigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang Keimigrasian, berikut fungsi Politeknik Imigrasi

Fungsi Politeknik Imigrasi:

1. Penyusunan rencana dan program pendidikan serta bahan ajar;
2. Penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang Keimigrasian;
3. Pelaksanaan penelitian;
4. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
5. Pelaksanaan sistem penjamin mutu dan pengawasan internal;
6. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
7. Pelaksanaan administrasi akademik dan umum;
8. Pengelolaan laboratorium, perpustakaan, sistem informasi dan penerbitan, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya; dan
9. Pelaksanaan kegiatan pelaporan



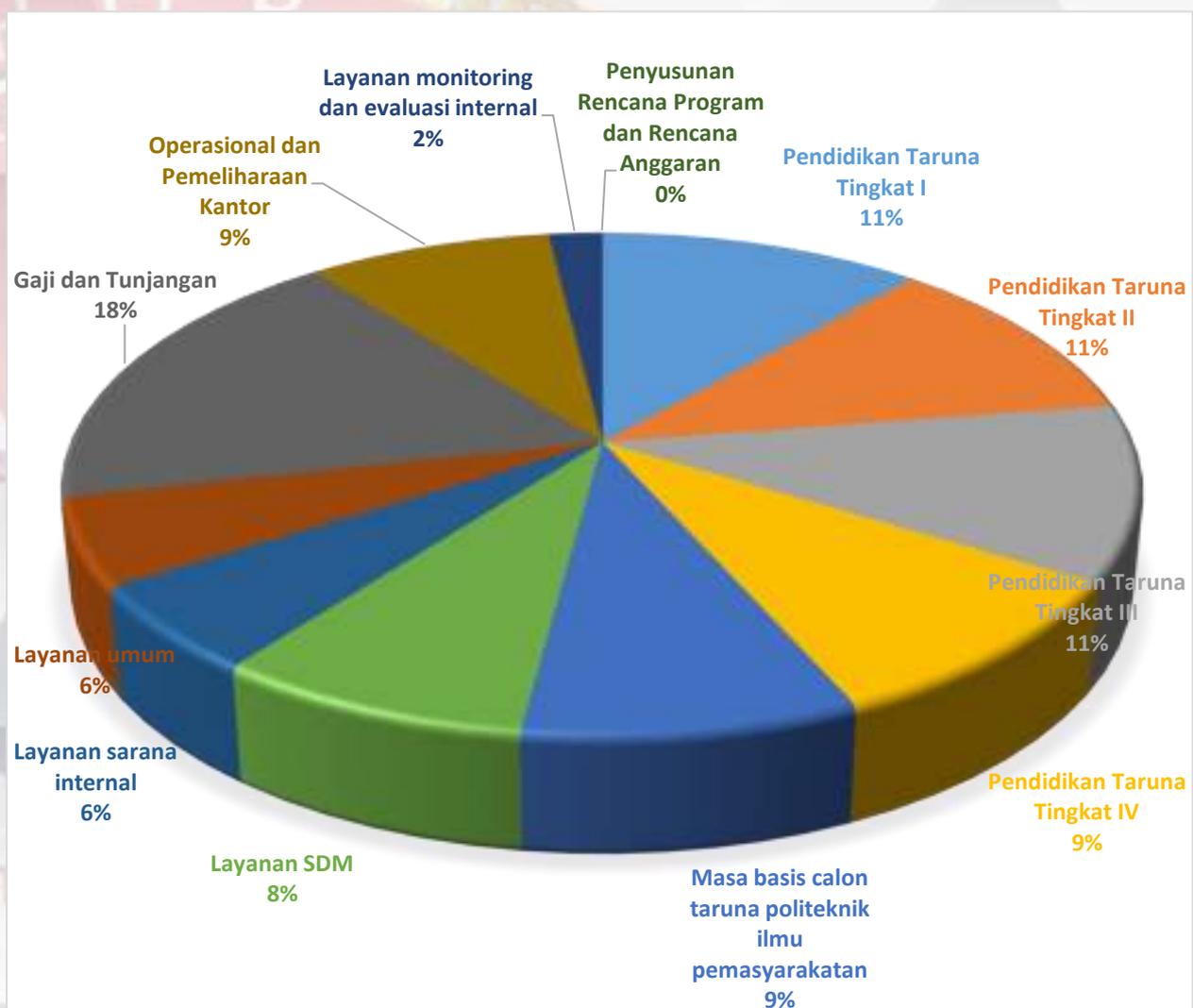
Sasaran dan Indikator Kinerja Pendidikan Kedinasan POLTEKIM



Rencana Kerja

Politeknik Imigrasi pada Tahun 2021 menganggarkan sebesar Rp. 26.455.438.000,- untuk pelaksanaan pendidikan kedinasan di bidang Keimigrasian dengan rincian rencana kegiatan sebagai berikut :

Grafik 2. 5 Rencana Kegiatan POLTEKIM



7. Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 04 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Balai Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan wilayah kerja yang ditentukan. Badiklat Hukum dan HAM yang ada di saat ini adalah :

1. Badiklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau
2. Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah
3. Badiklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara



Fungsi Balai Diklat Hukum dan HAM :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
4. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan



- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.



Sasaran dan Indikator Kinerja Balai Diklat Hukum dan HAM :



Pagu Anggaran Penyelenggaraan Pelatihan di Balai Diklat Hukum dan HAM



Tabel 2. 5 Rencana Pelatihan Klasikal pada Badiklat Hukum dan HAM

NO	BADIKLAT	Target	Ket
1	Kepulauan Riau	1.389	35 Angkatan
2	Sulawesi Utara	1.515	18 Angkatan
3	Jawa Tengah	2.843	51 Angkatan
TOTAL		5.747 orang	104 Angkatan

Tabel 2. 6 Rencana Pelatihan E-Learning Pada Badiklat Hukum dan HAM

NO	BADIKLAT	Target	Ket
1	Kepulauan Riau	2.018	50 Angkatan
2	Sulawesi Utara	2.090	52 Angkatan
3	Jawa Tengah	3.168	82 Angkatan
TOTAL		7.276 orang	184 Angkatan

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa dalam tahun 2021 terdapat 2 jenis pelatihan yang diselenggarakan badiklat Hukum dan Ham yaitu rencana Pelatihan Klasikal dimana target output berjumlah 5.747 orang dengan jumlah 104 angkatan dan rencana pelatihan E-learning dengan jumlah 7.276 orang dengan jumlah 184 angkatan.

D. Rencana Penyerapan Anggaran BPSDM Hukum dan HAM

Anggaran BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2021 sebesar Rp281.179.671.000,- yang terbagi dalam 9 Satuan Kerja berikut rencana penyerapan anggaran (*Disbursement plan*) BPSDM Hukum dan HAM.

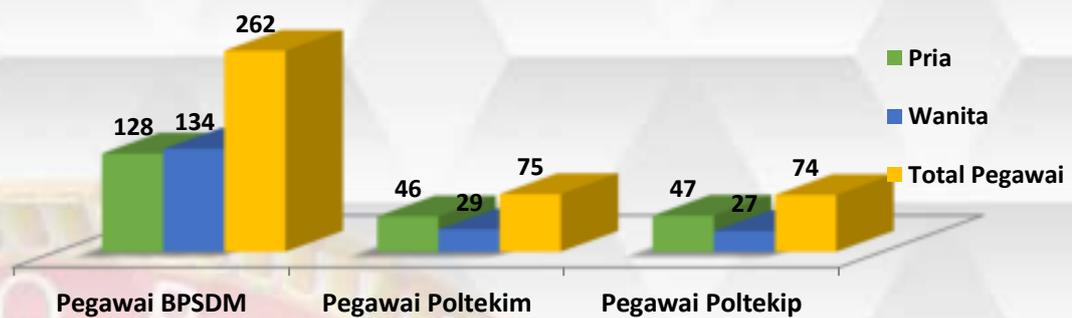
Tabel 2. 4 Rencana Penyerapan Anggaran TA.2021

Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2021													
No	Satuan Kerja	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nop	Des
1	Pusbang Diklat Fungsional dan HAM	0,10%	4,99%	8,30%	5,61%	2,58%	10%	5,99%	13,75%	10,29%	17,78%	18,71%	1,89%
2	Pusat Penilaian Kompetensi	0%	1,02%	7,62%	4,57%	3,59%	11,64%	9,87%	25,80%	6,45%	6,64%	16,11%	6,70%
3	Pusbang Diklat Teknis dan Kepemimpinan	0%	1,23%	12,52%	7,82%	6,86%	7,01%	5,62%	12,40%	4,92%	18,22%	13,25%	10,15%
4	Sekretariat	1,54%	2,28%	2,15%	3,85%	3,58%	15,06%	4,99%	15,95%	16,12%	16,33%	11,09%	7,06%
5	Badiklat Jateng	1,84%	3,21%	2,54%	7,00%	11,37%	4,21%	11,11%	6,11%	10,59%	11,06%	17,70%	13,27%
6	Badiklat Kepri	4,79%	4,11%	3,67%	4,98%	7,76%	6,77%	11,54%	18,99%	10,89%	6,56%	11,52%	8,41%
7	Badiklat Sulut	1,90%	1,05%	2,87%	2,14%	3,38%	3,82%	8,25%	6,10%	6,74%	28,99%	20,76%	13,99%
8	Poltekip	2,28%	3,81%	3,10%	4,32%	9,86%	17,76%	9,98%	7,69%	5,01%	14,47%	14,16%	7,55%
9	Poltekim	1,04%	5,35%	10,81%	6,17%	6,87%	17,01%	10,37%	9,15%	7,92%	7,71%	10,43%	7,17%

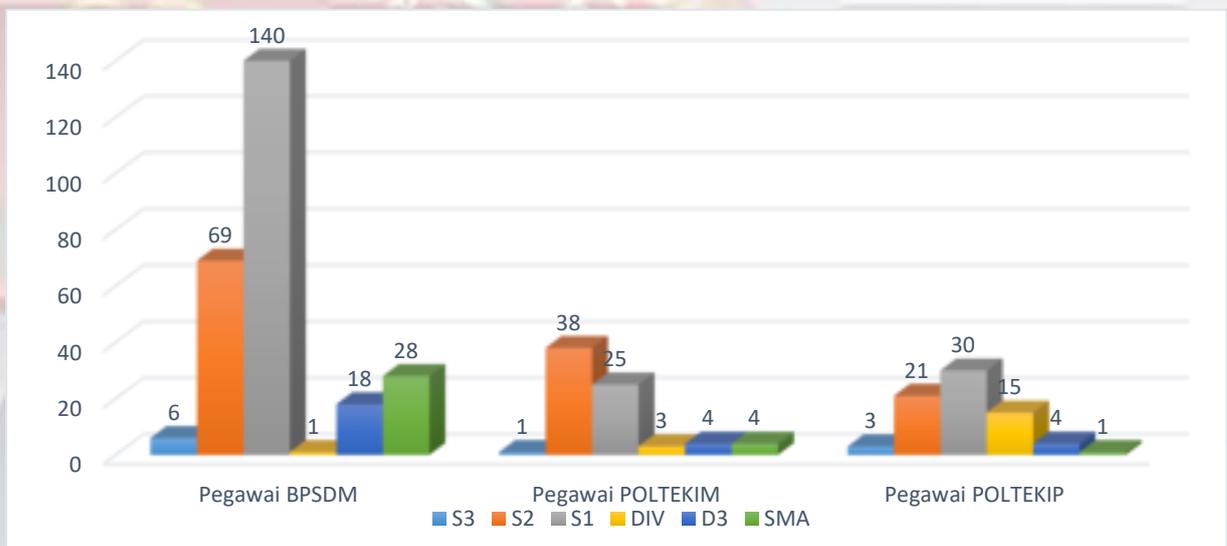
E. Sumber Daya Manusia BPSDM Hukum dan HAM

BPSDM Hukum dan HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan pengembangan SDM didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 350 orang dengan berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda.

Grafik 2. 6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. 7 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

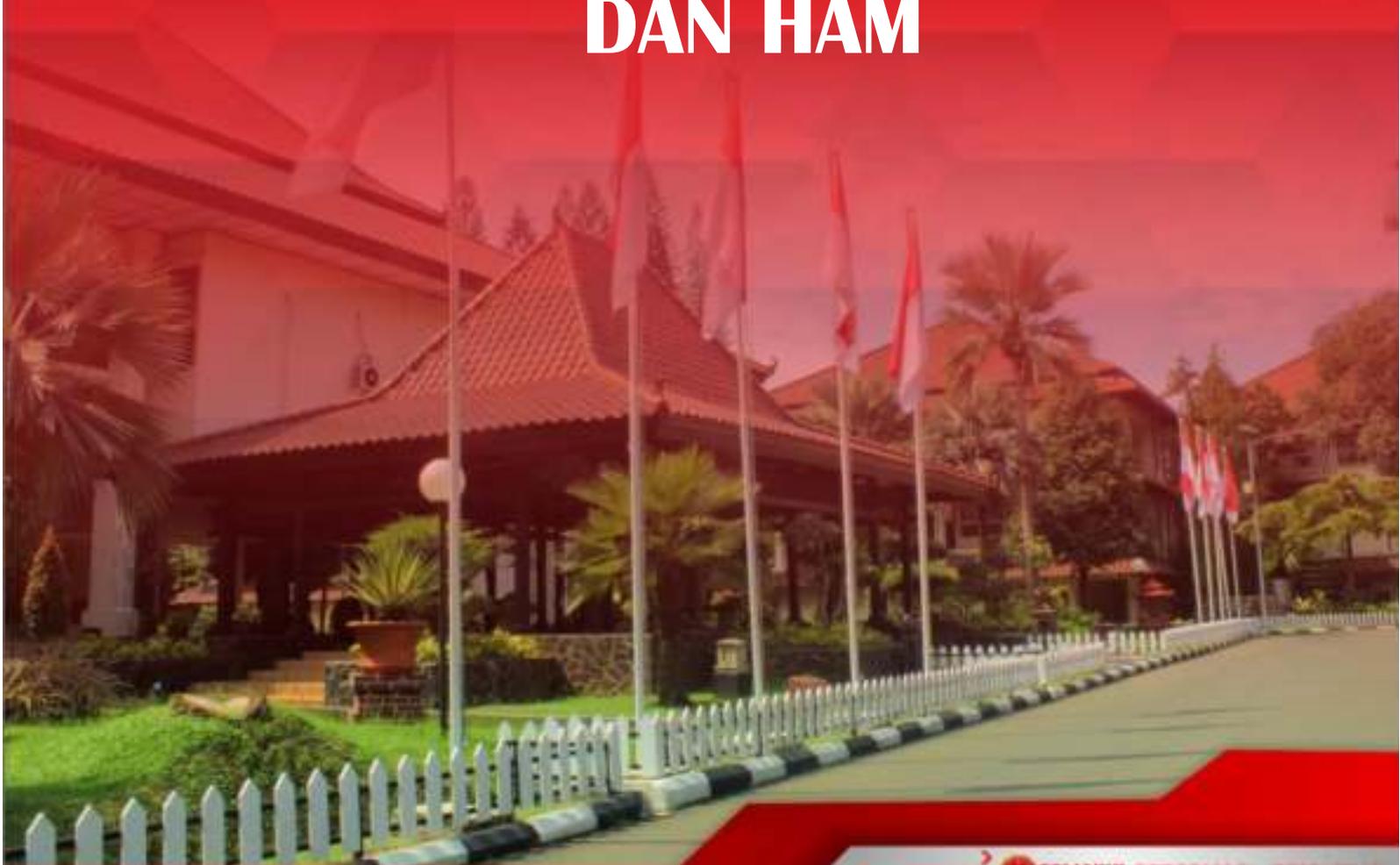


BAB III

CAPAIAN KINERJA

BPSDM HUKUM

DAN HAM



BAB III CAPAIAN KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN ANGGARAN 2021

Pada Bab ini akan dijelaskan tentang manifestasi dari pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dilaksanakan serta dapat di pertanggungjawabkan, yang meliputi pencapaian target dan implementasi kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM disertai dengan permasalahan yang dihadapi oleh BPSDM Hukum dan HAM pada Tahun 2021.

A. Capaian Kinerja BPSDM Hukum dan HAM

Pada tahun anggaran 2021, BPSDM Hukum dan HAM sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah menyelenggarakan berbagai jenis kegiatan pelatihan baik pelatihan teknis, pelatihan kepemimpinan maupun pelatihan fungsional dan HAM dengan output pelatihan sebanyak 21.574 aparatur di bidang Hukum dan HAM melalui berbagai metode pembelajaran yaitu klasikal (tatap muka langsung), pembelajaran jarak jauh (PJJ), *e-learning*, dan *blended learning*. Selain melakukan kegiatan pengembangan pegawai, BPSDM Hukum dan HAM juga melakukan penilaian dan pemetaan kompetensi kepada 19.281 pegawai.

Grafik 3. 1 Capaian Kinerja BPSDM Hukum dan HAM

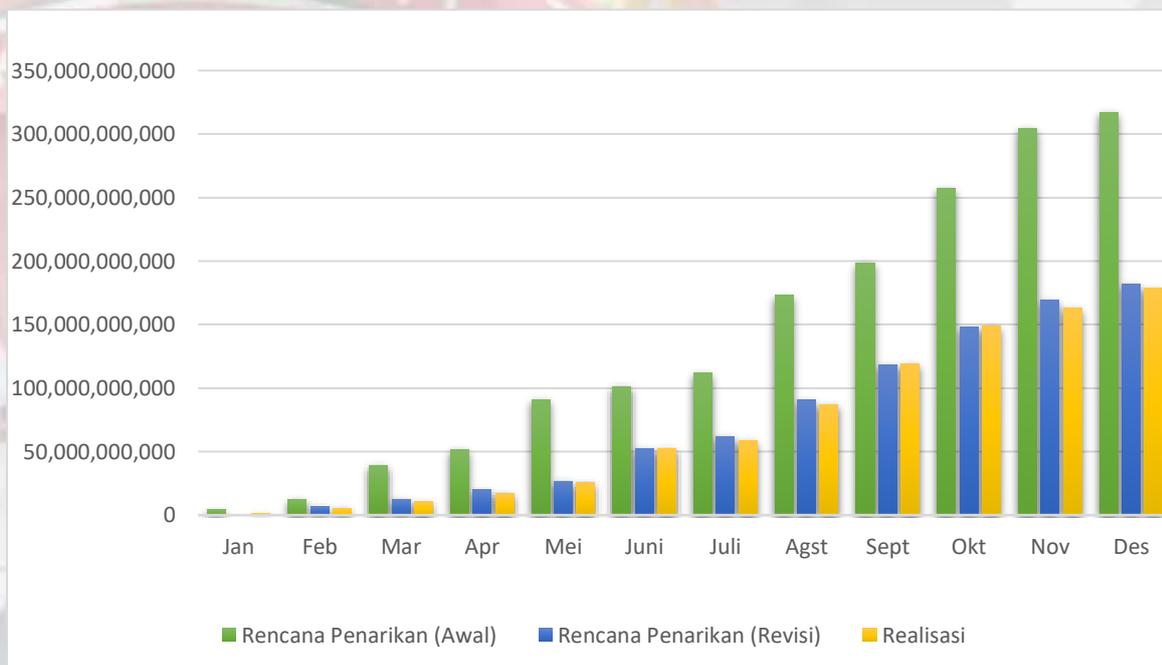


Disamping menyelenggarakan pengembangan pegawai bagi aparatur di bidang hukum dan HAM, BPSDM Hukum dan HAM juga menyelenggarakan Pendidikan Kedinasan

yang mencetak SDM yang memiliki kompetensi di bidang Keimigrasian dan Pemasaryakatan. Melalui Politeknik Ilmu Pemasaryakatan (POLTEKIP) dan Politeknik Imigrasi (POLTEKIM), BPSDM Hukum dan HAM menyelenggarakan Pendidikan Kedinasan yang mencetak SDM yang memiliki kompetensi di bidang Keimigrasian dan Pemasaryakatan. Jumlah taruna saat ini yang sedang mengikuti pendidikan kedinasan sebanyak adalah 1.9 taruna dengan 1.207 orang merupakan taruna Poltekip dan 1.141 orang merupakan taruna Poltekim. Dari sisi penyerapan anggaran, dari pagu anggaran yang diberikan sebesar Rp.281.179.671.000,-, BPSDM Hukum dan HAM berhasil menyerap anggaran sebesar Rp.277.973.836.683,- (98,8%).

Dalam masa pandemi covid-19, jumlah penyerapan anggaran yang dilakukan oleh BPSDM Hukum dan HAM termasuk memuaskan. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari komitmen para pimpinan dan pelaksana di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM untuk tetap berkinerja maksimal meskipun pada situasi yang tidak mendukung seperti saat ini.

Grafik 3. 2 Perbandingan Rencana dan Realisasi Anggaran 2021



Sumber : SMART Ditjen Anggaran 25 Januari 2022

Grafik 3. 3 Anggaran Belanja BPSDM Hukum dan HAM



Sumber : SMART Ditjen Anggaran 25 Januari 2022

Berdasarkan grafik tentang realisasi anggaran per belanja diketahui bahwa :

- Realisasi belanja pegawai sebesar Rp.20.434.629.514,- atau 99,92% dari pagu anggaran belanja pegawai sebesar Rp.20.450.261.000,-
- Realisasi belanja barang sebesar Rp.53.252.301.841,- atau 95,35% dari pagu anggaran belanja barang sebesar Rp.55.848.200.000,-
- Realisasi belanja modal sebesar Rp.104.791.484.183,- atau 99,44% dari pagu anggaran belanja barang sebesar Rp.105.381.725.000,-

Grafik 3. 4 Perbandingan Capaian Penyerapan Anggaran BPSDM Hukum dan HAM 2019-2021



Berdasarkan grafik diatas dapat kita ketahui meskipun dalam situasi pandemi covid-19, BPSDM Hukum dan HAM masih mampu meningkatkan capaian penyerapan anggarannya. Bisa dilihat dari perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya 2019

(94,49%), 2020 (97,53%), penyerapan pada tahun 2021 mengalami peningkatan realisasi anggaran sebesar 98,8% dari pagu yang diberikan.

Berikut capaian kinerja pada satuan kerja di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM tahun anggaran 2020:

1. Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM

a. Bidang Program

Bidang Program Pusat Pengembang Diklat Fungsional dan HAM pada Tahun 2021 melaksanakan beberapa kegiatan penyusunan kurikulum dan modul, serta bimtek. Kegiatan Bidang Program secara rinci antara lain :

**Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Bidang Program
Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM**

Indikator	Kinerja		Anggaran (Rp)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Penyusunan Rencana dan Program Pelatihan Fungsional dan HAM	1 dokumen	1 dokumen		
Penyusunan Kurikulum Penguatan Pelatihan Fungsional Pembimbingan Kemasyarakatan Metode <i>E-Learning</i>	1 dokumen	1 dokumen		
Penyusunan Modul Penguatan Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Metode <i>E-Learning</i>	6 dokumen	6 dokumen		
Penyusunan Kurikulum Pelatihan Dasar-Dasar HAM Metode <i>E-Learning</i>	1 dokumen	1 dokumen		
Penyusunan Modul Pelatihan Dasar-Dasar HAM Metode <i>E-Learning</i>	5 dokumen	5 dokumen	1.533.686.000	1.432.868.614
Bimtek Aplikasi <i>E-Learning</i> bagi Pengampu Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	1 kegiatan	1 kegiatan		
Penyusunan Modul Penjurangan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum	37 dokumen	37 dokumen		
Penyusunan Modul Penjurangan Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan	30 dokumen	30 dokumen		
Jumlah	82	82		
Persentase Capaian	100%		93,4%	

Berdasarkan tabel diatas, Bidang Program telah melaksanakan 12 kegiatan pada Tahun 2021 yang berarti bahwa kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan seluruhnya sehingga realisasi kegiatan Bidang Program mencapai 100%. Dari sisi anggaran, realisasi Bidang Program mencapai 93,4% atau sebesar Rp1.432.868.614,- dari yang dianggarkan dalam DIPA sebesar Rp1.533.686.000,-

b. Bidang Penyelenggaraan

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Bidang Penyelenggaraan Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM

Indikator	Kinerja		Anggaran (Rp)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Penyelenggaraan Diklat di Bidang Fungsional dan HAM	53	53	4.915.679.000	4.650.902.535
Jumlah Lulusan Diklat di Bidang Fungsional dan HAM	2.826	2.764		
Penyelenggaraan Diklat di Bidang Pembimbing Kemasyarakatan	8	8	1.057.966.000	994.905.662
Jumlah Lulusan Diklat di Bidang Pembimbing Kemasyarakatan	320	320		
Total	3.207	3.145	5.973.645.000	5.645.808.197
Persentase Capaian	98.1%		94,5%	

Berdasarkan tabel diatas, Bidang Penyelenggaraan Pusat Pengembang Diklat Fungsional dan HAM pada Tahun 2021 menyelenggarakan diklat sebanyak 61 kali dengan menggunakan Anggaran DIPA BPSDM Hukum dan HAM maupun PNPB BPSDM Hukum dan HAM. Penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan menggunakan metode klasikal maupun metode *e-learning* tersebut sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga hasil capaian kinerja Bidang Penyelenggaraan di Tahun 2021 mencapai 97,2% yang berasal dari 53 diklat di Bidang Fungsional dan HAM dan 8 diklat di Bidang Pembimbing Kemasyarakatan dengan jumlah lulusan diklat sebanyak 2.127 orang, dengan rincian sebagai berikut:

1. 1.807 orang telah lulus mengikuti diklat berbasis kompetensi di bidang Fungsional dan HAM;

2. 320 orang telah lulus mengikuti diklat berbasis kompetensi di bidang Pembimbing Kemasyarakatan.

Adapun realisasi penyerapan anggaran Bidang Penyelenggaraan diklat pada Tahun 2021 sebesar 94,5% atau Rp5.645.808.197,- dari yang dianggarkan dalam DIPA BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2019 sebesar Rp5.973.645.000,-. Selama masa pandemi covid-19 berlangsung, penyelenggaraan pelatihan klasikal diselenggarakan dengan metode pembelajaran jarak jauh. Metode ini memanfaatkan aplikasi *Zoom* sebagai media pembelajaran. Informasi lebih lengkap tentang capaian output diklat yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel 3. 3 Capaian Pelatihan di Bidang Fungsional dan HAM
Metode Klasikal/PJJ**

No	Nama Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Peserta	
			Target	Output
1	Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (PNBP)	7 Juni s/d 2 September 2021	25	25
2	Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Ahli Pertama Angkatan XXII	1 Februari s/d 24 Februari 2021	40	40
3	Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Ahli Pertama Angkatan XXIII	15 Februari s/d 9 Maret 2021	40	40
4	Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Ahli Pertama Angkatan XXIV	22 Februari s/d 18 Maret 2021	40	40
5	Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Ahli Pertama Angkatan XXV	1 s/d 24 Maret 2021	40	40
6	Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Ahli Pertama Angkatan XXVI	9 Maret s/d 1 April 2021	40	40
7	Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Ahli Pertama Angkatan XXVII	15 Maret s/d 7 April 2021	40	40
8	Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Ahli Pertama Angkatan XXVIII	22 Maret s/d 14 April 2021	40	40
9	Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Ahli Pertama Angkatan XXIX	29 Maret s/d 21 April 2021	40	40
10	Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Ahli Pertama Angkatan XXX	5 April s/d 27 April 2021	40	40

11	Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Ahli Pertama Angkatan XXXI	12 April s/d 4 Mei 2021	40	40
12	Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Ahli Pertama Angkatan XXXII	19 April s/d 11 Mei 2021	40	40
13	Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Ahli Pertama Angkatan XXXIII	24 Mei s/d 18 Juni 2021	40	40
14	Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Ahli Pertama Angkatan XXX IV	2 s/d 25 Juni 2021	40	40
15	Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Ahli Pertama Angkatan XXXV	7 s/d 30 Juni 2021	40	40
16	Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Ahli Pertama Angkatan XXXVI	14 Juni s/d 7 Juli 2021	40	40
17	Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Ahli Pertama Angkatan XXXVII	16 Juni s/d 9 Juli 2021	40	40
18	Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Ahli Pertama Angkatan XXXVIII	21 Juni s/d 14 Juli 2021	39	39
19	Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Ahli Pertama Angkatan XXXIX	28 Juni s/d 22 Juli 2021	40	40
20	Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Ahli Pertama Angkatan XL	5 s/d 29 Juli 2021	40	39
21	Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Ahli Pertama Angkatan XLI	9 Juli s/d 4 Agustus 2021	40	40
22	Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Ahli Pertama Angkatan XLII	13 Juli s/d 6 Agustus 2021	40	40
23	Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Ahli Pertama Angkatan XLIII	26 Juli s/d 20 Agustus 2021	40	40
24	Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Ahli Pertama Angkatan XLIV	2 s/d 27 Agustus 2021	40	40
25	Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Ahli Pertama Angkatan XLV	12 Agustus s/d 7 September 2021	40	40
26	Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Ahli Pertama Angkatan XLVI	18 Agustus s/d 10 September 2021	40	40
27	Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Ahli Pertama Angkatan XLVII	25 Agustus s/d 17 September 2021	40	40
28	Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Ahli Pertama Angkatan XLVIII	1 s/d 24 September 2021	40	40
29	Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Ahli Pertama Angkatan XLIX	7 s/d 30 September 2021	40	40

30	Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Ahli Pertama Angkatan L	14 September s/d 7 Oktober 2021	40	40
31	Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Ahli Pertama Angkatan LI	21 September s/d 14 Oktober 2021	40	40
32	Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Ahli Pertama Angkatan LII	27 September s/d 21 Oktober 2021	40	40
33	Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Ahli Pertama Angkatan LIII	4 s/d 28 Oktober 2021	40	40
34	Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Ahli Pertama Angkatan LIV	11 Oktober s/d 4 November 2021	40	40
35	Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Ahli Pertama Angkatan LV	18 Oktober s/d 11 November 2021	40	40
36	Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Ahli Pertama Angkatan LVI	25 Oktober s/d 17 November 2021	39	39
37	Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Ahli Pertama Angkatan LVII	1 s/d 24 November 2021	40	40
38	Pelatihan Fungsional Arsiparis Tingkat Keahlian Angkatan I	2 Juni s/d 15 Juni 2021	30	29
39	Pelatihan Fungsional Arsiparis Tingkat Keahlian Angkatan II	2 Agustus s/d 16 September 2021	30	30
40	Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Pertama	28 Oktober s/d 25 November 2021	30	30
41	Pelatihan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian Terampil	5 s/d 28 Juli 2021	30	29
42	Pelatihan Fungsional Penjenjangan Auditor Muda	29 Juni s/d 29 Juli 2021	10	7
43	Pelatihan Fungsional Pranata Humas	3 s/d 29 Oktober 2021	25	25
44	Pelatihan Fungsional Analisis Kepegawaian Keahlian Akt. I	31 Mei s/d 24 Juni 2021	30	30
45	Pelatihan Fungsional Analisis Kepegawaian Keahlian Akt. II	31 Mei s/d 24 Juni 2021	30	28
46	Pelatihan Fungsional Analisis Kepegawaian Keahlian Akt. III	1 s/d 24 November 2021	32	32
47	Pelatihan Fungsional Analisis Kepegawaian Keahlian Akt. IV	1 s/d 24 November 2021	33	33
48	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan Proposal Penelitian	26 April s/d 7 Mei 2021	20	17
49	Pendidikan dan Pelatihan Metode Penelitian Sosial	6 s/d 19 April 2021	25	25
50	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penulisan Ilmiah	15 s/d 26 Maret 2021	30	29

51	Pelatihan Fungsional Assesor SDM Aparatur (PNBP) Gelombang I	24 Februari s/d 31 Maret 2021	4	4
52	Pelatihan Fungsional Assesor SDM Aparatur (PNBP) Gelombang II	25 Mei s/d 28 Juni 2021	4	4
Total			1.826	1.814

Tabel 3. 4 Capaian Pelatihan di Bidang Fungsional dan HAM Metode *E-learning*

No	Nama Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Peserta	
			Target	Output
1	Pelatihan Dasar-dasar HAM Metode <i>E-learning</i> Angkatan I	17 s/d 26 Februari 2021	40	40
2	Pelatihan Dasar-dasar HAM Metode <i>E-learning</i> Angkatan II	17 s/d 26 Februari 2021	40	39
3	Pelatihan Dasar-dasar HAM Metode <i>E-learning</i> Angkatan III	17 s/d 26 Februari 2021	40	40
4	Pelatihan Dasar-dasar HAM Metode <i>E-learning</i> Angkatan IV	17 s/d 26 Februari 2021	40	39
5	Pelatihan Dasar-dasar HAM Metode <i>E-learning</i> Angkatan V	15 s/d 24 Maret 2021	40	40
6	Pelatihan Dasar-dasar HAM Metode <i>E-learning</i> Angkatan VI	15 s/d 24 Maret 2021	40	40
7	Pelatihan Dasar-dasar HAM Metode <i>E-learning</i> Angkatan VII	15 s/d 24 Maret 2021	40	40
8	Pelatihan Dasar-dasar HAM Metode <i>E-learning</i> Angkatan VIII	15 s/d 24 Maret 2021	40	40
9	Pelatihan Dasar-dasar HAM Metode <i>E-learning</i> Angkatan IX	1 s/d 10 September 2021	40	40
10	Pelatihan Dasar-dasar HAM Metode <i>E-learning</i> Angkatan X	2 s/d 10 September 2021	40	38
11	Pelatihan Dasar-dasar HAM Metode <i>E-learning</i> Angkatan XI	3 s/d 10 September 2021	40	40
12	Pelatihan Dasar-dasar HAM Metode <i>E-learning</i> Angkatan XII	13 s/d 22 September 2021	40	40
13	Pelatihan Dasar-dasar HAM Metode <i>E-learning</i> Angkatan XIII	13 s/d 22 September 2021	40	40

14	Pelatihan Dasar-dasar HAM Metode <i>E-learning</i> Angkatan XIV	13 s/d 22 September 2021	40	40
15	Pelatihan Dasar-dasar HAM Metode <i>E-learning</i> Angkatan XV	22 September s/d 1 Oktober 2021	40	40
16	Pelatihan Dasar-dasar HAM Metode <i>E-learning</i> Angkatan XVI	22 September s/d 1 Oktober 2021	40	40
17	Pelatihan Dasar-dasar HAM Metode <i>E-learning</i> Angkatan XVII	22 September s/d 1 Oktober 2021	40	40
18	Pelatihan Dasar-dasar HAM Metode <i>E-learning</i> Angkatan XVIII	4 s/d 13 Oktober 2021	40	40
19	Pelatihan Penguatan Penyuluh Hukum Metode <i>E-Learning</i> Akt. I	28 Juni s/d 7 Juli 2021	40	24
20	Pelatihan Penguatan Penyuluh Hukum Metode <i>E-Learning</i> Akt. II	28 Juni s/d 7 Juli 2021	40	32
21	Pelatihan Penguatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Metode <i>E-learning</i>	23 Agustus s/d 1 September 2021	40	23
22	Pelatihan Penguatan Pembimbing Kemasyarakatan Metode <i>E-learning</i> Akt. I	18 s/d 29 Oktober 2021	40	40
23	Pelatihan Penguatan Pembimbing Kemasyarakatan Metode <i>E-learning</i> Akt. II	25 Oktober s/d 4 November 2021	40	40
24	Pelatihan Penguatan Pembimbing Kemasyarakatan Metode <i>E-learning</i> Akt. III	25 Oktober s/d 4 November 2021	40	36
25	Pelatihan Penguatan Pembimbing Kemasyarakatan Metode <i>E-learning</i> Akt. IV	15 s/d 25 November 2021	40	39
Total			1.000	950

Tabel 3. 5 Capaian Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan

No	Nama Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Peserta	
			Target	Output
1	Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Akt. XXXV	23 Februari s/d 24 Maret 2021	40	40
2	Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Akt. XXXVI	2 s/d 30 Maret 2021	40	40

3	Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Akt. XXXVII	2 s/d 29 Juni 2021	40	40
4	Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Akt. XXXVIII	14 Juni s/d 9 Juli 2021	40	40
5	Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Akt. XXXIX	28 Juni s/d 26 Juli 2021	40	40
6	Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Akt. XL	26 Juli s/d 24 Agustus 2021	40	40
7	Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Akt. XLI	18 Agustus s/d 14 September 2021	40	40
8	Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Akt. XLII	30 Agustus s/d 24 September 2021	40	40
Total			320	320

c. Bidang Evaluasi dan Laporan

Capaian kinerja Bidang Evaluasi dan Laporan Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM dapat dilihat dari indikator kinerja bidangnya berikut ini:

Tabel 3. 6 Capaian Kinerja Bidang Evaluasi dan Laporan Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM

Indikator	Kinerja		Anggaran (Rp)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Diklat di Bidang Fungsional dan HAM	53	53	647.762.000	608.985.094
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Diklat di Bidang Pembimbing Kemasyarakatan	8	8	37.050.000	33.305.500
Total	61	61	684.812.000	642.290.594
Persentase Capaian	100%		93,8%	

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kerjanya diperoleh data



capaian kinerja Bidang Evaluasi dan Pelaporan adalah sebesar 100 % hasil ini diperoleh dari pembagian antara realisasi dengan target, adapun dari sisi penyerapan anggaran Bidang Evaluasi dan Pelaporan pada Tahun 2021 telah berhasil melakukan penyerapan anggaran sebesar 93,8% atau Rp642.290.594,- dari anggaran yang disediakan sebesar Rp684.812.000,-

2. Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan

a. Bidang Program

Kinerja yang dihasilkan Bidang Program Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan pada Tahun 2021 dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 3. 7 Capaian Kinerja Bidang Program Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan

Indikator	Kinerja		Anggaran (Rp)	
	Target	Realisasi	Pagu	Realisasi
Penyiapan Dokumen Rencana Kegiatan dan Kebijakan Diklat TEKPIM	2 dokumen	2 dokumen	247.210.000	229.414.158
Pengembangan dan Penyempurnaan Kurikulum dan Modul Diklat	19 Modul	19 Modul	666.908.000	653.016.100
Perencanaan Penyelenggaraan Diklat Berbasis SPPA	1 dokumen	1 dokumen	8.150.000	4.750.000
Jumlah	22 Dokumen	22 Dokumen	922.268.000	887.180.258
Persentase Capaian	100%		96,2%	

Seluruh kegiatan yang telah direncanakan oleh Bidang Program pada Tahun 2021 telah dilaksanakan dengan baik, seperti kegiatan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan kebijakan diklat Tekpim, dan kegiatan pengembangan dan penyempurnaan kurikulum dan modul *Best Practice*. Adapun realisasi penyerapan anggaran Bidang Program pada Tahun 2021 sebesar 96,2%.

b. Bidang Penyelenggaraan

Kinerja Bidang Penyelenggaraan pada Tahun 2021 Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan dapat dilihat dari indikator kinerja Bidang Penyelenggaraan diklat berikut ini.

**Tabel 3. 8 Capaian Kinerja Bidang Penyelenggara
Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan**

Indikator Kinerja	Kinerja		Anggaran (Rp)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah Penyelenggaraan Diklat Berbasis Teknis dan Kepemimpinan	99	99	7.154.179.000	7.001.934.337
Jumlah Lulusan Diklat Berbasis Teknis dan Kepemimpinan	5.809	5.197		
Jumlah Penyelenggaraan Diklat Berbasis SPPA	9	9	735.200.000	621.821.300
Jumlah Lulusan Diklat Berbasis SPPA	270	270		
Total	6.187	5.575	7.889.379.000	7.623.755.637
Prosentase Capaian	90,1%		96,6%	

Realisasi anggaran Bidang Penyelenggara Diklat pada tahun 2021 sebesar 96,6%. Penyerapan anggaran tahun ini naik dibanding tahun 2020 yang hanya mencapai 91,9%.

Dari penyelenggaraan diklat tersebut Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan menghasilkan lulusan sebanyak 5.466 orang dengan rincian sebagai berikut,

- 5.196 orang telah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi di bidang teknis dan kepemimpinan dengan metode klasikal dan *e-learning*.
- 270 orang jumlah lulusan yang mengikuti diklat berbasis kompetensi di bidang pelatihan terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparat Penegak Hukum.



Selama masa pandemi covid-19 berlangsung, penyelenggaraan pelatihan klasikal diselenggarakan dengan metode pembelajaran jarak jauh. Metode ini memanfaatkan aplikasi Zoom sebagai media pembelajaran. Berikut jenis diklat yang diselenggarakan oleh Bidang Penyelenggaraan Diklat Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan:

Tabel 3. 9 Capaian Pelatihan Teknis Dan Kepemimpinan Metode Klasikal/PJJ

No	Nama Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Peserta	
			Target	Output
1	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Januari – November 2021	320	318
2	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	Februari – Desember 2021	280	278
3	Pelatihan Dasar CPNS	April – November 2021	1.160	1.156
4	Pelatihan Penyusunan LAKIP	8 s/d 10 Februari 2021	50	50
5	Pelatihan Manajemen Resiko (PNBP)	Maret – April 2021	59	59
6	Pelatihan Audit IT (PNBP)	1 s/d 4 Maret 2021	32	32
7	Pelatihan Tim Assesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB	14 s/d 19 Maret 2021	40	40
8	Workshop Calon Tenaga Pengajar Latsar	April – Mei 2021	364	356
9	Pendidikan Khusus Keimigrasian Bagi PIMTI Madya	7 s/d 10 Juni 2021	2	2
10	Pendidikan Khusus Keimigrasian Bagi Analis Keimigrasian Utama I	28 April s/d 10 Juni 2021	1	1
Total			2.308	2.292



Tabel 3. 10 Capaian Pelatihan Teknis Dan Kepemimpinan Metode *Blended*

No	Nama Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Peserta	
			Target	Output
1	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II		60	59

Tabel 3.11 Capaian Pelatihan Teknis Dan Kepemimpinan Metode E-learnig

No	Nama Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Peserta	
			Target	Lulusan
A	PELATIHAN REFORMASI BIROKRASI METODE E-LEARNING		895	839
1	- Angkatan I	11 s/d 19 Februari 2021	40	39
2	- Angkatan II	11 s/d 19 Februari 2021	40	36
3	- Angkatan III	11 s/d 19 Februari 2021	40	34
4	- Angkatan IV	11 s/d 19 Februari 2021	40	37
5	- Angkatan V	11 s/d 19 Februari 2021	40	37
6	- Angkatan VI	11 s/d 19 Februari 2021	40	40
7	- Angkatan VII	19 s/d 26 Februari 2021	40	30
8	- Angkatan VIII	19 s/d 26 Februari 2021	40	35
9	- Angkatan IX	19 s/d 26 Februari 2021	40	33
10	- Angkatan X	19 s/d 26 Februari 2021	40	37
11	- Angkatan XI	19 s/d 26 Februari 2021	18	18
12	- Angkatan XII	26 Februari s/d 5 Maret 2021	40	40
13	- Angkatan XIII	26 Februari s/d 5 Maret 2021	40	40
14	- Angkatan XIV	26 Februari s/d 5 Maret 2021	39	36
15	- Angkatan XV	26 Februari s/d 5 Maret 2021	40	36
16	- Angkatan XVI	26 Februari s/d 5 Maret 2021	39	32

17	- Angkatan XVII	26 Februari s/d 5 Maret 2021	39	39
18	- Angkatan XVIII	5 s/d 16 Maret 2021	40	40
19	- Angkatan XIX	5 s/d 16 Maret 2021	40	40
20	- Angkatan XX	5 s/d 16 Maret 2021	40	40
21	- Angkatan XXI	5 s/d 16 Maret 2021	40	40
22	- Angkatan XXII	5 s/d 16 Maret 2021	40	40
23	- Angkatan XXIII	5 s/d 16 Maret 2021	40	40
B	PELATIHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN TINGKAT DASAR METODE E- LEARNING		120	96
24	- Angkatan I	17 s/d 24 September 2021	40	29
25	- Angkatan II	17 s/d 24 September 2021	40	31
26	- Angkatan III	17 s/d 24 September 2021	40	36
C	PELATIHAN MUATAN TEKNIS SUBSTANSI LEMBAGA METODE E- LEARNING		895	808
27	- Angkatan I	5 s/d 25 Februari 2021	40	40
28	- Angkatan II	5 s/d 25 Februari 2021	40	39
29	- Angkatan III	5 s/d 25 Februari 2021	39	36
30	- Angkatan IV	5 s/d 25 Februari 2021	40	40
31	- Angkatan V	5 s/d 25 Februari 2021	39	29
32	- Angkatan VI	5 s/d 25 Februari 2021	40	40
33	- Angkatan VII	11 Februari s/d 3 Maret 2021	40	40
34	- Angkatan VIII	11 Februari s/d 3 Maret 2021	40	40
35	- Angkatan IX	11 Februari s/d 3 Maret 2021	40	40
36	- Angkatan X	11 Februari s/d 3 Maret 2021	40	39
37	- Angkatan XI	11 Februari s/d 3 Maret 2021	40	37
38	- Angkatan XII	11 Februari s/d 3 Maret 2021	40	40
39	- Angkatan XIII	19 Februari s/d 10 Maret 2021	40	38
40	- Angkatan XIV	19 Februari s/d 10 Maret 2021	40	35
41	- Angkatan XV	19 Februari s/d 10 Maret 2021	40	34

42	- Angkatan XVI	19 Februari s/d 10 Maret 2021	40	36
43	- Angkatan XVII	19 Februari s/d 10 Maret 2021	40	36
44	- Angkatan XVIII	19 Februari s/d 10 Maret 2021	40	39
45	- Angkatan XIX	26 Februari s/d 18 Maret 2021	40	36
46	- Angkatan XX	26 Februari s/d 18 Maret 2021	39	22
47	- Angkatan XXI	26 Februari s/d 18 Maret 2021	40	19
48	- Angkatan XXII	26 Februari s/d 18 Maret 2021	40	36
49	- Angkatan XXIII	26 Februari s/d 18 Maret 2021	18	17
D	PELATIHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN TINGKAT LANJUTAN METODE E-LEARNING		200	194
50	- Angkatan I	24 September s/d 1 Oktober 2021	40	38
51	- Angkatan II	24 September s/d 1 Oktober 2021	40	39
52	- Angkatan III	24 September s/d 1 Oktober 2021	40	39
53	- Angkatan IV	1 s/d 8 Oktober 2021	40	39
54	- Angkatan V	1 s/d 8 Oktober 2021	40	39
E	PELATIHAN PELAYANAN PUBLIK TINGKAT DASAR METODE E-LEARNING		107	71
55	- Angkatan I	8 s/d 14 Oktober 2021	36	19
56	- Angkatan II	8 s/d 14 Oktober 2021	35	26
57	- Angkatan III	8 s/d 14 Oktober 2021	36	26
F	PELATIHAN PELAYANAN PUBLIK TINGKAT LANJUTAN METODE E-LEARNING		198	123
58	- Angkatan I	15 s/d 22 Oktober 2021	38	19
59	- Angkatan II	15 s/d 22 Oktober 2021	40	18
60	- Angkatan III	15 s/d 22 Oktober 2021	40	23
61	- Angkatan IV	22 s/d 28 Oktober 2021	40	29
62	- Angkatan V	22 s/d 28 Oktober 2021	40	34
G	PELATIHAN PETUGAS PENGAMANAN TINGKAT LANJUTAN METODE E-LEARNING		1.026	714

63	- Angkatan I	16 Juli s/d 2 Agustus 2021	40	26
64	- Angkatan II	16 Juli s/d 2 Agustus 2021	40	15
65	- Angkatan III	16 Juli s/d 2 Agustus 2021	40	17
66	- Angkatan IV	16 Juli s/d 2 Agustus 2021	40	27
67	- Angkatan V	23 Juli s/d 6 Agustus 2021	40	24
68	- Angkatan VI	23 Juli s/d 6 Agustus 2021	40	28
69	- Angkatan VII	23 Juli s/d 6 Agustus 2021	40	29
70	- Angkatan VIII	23 Juli s/d 6 Agustus 2021	40	27
71	- Angkatan IX	6 s/d 23 Agustus 2021	40	28
72	- Angkatan X	6 s/d 23 Agustus 2021	40	30
73	- Angkatan XI	6 s/d 23 Agustus 2021	40	28
74	- Angkatan XII	6 s/d 23 Agustus 2021	40	30
75	- Angkatan XIII	13 s/d 30 Agustus 2021	40	30
76	- Angkatan XIV	13 s/d 30 Agustus 2021	40	29
77	- Angkatan XV	13 s/d 30 Agustus 2021	40	31
78	- Angkatan XVI	13 s/d 30 Agustus 2021	40	26
79	- Angkatan XVII	27 Agustus s/d 10 September 2021	40	28
80	- Angkatan XVIII	27 Agustus s/d 10 September 2021	39	23
81	- Angkatan XIX	27 Agustus s/d 10 September 2021	40	25
82	- Angkatan XX	27 Agustus s/d 10 September 2021	40	29
83	- Angkatan XXI	27 Agustus s/d 10 September 2021	39	29
84	- Angkatan XXII	3 s/d 17 September 2021	38	33
85	- Angkatan XXIII	3 s/d 17 September 2021	39	35
86	- Angkatan XXIV	3 s/d 17 September 2021	35	30
87	- Angkatan XXV	3 s/d 17 September 2021	40	33
88	- Angkatan XXVI	3 s/d 17 September 2021	36	24
Total			3.441	2.845

Tabel 3. 12 Capaian Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak

No	Nama Diklat	Waktu	Peserta	
			Target	Realisasi
1	Pelatihan Terpadu SPPA Angkatan (56)	3 s/d 25 Februari 2021	30	29
2	Pelatihan Terpadu SPPA Angkatan (57)	3 s/d 26 Maret 2021	30	29
3	Pelatihan Terpadu SPPA Angkatan (58)	31 Maret s/d 22 April 2021	30	32
4	Pelatihan Terpadu SPPA Angkatan (59)	2 s/d 23 Juni 2021	30	30
5	Pelatihan Terpadu SPPA Angkatan (60)	2 s/d 27 Agustus 2021	30	28
6	Pelatihan Terpadu SPPA Angkatan (61)	2 s/d 22 September 2021	30	30
7	Pelatihan Terpadu SPPA Angkatan (62)	30 September s/d 21 Oktober 2021	30	32
8	Pelatihan Terpadu SPPA Angkatan (63)	28 Oktober 2021 s/d 17 November 2021	30	29
9	Pelatihan Terpadu SPPA Angkatan (64)	18 November s/d 8 Desember 2021	30	31
Total			270	270

c. Bidang Evaluasi dan Laporan

Capaian kinerja Bidang Evaluasi dan Laporan Diklat Pusat Pengembangan Teknis dan Kepemimpinan dapat dilihat dari indikator kinerja bidangnya berikut ini:

Tabel 3. 13 Capaian Kinerja Bidang Evaluasi dan Laporan Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan

Indikator	Kinerja		Anggaran (Rp)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Diklat Berbasis Teknis dan Kepemimpinan	60	60		
Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2021	1	1	592.914.000	557.429.140
Instrumen Evaluasi Pada Pelatihan Struktural dan Pelatihan Dasar	1	1		

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Berbasis SPPA	Laporan Diklat	9	9	20.625.000	3.743.250
Total		71	71	613.539.000	561.172.390
Persentase Capaian		100%		91,5%	

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kerjanya diperoleh data capaian kinerja Bidang Evaluasi dan Pelaporan adalah sebesar 100% hasil ini diperoleh dari pembagian antara realisasi dengan target, adapun dari sisi penyerapan anggaran Bidang Evaluasi dan Pelaporan pada Tahun 2021 telah berhasil melakukan penyerapan anggaran sebesar 91,5% atau Rp. 561.172.390,- dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 613.539.000,-.

3. Pusat Penilaian Kompetensi



a. Bidang Program

Kinerja yang dihasilkan Bidang Program Pusat Penilaian Kompetensi pada tahun 2021 dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 3. 14 Capaian Kinerja Bidang Program Pusat Penilaian Kompetensi

Indikator	Kinerja		Anggaran (Rp)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Penyusunan Rencana dan Program Pusat Penilaian Kompetensi	3 dokumen	3 dokumen	312.637.000	304.196.618

Evaluasi dan Laporan Pusat Penilaian Kompetensi	29 dokumen	29 dokumen		
Penyusunan Instrumen, Analisa dan Standarisasi Pengembangan SDM	6 dokumen	6 dokumen	905.990.000	902.269.160
Jumlah	45 Dokumen	45 Dokumen	1.218.627.000	1.206.465.778
Persentase Capaian	100%		99%	

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Bidang Program pada tahun 2021 capaian kinerjanya sebesar 100% hal ini dapat dilihat dari realisasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Program, adapun realisasi anggaran Bidang Program mencapai 99% atau sebesar Rp.1.206.465.778,- dari yang dianggarkan dalam DIPA sebesar Rp.1.218.627.000,-

b. Bidang Penyelenggaraan

Tabel 3. 15 Capaian Kinerja Bidang Penyelenggaraan Pusat Penilaian Kompetensi

Indikator	Kinerja		Anggaran (Rp)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Administrasi/Fungsional di Lingkungan Kantor Wilayah	464	441		
Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Administrasi/Fungsional di Unit Eselon I	240	348		
Penilaian Preferensi Kompetensi Melalui Metode Online (<i>Situasional Judgement Test</i>)	12.300	14.183	488.186.000	486.106.581
Penilaian Kompetensi Teknis Melalui Metode Online (<i>English Placement Test</i>)	1.000	2.832		
Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Inpassing (Non-DIPA BPSDM Hukum dan HAM)	1.536	1.477		
Total	15.540	19.281		
Persentase Capaian	124,1%		99,6%	

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang Penyelenggaraan pada tahun 2020 telah melaksanakan uji kompetensi kepada 24.157 Aparatur

Kementerian Hukum dan HAM. Adapun realisasi penyerapan anggaran bidang penyelenggaraan penilaian kompetensi pada tahun 2021 sebesar 99,6% atau Rp. **486.106.581,-** dari yang dianggarkan dalam DIPA BPSDM hukum dan HAM sebesar Rp. **488.186.000,-**

Tabel 3. 16 Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Administrasi/Fungsional di Lingkungan Kantor Wilayah

No.	Unit/Satuan Kerja	Waktu Pelaksanaan	Output
1	Jawa Tengah	21 s/d 24 Juni 2021	93
2	Bali	18 s/d 19 Agustus 2021	59
3	Nusa Tenggara Barat	31 Agustus s/d 2 September 2021	60
4	Riau	14 s/d 16 September 2021	60
5	Sulawesi Tenggara	24 s/d 25 November 2021	56
6	Kalimantan Barat	10 s/d 11 November 2021	59
7	Maluku	22 s/d 24 November 2021	54
JUMLAH			441

Tabel 3. 17 Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Administrasi/Fungsional di Unit Eselon I

No.	Unit/Satuan Kerja	Waktu Pelaksanaan	Output
1	Gelombang I	23 s/d 24 Februari 2021	40
2	Gelombang II	16 s/d 17 Maret 2021	40
3	Gelombang III	30 s/d 31 Maret 2021	40
4	Gelombang IV	6 s/d 8 April 2021	63
5	Gelombang V	6 s/d 8 Juli 2021	77
6	Gelombang VI	28 s/d 30 April 2021	107
JUMLAH			367

Tabel 3. 18 Penilaian Preferensi Kompetensi Melalui Metode *Online* (*Situational Judgement Test*)

No.	Kantor Wilayah	Waktu Pelaksanaan	Output
1	11 Unit Pusat Kementerian Hukum dan HAM	9 s/d 10 Maret 2021	2.265
2	BPSDM Hukum dan HAM (Susulan)	1 s/d 4 April 2021	75
3	Kanwil DKI Jakarta; Kanwil Sumatera Utara; Kanwil Jawa Timur; Kanwil Aceh; Kanwil Banten; Kanwil Sumatera Barat; Kanwil Kepulauan Riau;	16 s/d 17 Februari 2021	2.124

	Kanwil Papua		
4	Kanwil Jawa Barat; Kanwil Sulawesi Tengah; Kanwil Gorontalo; Kanwil Bali; Kanwil NTB; Kanwil NTT; Kanwil Papua Barat	18 s/d 19 Februari 2021	1.459
5	Kanwil Bengkulu; Kanwil Bangka Belitung; Kanwil D.I Yogyakarta; Kanwil Jawa Tengah; Kanwil Kalimantan Barat; Kanwil Maluku Utara; Kanwil Sulawesi Barat; Kanwil Sumatera Selatan	23 s/d 24 Maret 2021	1.795
6	Kanwil Jambi; Kanwil Kalimantan Tengah; Kanwil Kalimantan Timur; Kanwil Kalimantan Selatan; Kanwil Lampung; Kanwil Maluku; Kanwil Riau; Kanwil Sulawesi Selatan; Kanwil Sulawesi Tenggara; Kanwil Sulawesi Utara	25 s/d 26 Maret 2021	2.237
7	Kanwil Jawa Timur; Kanwil Sulawesi Selatan	4 s/d 5 Mei 2021	3.207
8	Kanwil Bali; Kanwil Jawa Barat	6 s/d 7 Mei 2021	2.646
9	Kanwil Aceh; Kanwil Jawa Tengah; Kanwil Sulawesi Tengah	15 s/d 18 Juni 2021	3.232
Jumlah			19.040

**Tabel 3. 19 Penilaian Kompetensi Teknis Melalui Metode Online
(English Placement Test)**

No.	Kantor Wilayah	Waktu Pelaksanaan	Output
1	Gelombang I	3 s/d 6 Juni 2021	2.832
JUMLAH			2.832

**Tabel 3. 20 Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Dan Inpassing
(Non-DIPA BPSDM Hukum dan HAM)**

No.	Kantor Wilayah	Waktu Pelaksanaan	Output
1	Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Kurator Keperdataan	7 s/d 8 Juni 2021	63
2	Uji Kompetensi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Komisi Yudisial RI	16 s/d 17 Juni 2021	7

3	Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Analis Hukum melalui Perpindahan (Inpassing) di BPHN	8 Juli 2021	785
4	Uji Kompetensi bagi Jabatan Pengawas Radiasi di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)	30 Juni s/d 1 Juli 2021	6
5	Uji Kompetensi bagi Calon Peserta Diklat Penjenjangan Auditor Utama di Kementerian Desa	21 s/d 22 Juli 2021	2
6	Uji Kompetensi bagi Calon Peserta Diklat Penjenjangan Auditor Utama di Pemerintah Kabupaten Pandeglang	21 s/d 22 Juli 2021	1
7	Uji Kompetensi bagi Calon Peserta Diklat Penjenjangan Auditor Utama di Pemerintah Kota Mojokerto	21 s/d 22 Juli 2021	1
8	Uji Kompetensi Seleksi Terbuka JPT Pratama BKKBN	24 s/d 26 Agustus 2021	30
9	Uji Kompetensi bagi PNS di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI	8 s/d 9 September 2021	14
10	Uji Kompetensi bagi Jabatan Pengawas Radiasi Ahli Madya dan Ahli Utama di Lingkungan BAPETEN	21 s/d 22 September 2021	5
11	Uji Kompetensi Pemetaan Talenta Pejabat Administrator dan Fungsional Ahli Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	5 s/d 14 Oktober 2021	496
12	Uji Kompetensi bagi Calon Widyaiswara a.n Nur Laila S.Hum, M.Comm di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	22 Oktober 2021	1
13	Uji Kompetensi pada Badiklat Kepulauan Riau di Lingkungan Hukum dan HAM	3 s/d 5 November 2021	17
14	Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang bagi Jabatan Fungsional Auditor Ahli Utama di Lingkungan Kementerian/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5 November 2021	1
15	Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Keimigrasian di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	8 s/d 9 Desember 2021	48
JUMLAH			1.477

c. Bidang Sistem Informasi dan Jaringan

Tabel 3. 21 Capaian Kinerja Bidang Sistem Informasi Pusat Penilaian Kompetensi

Indikator	Kinerja		Anggaran (Rp)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Bimbingan Teknis LMS Rumah Belajar dan Sosialisasi Manajemen Rumah Belajar	1 Kegiatan	1 Kegiatan	27.250.000	26.324.171

Pengelolaan Aplikasi dan Server	1 Kegiatan	1 Kegiatan	63.400.000	59.900.000
Peningkatan Kapasitas Penggunaan Aplikasi Rumah Belajar Kumham	1 Kegiatan	1 Kegiatan	210.692.000	206.271.000
Jumlah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	301.342.000	292.495.171
Persentase Capaian	100%		97,1%	

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang Sistem Informasi dan jaringan pada tahun 2019 melaksanakan 10 kegiatan dari 10 kegiatan yang menjadi target pada Bidang Sistem dan Informasi yang telah ditetapkan sehingga dari data tersebut diperoleh hasil capaian kinerja Bidang Sistem Informasi dan Jaringan sebesar 100%. Adapun realisasi penyerapan anggaran Bidang Sistem Informasi dan Jaringan pada tahun 2021 sebesar **99,6%** atau **Rp. 292.746.550,-** dari yang dianggarkan dalam DIPA BPSDM hukum dan HAM sebesar **Rp.301.342.000,-**. Berikut jenis kegiatan yang diselenggarakan oleh Bidang Sistem Informasi Pusat Penilaian Kompetensi



4. Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM

Adapun capaian kinerja bagian Sekretariat pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 22 Capaian Kinerja Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM

Sasaran Kinerja:					
Terselenggaranya dukungan administrasi dan fasilitatif di lingkungan BPSDM					
No	Bagian	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian
1	Program dan Kerjasama	Administrasi Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan	17	1. LKIP BPSDM 2020 (1) 2. LKIP Sekretariat 2020 (1) 3. LAPTAH BPSDM 2020 (1) 4. Laporan Kinerja BPSDM Semester I dan Semester II (2) 5.	100%

		Penyusunan Aplikasi e-Report	1	Tidak dapat terlaksana karena ada refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19	0
		Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Daerah	1	Tidak dapat terlaksana karena ada refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19	0
		Administrasi Penyusunan Anggaran	1	RKA, Postur Anggaran, Disbursement Plan, Kalender Kerja Supervisi Penyusunan RKA Badiklat	100
		Pembinaan Administrasi Kerjasama dan Kelembagaan	4 kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya Administrasi Kerjasama 2. Tersusunnya <i>BluePrint</i> Kemenkumham Corporate University 3. Terselenggaranya Administrasi Kelembagaan yang menghasilkan: <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman tata laksana organisasi • Proses Bisnis Level 2 • SOP • Permenkumham tentang statuta Poltekip • Permenkumham tentang statuta Poltekim • Permenkumham tentang Dikusim • Kepmen tentang pendidikan dan penilaian kompetensi dimasa pandemi 4. Tersusunnya Rancangan Permen Strategi Pengembangan Kompetensi 	100
2	Kepegawaian	Administrasi Pengelolaan Kepegawaian	1 layanan	Terselenggaranya Layanan kepegawaian BPSDM Hukum dan HAM	100
		Pembinaan Mental, Fisik dan Disiplin Pegawai	37 Kegiatan	Pembinaan Rohani dan Jasmani bagi Pegawai BPSDM Hukum dan HAM	100
		Pengembangan Mandiri Pegawai	1 paket	Terselenggaranya kegiatan pengembangan mandiri bagi pegawai BPSDM Hukum dan HAM	100

		Administrasi Fasilitas Reformasi Birokrasi, Spip, Pembangunan ZI, WBK dan WBBM	1 layanan	Terselenggaranya layanan administrasi fasilitas RB, SPIP, ZI, WBK dan WBM di lingkungan BPSDM	100
		Pencetakan Publikasi Pembangunan ZI	55 paket	Tersedianya spanduk, poster, roller banner dalam rangka publikasi pembangunan ZI	100
		Administrasi Jabatan Fungsional Dan Pemberhentian	1 layanan	Terselenggaranya layanan administrasi jabatan fungsional dan pemberhentian di lingkungan BPSDM	100
		Orasi Ilmiah	11 Kegiatan	Terselenggaranya sidang tertutup orasi ilmiah oleh WI sebagai syarat menjadi WI utama	100
		Penerbitan Jurnal Widyaiswara	200	Jurnal volume 6 nomor 1 (100)buku, jurnal volume 6 nomor 2 (100 buku)	100
		Implementasi Hospitality Bagi Pemberi Layanan	1 Kegiatan	Terselenggaranya kegiatan Implementasi Hospitality Bagi Pemberi Layanan dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan PPNPN di BPSDM	100
		Administrasi Jabatan Fungsional Tertentu	1 layanan	Terselenggaranya administrasi jabatan fungsional tertentu di lingkungan BPSDM	100
3	Keuangan	Pengelolaan Administrasi Keuangan	3 kegiatan	Terselenggaranya kegiatan : 1. Administrasi Pelaksanaan Anggaran, 2. Rekonsiliasi Keuangan 3. Penyusunan Laporan Keuangan di BPSDM Hukum dan HAM	100
		Gaji dan Tunjangan	2 Layanan	Terbayarnya 1. Gaji dan Tunjangan untuk PNS dan PPNPN BPSDM 2. Uang lembur PNS BPSDM	100
4	Pengelolaan BMN, Humas dan Umum	Pengelolaan Administrasi BMN dan Umum	8 Kegiatan	Terselenggaranya kegiatan: 1. Administrasi BMN dan Umum 2. Pengelolaan ULP 3. Administrasi Humas dan Protokol 4. Administrasi Tata Usaha 5. Administrasi Perpustakaan 6. Pemenuhan Perlengkapan Asrama Dan Flat 7. Penanganan Covid-19 8. Kebutuhan ATK dan Obat-Obatan	100

Pengadaan kendaraan bermotor	1 layanan	Tersedianya kendaraan operasional untuk BPSDM dan Politeknik (Tangerang)	100
Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	1 layanan	Tersedianya perangkat pengolah data dan komunikasi untuk BPSDM dan Politeknik (Tangerang)	100
Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	1 layanan	Tersedianya peralatan fasilitas perkantoran untuk BPSDM dan Politeknik (Tangerang)	100
Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	1 layanan	Terselenggaranya pembangunan/renovasi gedung dan bangunan BPSDM dan Politeknik (Tangerang)	100
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	16 kegiatan	Terselenggaranya kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4,6 2. Perawatan Kendaraan Roda 2 3. Layanan Daya Dan Jasa 4. Perawatan Gedung Kantor 5. Penunjang Sarana Dan Prasarana Kegiatan Perkantoran 6. Pengelolaan Administrasi Perkantoran 7. Pengiriman Jasa Pos Dan Giro 8. Keprotokolan 9. Poliklinik Dan Obat-Obatan 10. Fumigasi Ruang Perpustakaan Dan Fogging Gedung 11. Sewa Mesin Fotocopy 12. Perawatan Inventaris Kantor 13. Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Dan Pnpn 14. Sewa Kendaraan Dan Operasionalnya 15. Belanja Komunikasi 16. Penanganan Covid-19 	100

a. Realisasi Anggaran

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM tahun 2021 sebesar Rp. 160.412.511.784,- atau 98,9% dari Rp. 162.054.702.000,- Berikut rincian penyerapan anggaran per Bagian di Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM

Tabel 3. 23 Realisasi Anggaran Bagian Program dan Kerjasama

No	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Penyusunan Evaluasi dan Laporan BPSDM	95.200.000	76.950.700	80,8
2	Penyusunan Program dan Rencana Kerja Anggaran	123.194.000	119.612.524	97,1
3	Pembinaan Administrasi Kerjasama dan Kelembagaan	366.760.000	354.063.312	96,5
4	JUMLAH	585.154.000	550.626.536	94,1

Tabel 3. 24 Realisasi Bagian Umum Kepegawaian

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Administrtasi Pengelolaan Kepegawaian	92.175.000	89.219.248	96,79
2	Pembinaan Mental, Fisik dan Disiplin Pegawai	103.750.000	82.815.500	79,82
3	Pengembangan Mandiri Pegawai	101.260.000	100.510.000	99,26
4	Administrasi Fasilitas Reformasi Birokrasi, SPIP, Pembangunan ZI, WBK dan WBBM	256.570.000	244.643.175	95,35
5	Administrasi Jabatan Fungsional Dan Pemberhentian	73.353.000	67.619.056	92,18
6	Orasi Ilmiah	16.770.000	16.696.000	99,56
7	Penerbitan Jurnal Widyaiswara	37.100.000	36.875.000	99,39
8	Pengembangan Pegawai Silent Mindful Listening	173.575.000	173.425.750	99,91
9	Corporate Culture Specialist	12.500.000	12.499.165	99,99
	Jumlah	867.053.000	824.302.894	95,07

Tabel 3. 25 Realisasi Anggaran Bagian Keuangan

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	
1	Administrasi Pelaksanaan Anggaran	140.600.000	135.924.555	96,7%
2	Rekonsiliasi BPSDM Hukum dan HAM	77.772.000	76.610.333	98,51%
3	Penyusunan Laporan Keuangan	24.120.000	12.884.997	53,42%
4	Gaji dan Tunjangan	19.394.637.000	19.383.960.919	99,94%

5	Belanja Uang Lembur	1.055.624.000	1.055.621.000	99%
Jumlah		20.692.753.000	20.665.001.804	99,87%

Tabel 3. 26 Realisasi Anggaran Bagian Pengelolaan BMN, Umum dan Humas

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Pengelolaan Administrasi BMN dan Umum	1.524.824.000	1.421.199.582	93,2
2	Penyediaan Informasi Publik	419.863.000	413.106.715	98,39
3	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	2.029.729.000	1.972.493.010	97,18
4	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	9.456.313.000	9.182.005.810	97,1
5	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	93.895.683.000	93.648.090.363	99,74
6	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	32.583.330.000	31.735.685.070	97,4
Jumlah		139.909.742.000	138.372.580.550	98,9



b. Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian

Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

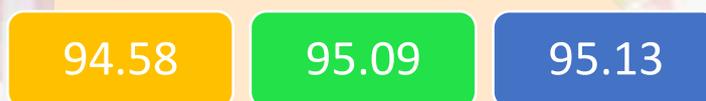


Nilai Capaian IKPA 2019 - 2021

Pada tahun anggaran 2021 nilai IKPA BPSDM Hukum dan HAM mengalami penurunan dari nilai IKPA tahun 2020 sebesar 93.02. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan kinerja pelaksanaan anggaran di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM. Salah satu penyebab penurunan ini karena adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan adanya perubahan anggaran, perencanaan anggaran dan kegiatan dalam tahun berjalan.

c. Penilaian Sistem Monitoring Evaluasi Terpadu (SMART)

SMART merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang dibangun oleh Kementerian Keuangan guna memudahkan satuan kerja dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Berdasarkan Rencana Strategis BPSDM Hukum dan HAM 2020-2024, telah ditetapkan target nilai SMART untuk tahun 2021 sebesar 95. Berikut capaian nilai SMART BPSDM Hukum dan HAM tahun 2019-2021



Nilai Capaian Monev SMART 2019 - 2021

Dari grafik di atas bisa dilihat nilai SMART pada BPSDM Hukum dan HAM mengalami kenaikan dari 95.09 pada 2020 menjadi 95.13 pada 2021, ini artinya bahwa terjadi peningkatan kualitas pelaksanaan program belanja di BPSDM pada 2020. Disamping itu nilai SMART yang diperoleh telah melebihi target yang telah ditetapkan

d. Penilaian SAKIP BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2021

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan

kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap institusi pemerintah diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berikut perbandingan hasil evaluasi penerapan SAKIP BPSDM Hukum dan HAM dari tahun 2019-2021:

Tabel 3. 27 Nilai SAKIP BPSDM Hukum dan HAM 2019-2021

No	Komponen	Bobot / Nilai	Nilai Hasil Evaluasi		
			2019	2020	2021
1	Perencanaan Kinerja	30%	27,15	27,37	26,59
2	Pengukuran Kinerja	25%	19,69	19,48	19,17
3	Pelaporan Kinerja	15%	11,62	10,72	10,72
4	Evaluasi Internal	10%	6,69	7,00	7,00
5	Pencapaian Kinerja	20%	14,69	13,54	14,51
Total		100%	79,84	78,11	77,99

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) BPSDM Hukum dan HAM Perubahan 2020-2024, target penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja BPSDM Hukum dan HAM adalah memperoleh predikat BB (Sangat Baik). Dari tabel diatas dapat diketahui untuk tahun 2021 BPSDM Hukum dan HAM memperoleh nilai SAKIP sebesar 77,99 dengan predikat BB (Sangat Baik). Sehingga bisa disimpulkan, nilai SAKIP yang diperoleh BPSDM Hukum dan HAM sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra

e. Penilaian Reformasi Birokrasi BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2021

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2020 telah melaksanakan program reformasi birokrasi yang mencakup 9 (sembilan) program terkait 8 (delapan) area perubahan, yakni manajemen perubahan, penataan peraturan perundangundangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan ketatalaksanaan, penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sesuai dengan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020.

Nilai Reformasi Birokrasi BPSDM Hukum dan HAM pada dasarnya merupakan nilai dari Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM, dan untuk Tahun 2021 masih belum dilakukan penilaian.

f. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPSDM Hukum dan HAM

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berikut capaian pelaksanaan SPIP pada BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2021:

1. Persiapan

a. Pemahaman (knowing)

Internalisasi tata nilai pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui kegiatan apel pagi dan sore yang diikuti seluruh pegawai, rapat konsolidasi pimpinan rutin setiap hari senin, serta kegiatan pembinaan kepegawaian serta pada tahun 2021 telah dibentuk Tim pembentukan Satgas SPIP berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SDM-01.PW.02.03 Tahun 2021;

b. Pemetaan (Mapping)

BPSDM Hukum dan HAM melaksanakan kegiatan pengumpulan data survey maturitas SPIP serta menyelenggarakan kegiatan evaluasi Peta Risiko tahun 2021 rencana aksi Peta Risiko tahun 2021.

2. Pelaksanaan

a. Tingkat Entitas

- Pembangunan Infrastruktur (Norming)

Penyusunan kebijakan/prosedur/pedoman:

1) Pembentukan Satgas Penyelenggaraan SPIP dengan Penerbitan SK Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SDM-01.PW.02.03 Tahun 2021;

2) Tim Satgas Pengawas Internal dilingkungan BPSDM Hukum dan HAM, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: SDM-01.PW.02.03 Tahun 2021;

- Internalisasi / Implementasi (Forming)

BPSDM Hukum dan HAM melakukan kegiatan internalisasi/implementasi tingkat entitas pada tahun 2021 dalam bentuk arahan pimpinan kepada pegawai pada saat upacara, apel pagi dan apel sore, serta disetiap kegiatan dan Rapat Konsolidasi pimpinan rutin setiap hari senin.

b. Tingkat Kegiatan

- Menyusun Manajemen Resiko BPSDM Hukum dan HAM Tiruwan I-IV tahun 2021;

- Pembangunan Infrastruktur BPSDM Hukum dan HAM melakukan kegiatan pembangunan infrastruktur tingkat kegiatan pada tahun 2020 antara lain:

- 1) Kegiatan pengarahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
- 2) Rapat persiapan Evaluasi Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
- 3) Rapat koordinasi Tim Pengawasan Internal secara virtual;
- 4) Rapat koordinasi Tim Reformasi Birokrasi secara virtual
- 5) Rapat koordinasi Tim Satgas Penyelenggaraan SPIP secara virtual;
- 6) Kegiatan Penguatan Pemahaman Benturan Kepentingan di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM;
- 7) Kegiatan Penguatan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM;
- 8) Rapat Koordinasi Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM;
- 9) Kegiatan Pelaksanaan Desk Evaluation Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM oleh Tim Penilai Nasional;
- 10) Kegiatan Evaluasi Peta Risiko Tahun 2021 dan Penyusunan Rencana Aksi Peta Risiko Tahun 2022

3. Pengembangan Berkelanjutan (Performing)

- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM telah menyusun Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan I, II, III, IV;

- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM telah menyusun Laporan Capaian Kinerja Triwulan I, Semester I dan Triwulan III Tahun 2021, Laporan Kinerja Tahun 2021 dan Laporan Tahunan Tahun 2022.

g. Pembangunan Zona Integritas

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, maka pada awal tahun

2020 BPSDM Hukum dan HAM sebagai Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM mencanangkan Pembangunan ZI (zona integritas) menuju WBK/WBBM di BPSDM Hukum dan HAM. Kegiatan ini menunjukkan komitmen dan kesungguhan para pejabat dan pegawai BPSDM Hukum dan HAM untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja dan pelayanan. Dalam rangka mencapai predikat WBK/WBBM, berbagai upaya telah dilakukan oleh seluruh jajaran di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM. Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim Penilai ZI ditetapkan Politeknik Imigrasi dan Balai Diklat Hukum dan HAM sebagai satuan kerja di bawah BPSDM Hukum dan HAM memperoleh predikat WBK/WBBM.



5. Politeknik Ilmu Pemasarakatan (POLTEKIP)

a. Akademik

Politeknik Ilmu Pemasarakatan mempunyai 3 program pendidikan yang terdiri dari:

Tabel 3. 28 Komposisi Taruna POLTEKIP

NO	ANGKATAN/ TINGKAT	PROGRAM DIPLOMA			TOTAL
		Bimbingan Kemasyarakatan	Manajemen Pemasarakatan	Teknik Pemasarakatan	
1	Tingkat I (angkatan 55)	108	103	135	346
2	Tingkat II (angkatan 54)	97	95	117	309
3	Tingkat III (angkatan 53)	92	101	109	302

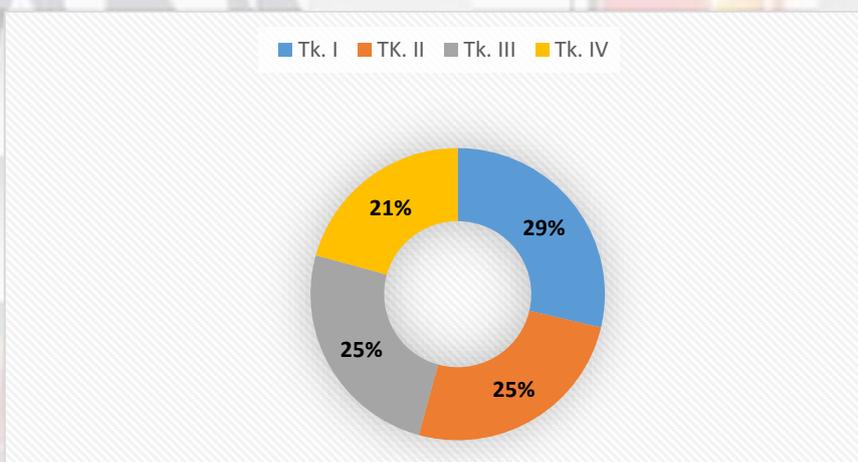
4	Tingkat IV (angkatan 52)	84	85	81	250
TOTAL		381 Taruna	384 Taruna	442 Taruna	1.207 Taruna

Tahun 2021 terdapat 4 (ermpat) tingkatan yang melangsungkan pendidikan sebagai taruna POLTEKIP, dimana dari tabel diatas dapat dilihat terdapat total 1.207 Taruna pada poltekip. Dari total tersebut, sebanyak 28,67% merupakan taruna Tingkat I, 25,6% dari total tersebut merupakan taruna Tingkat II, 25,02% dari total tersebut merupakan taruna Tingkat III dan 20,7% dari total tersebut merupakan taruna Tingkat IV.



Berikut jumlah Taruna Politeknik Ilmu Pemasaryakatan pada Tahun 2021:

Grafik 3. 5 Jumlah Taruna POLTEKIP 2021



Pada masa pandemi covid-19 yang terjadi pada Tahun 2021. Poltekip menerapkan kegiatan Pengajaran, Pelatihan dan Pengasuhan (Jarlatsuh) taruna dengan menggunakan metode jarak jauh. Kegiatan jarlatsuh sudah dilaksanakan sejak 3 agustus 2020 dengan persentase 70% kegiatan dilaksanakan dalam kelas virtual dengan berbagai jenis aplikasi (Zoom dan edlink) dan 30% praktek luar kelas, tugas dan ujian dilakukan memanfaatkan aplikasi online seperti *classroom*, *quizz*, *edmono*, dll sesuai kebutuhan dosen.



Sebagai metode pembelajaran yang baru, metode ini memiliki kelebihan sebagai berikut: waktu lebih fleksibel, dapat dilakukan dari berbagai tempat, pilihan aplikasi pembantu pelaksanaan perkuliahan lebih banyak, tingkat kehadiran dosen lebih tinggi dan taruna menjadi lebih aktif dan mandiri. Namun, masih terdapat kekurangan dan kendala dalam pelaksanaannya antara lain: kurangnya interaksi langsung antara dosen dan taruna sehingga sebagian taruna tidak bisa terpantau dengan baik ketika perkuliahan, kecenderungan mengabaikan aspek akademik (dosen lebih banyak memberikan tugas dari pada tatap muka online) saat proses pembelajaran, kegiatan yang bersifat praktek terbatas pelaksanaannya, jaringan internet yang kurang mendukung, plagiarisme saat mengerjakan tugas dan ujian tertulis, serta kurangnya interaksi dalam kelas.

b. Ketarunaan

Taruna Politeknik Ilmu Pemasarakatan banyak mengikuti perlombaan maupun kejuaraan di berbagai bidang. Berikut ini adalah prestasi yang berhasil dicapai oleh para taruna Poltekip.

Tabel 3. 29 Prestasi Taruna/Taruni Politeknik Ilmu Pemasaryakatan Pada Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan (OPTK) 2021

NO	NAMA	PRESTASI	PENYELENGGARA	TANGGAL LOMBA	TINGKAT
1	Ricki Utomo Simargolang/ Tingkat IV/ Prodi MP B	Juara III Lomba Tenis Meja Kategori U-23	Liga Tenis Meja Piala Waspada Asahan Sumatera Utara	27 Juni 2021	KABUPATEN
2	Aditya Akbar/ Tingkat III/ Prodi BK B	Juara III Lomba Short Video International Nelson Mandela Day	United Nation Office On Drugs And Crime	21 Juli 2021	NASIONAL
3	Rama Fatahillah/ Tingkat III/ Prodi BK B	Penulis Buku "Manajemen Talenta ASN Kemenkumham"	BPSDM Hukum dan HAM	1 Februari 2021	NASIONAL
4	Rama Fatahillah/ Tingkat III/ Prodi BK B	Penulis Buku "Catur Tajuk Ruas Narasi"	BPSDM Hukum dan HAM	1 Februari 2021	NASIONAL
5	Rama Fatahillah/ Tingkat III/ Prodi BK B	Penulis Buku "Kapita Selektia Pemasaryakatan II"	BPSDM Hukum dan HAM	1 Februari 2021	NASIONAL
6	Tandi Islami/ Tingkat III/ Prodi BK B	Diskusi Sinergi Pemuda Membangun Jambi	Badan Musyawarah Keluarga Jambi Nasional	25-Apr-21	PROVINSI
7	Tandi Islami/ Tingkat III/ Prodi BK B	Bakarumun Duta Polteksos	Duta POLTEKSOS	25 Maret 2021	NASIONAL
8	Aditya Pratama Putra/ Tingkat III/ Prodi BK A	4 th Runner Up Putera Pendidikan Banten 2021	Ikatan Prestasi Pemuda Indonesia	19 Juni 2021	PROVINSI
9	Agung Risaldo/ Tingkat III/ Prodi BK B	Penulis Jurnal Implementasi Strategi Pemasaran Dalam Upaya Peningkatan Nilai Jurnal Hasil Produksi Warga Binaan Pemasaryakatan	Universitas Muhammadiyah Maros	1 Juni 2021	NASIONAL
10	Mardilana Gautama/ Tingkat III/ Prodi TP A	Aplikasi Siladang (Sistem Informasi Layanan Lapas Sumedang) dan Sipacetrolling (Sistem Pelaporan Cepat Kontrol Keliling)	LAPAS Sumedang	28 Juni 2021	NASIONAL

11	Annisa Dewi Pratiwi/ Tingkat III/ Prodi	Juara 1 Lomba Short Video International Nelson Mandela Day	United Nation Office On Drugs And Crime	21 Juli 2021	NASIONAL
12	Ayu Made Diah Pramesti/ Tingkat III/ Prodi BK B	Inovasi E-Nomor (Pengambilan Nomor Surat Berbasis Digital) Pada BAPAS Kelas II Karangasem	BAPAS Kelas II Karangasem	16 Juni 2021	NASIONAL
13	I Made Dwi Sudarsana/ Tingkat III/ Prodi BK A	Inovasi E-Nomor (Pengambilan Nomor Surat Berbasis Digital) Pada BAPAS Kelas II Karangasem	BAPAS Kelas II Karangasem	16 Juni 2021	NASIONAL
14	Ni Putu Pratigrahitia Pratiwi/ Tingkat III/ BK A	Inovasi E-Nomor (Pengambilan Nomor Surat Berbasis Digital) Pada BAPAS Kelas II Karangasem	BAPAS Kelas II Karangasem	16 Juni 2021	NASIONAL
15	Akbar Faris Rama Hunafa/ Tingkat II/ Prodi MP B	Penulis Buku Kapita Selektia Pemasarakatan Jilid II	Kemenkumham Muda	27-Apr-21	NASIONAL
16	Akbar Faris Rama Hunafa/ Tingkat II/ Prodi MP B	Juara II Short Video International Nelson Mandela Day	United Nation Office On Drugs And Crime	21 Juli 2021	NASIONAL
17	Pani Vyolicha/ Tingkat II/ Prodi BK A	Juara III Short Video International Nelson Mandela Day	United Nation Office On Drugs And Crime	21 Juli 2021	NASIONAL
18	Ratu Arum Ningtyas/ Tingkat I/ Prodi BK A	Juara II Short Video International Nelson Mandela Day	United Nation Office On Drugs And Crime	21 Juli 2021	NASIONAL
19	Gilang Perdana Asmiyanto Putra/ Tingkat I/ Prodi BK A	Borobudur Marathon Virtual Challenge 2021 21K	Borobudur Marathon	28 Maret2021	NASIONAL
20	Gilang Perdana Asmiyanto Putra/ Tingkat I/ Prodi BK A	P&P Virtual Run 2021 21K	P&P Run	1-31 Januari 2021	NASIONAL
21	Asa Fadia Brillian Rahma Amalia/ Tingkat I/ Prodi BK B	Juara Favorit Nasyid Akhwat Fokri Games VII	PTDI STTD	30 Mei 2021	NASIONAL
22	Wandro Josua Haratiua Siborong/ Tingkat I/ Prodi BK B	Juara 3 Kejuaraan Daerah Angkat Berat Kelas 74 KG	Pabersi Sumatera Utara	25-28 Juni 2021	PROVINSI

	Tingkat I/ Prodi TP C				
23	Tri Apriliana Dewi/ Tingkat I/ Prodi MP B	Juara Favorit Nasyid Akhwat Fokri Games VII	PTDI STTD	30 Mei 2021	NASIONAL
24	Jesica Triyana Maharani/ Tingkat I/ Prodi BKA	Juara Favorit Nasyid Akhwat Fokri Games VII	PTDI STTD	30 Mei 2021	NASIONAL
25	Pani Vyolicha/Tingkat II/ Prodi BK A	Juara III Lomba Short Video International Nelson Mandela Day	United Nation Office On Drugs And Crime	21 Juli 2021	Nasional
26	Ratu Arum Ningtyas/ Tingkat I/ Prodi BK A	Juara II Lomba Short Video International Nelson Mandela Day	United Nation Office On Drugs And Crime	21 Juli 2021	Nasional
27	Aditya Akbar/ Tingkat III/ Prodi MP A	Juara III Lomba Short Video International Nelson Mandela Day	United Nation Office On Drugs And Crime	21 Juli 2021	Nasional
28	Akbar Faris Rama Hunafa/ Tingkat II/ Prodi MP B	Juara II Lomba Short Video International Nelson Mandela Day	United Nation Office On Drugs And Crime	21 Juli 2021	Nasional
29	Lugina/ Tingkat I/ Prodi BK B	Juara III Lomba Monolog	Universitas Aisyiyah Yogykarta	10 Agustus 2021	Nasional
30	Pedro Richardo William Senandi/ Tingkat I/ Prodi BK B	Piagam Penghargaan Upaya Mencegah Narapidana Melepaskan Diri	Kanwil Papua Barat	17 Agustus 2021	Nasional
31	Rama Fatahillah Yulianto/ Tingkat III/ Prodi BK B	Juara I Menulis Cerpen "Memaknai Kemerdekaan Di Tengah Pandemi"	Senat POLTEKIP	17 Agustus 2021	POLTEKIP
32	Mochammad Fachri Mudzaffar/ Tingkat II/ Prodi BK A	Kategori Favorit Duta Baca Kabupaten Indramayu 2021	DISARPUS Indramayu	19 Agustus 2021	Kabupaten
33	Rama Fatahillah Yulianto/ Tingkat III/ Prodi BK B	Penulis Buku Kemenkumham Muda : Kini dan Nanti	Kemenkumham Muda	Oktober 2021	Nasional
34	Sasgin Azahra Damai / Tingkat I/ Prodi BK A	Juara I Lomba News Anchor dalam Communication Creativity Week 2021	President University	30 Oktober 2021	Nasional

35	Christian Diza Saputra / Tingkat II/ Prodi BK A	Juara III Taekwondo dalam Indonesia <i>Youth Virtual Championship</i> 2021	Taekwondo Jaguar Club Indonesia	07-Nov-21	Nasional
36	Rizki Ariansyah/ Tingkat II/ Prodi BK A	Juara III Taekwondo dalam Indonesia <i>Youth Virtual Championship</i> 2021	Taekwondo Jaguar Club Indonesia	07-Nov-21	Nasional
37	Rama FatahillahYulianto/ Tingkat III/ Prodi BK B	Juara Poster Favorit	Universitas Pendidikan Ganesha	09-Nov-21	Nasional
38	Almuqtadir Pasya/ Tingkat III/ Prodi MP A	JUARA 3 ENGLISH SPEECH CONTEST DALAM RANGKA MEMPERINGATI HUT-RI	Senat POLTEKIP	15 Agustus 2021	POLTEKIP
39	Niken Meileni/ Tingkat I/ Prodi MP A	JUARA II LOMBA MENULIS CERPEN	Senat POLTEKIP	17 Agustus 2021	POLTEKIP
40	Louwis Firdaus Vascalis Sirait/ Tingkat I/ Prodi MP B	Masuk dalam 200 karya puisi terbaik	FUN BAHASA	19-Sep-21	Nasional
41	M. Enrico Giralda Harsari/ Tingkat I/ Prodi MP B	Juara II Lomba Bulutangkis Pangdiv 2 Kostrad Cup 2021 dalam rangka HUT TNI ke-76	Pangdiv 2 Kostrad Malang	01-Nov-21	Karesidenan Malang Raya
42	Frischa Mentari Safrin/ Tingkat II/ Prodi MP A	Juara Poster Favorit	Universitas Pendidikan Ganesha	09-Nov-21	Nasional
43	Aditya Akbar/ Tingkat III/ Prodi MP A	Juara III Lomba Short Video International Nelson Mandela Day	United Nation Office On Drugs And Crime	21 Juli 2021	Nasional
44	Akbar Faris Rama Hunafa/ Tingkat II/ Prodi MP B	Juara II Lomba Short Video International Nelson Mandela Day	United Nation Office On Drugs And Crime	21 Juli 2021	Nasional
45	Almuqtadir Pasya/ Tingkat III/ Prodi MP A	Juara 3 English Speech Contest Dalam Rangka Memperingati Hut-ri	Senat POLTEKIP	15 Agustus 2021	POLTEKIP

46	Niken Meileni/ Tingkat I/ Prodi MP A	Juara II Lomba Menulis Cerpem	Senat POLTEKIP	17 Agustus 2021	POLTEKIP
47	Louwis Firdaus Vascalis Sirait/ Tingkat I/ Prodi MP B	Masuk dalam 200 karya puisi terbaik	FUN BAHASA	19-Sep-21	Nasional
48	M. Enrico Giralda Harsari/ Tingkat I/ Prodi MP B	Juara II Lomba Bulutangkis Pangdiv 2 Kostrad Cup 2021 dalam rangka HUT TNI ke-76	Pangdiv 2 Kostrad Malang	01-Nov-21	Regional
49	Frischa Mentari Safrin/ Tingkat II/ Prodi MP A	Juara Poster Favorit dalam LKTI yang diselenggarakan oleh HMJ Fisika dan Pengajaran IPA Universitas Pendidikan Ganesha	Universitas Pendidikan Ganesha	09-Nov-21	Nasional
50	Aditya Akbar/ Tingkat III/ Prodi MP A	Juara III Lomba Short Video International Nelson Mandela Day	United Nation Office On Drugs and Crime	21 Juli 2021	Nasional
51	Karimah Aini/ Tingkat III/ Prodi MP A	Juara Poster Favorit dalam LKTI yang diselenggarakan oleh HMJ Fisika dan Pengajaran IPA Universitas Pendidikan Ganesha	Universitas Pendidikan Ganesha	09-Nov-21	Nasional
52	Faris Abiyyu Ramadh an/ Tingkat I/ Prodi MP A	Juara III Kejuaraan karate Bupati Cup Jember	Pemerintah Kabupaten Jember	14-Nov-21	Regional
53	Annisa Dewi Pratiwi/ Tingkat III/ Prodi TP A	Juara I Lomba Short Videointernational Nelson Mandela Day	United Nation Office On Drugs and Crime	21 Juli 2021	Nasional
54	Jenitha Leoni Puspitasari/Tingkat I/ Prodi TP B	Juara I Poomsae Taekwondo	KONI Pusat	18-Sep-21	Nasional
55	Rizki Kurniawan/ Tingkat III/ Prodi TP B	200 Finalis Puisi Terbaik Nasional	Fun Bahasa	19-Sep-21	Nasional
56	Muhammad Ridwan/ Tingkat III/ Prodi TP B	Juara II Lomba Trofeo Cup	Sabhara Polda Lampung	13 Oktober 2021	Provinsi

57	Andi Muhammad Alifsa Mahendra, M Umpu Dilaga, Muh Akhsan, Aldino Ponco Gunawan	Juara II Virtual e-Sport Championship	Kementerian Hukum dan HAM	17 Oktober 2021	Nasional
58	Muhammad Farhan Abdillah/ Tingkat III/ Prodi TP B	Juara II Taekwondo dalam Indonesia Youth Virtual Championship 2021	Taekwondo Jaguar Club Indonesia	07-Nov-21	Nasional
59	Gelora Kurniawan Tarugan/ Tingkat I/ Prodi TP A	Juara I Taekwondo dalam Indonesia Youth Virtual Championship 2021	Taekwondo Jaguar Club Indonesia	07-Nov-21	Nasional
60	Jenitha Leoni Puspitasari/ Tingkat I/ Prodi TP B	Juara III Taekwondo dalam Indonesia Youth Virtual Championship 2021	Taekwondo Jaguar Club Indonesia	07-Nov-21	Nasional

c. Layanan Perkantoran

Politeknik Ilmu Pemasarakatan dalam menjalankan kegiatannya didukung dengan layanan perkantoran yang menunjang kegiatan sehari-hari, berikut rincian anggaran Politeknik Ilmu Pemasarakatan (Poltekip):

Tabel 3. 30 Anggaran Politeknik Pemasarakatan

No	Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	Pendidikan Taruna Tingkat I	4436719000.00	4436514000	99
2	Pendidikan Taruna Tingkat II	4,316,642,000	4,315,793,500	99
3	Pendidikan Taruna Tingkat III	4,290,744,000	4,290,592,000	99
4	Pendidikan Taruna Tingkat IV	4,387,092,000	4,386,963,000	99
5	Masa basis calon taruna politeknik ilmu pemasarakatan	2,587,238,000	2,587,122,000	99
6	Layanan SDM	829,322,000	826,757,245	99
7	Layanan sarana internal	1,555,501,000	1,554,453,252	99
8	Layanan umum	694,390,000	686,553,636	98
9	Gaji dan Tunjangan	4,979,444,000	4,949,147,883	99
10	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2,675,210,000	2,668,068,900	99

11	Layanan monitoring dan evaluasi internal	2,382,000	2,382,000	1
Jumlah		30,754,684,000	30,704,347,416	99

Dari sisi anggaran capaian Politeknik Ilmu Pemasaryakatan (Poltekip) pada tahun 2021 menyerap anggaran sebanyak Rp. **30.704.347.416,-** (99,83%) dari pagu anggaran yang telah ditargetkan sebesar Rp. **30.754.684.000,-**.

6. Politeknik Imigrasi (POLTEKIM)

a. Akademik

Politeknik Imigrasi mempunyai 3 program pendidikan yang terdiri dari:

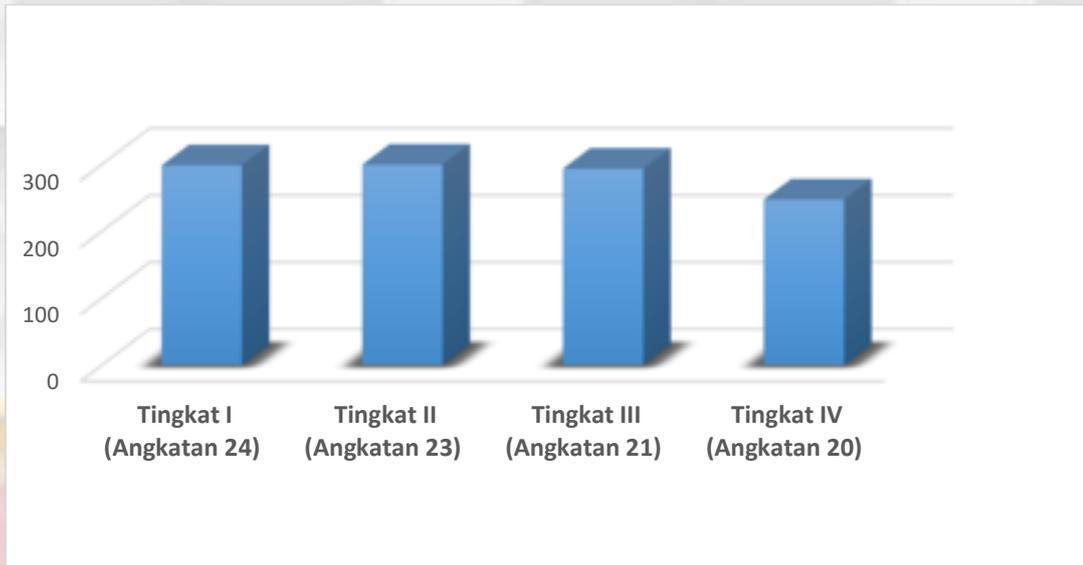
Tabel 3. 31 Komposisi Taruna POLTEKIM

NO	TINGKAT (ANGKATAN)	PROGRAM DIPLOMA			TOTAL ANGKATAN
		HUKUM KEIMIGRASIAN	ADMIN KEIMIGRASIAN	MANAJEMEN TEKNOLOGI KEIMIGRASIAN	
1	Tingkat I (Angkatan 24)	120	112	67	299
2	Tingkat II (Angkatan 23)	167	89	44	300
3	Tingkat III (Angkatan 21)	153	106	35	294
4	Tingkat IV (Angkatan 20)	106	111	31	248
TOTAL		546 Taruna	418 Taruna	177 Taruna	1.141 Taruna

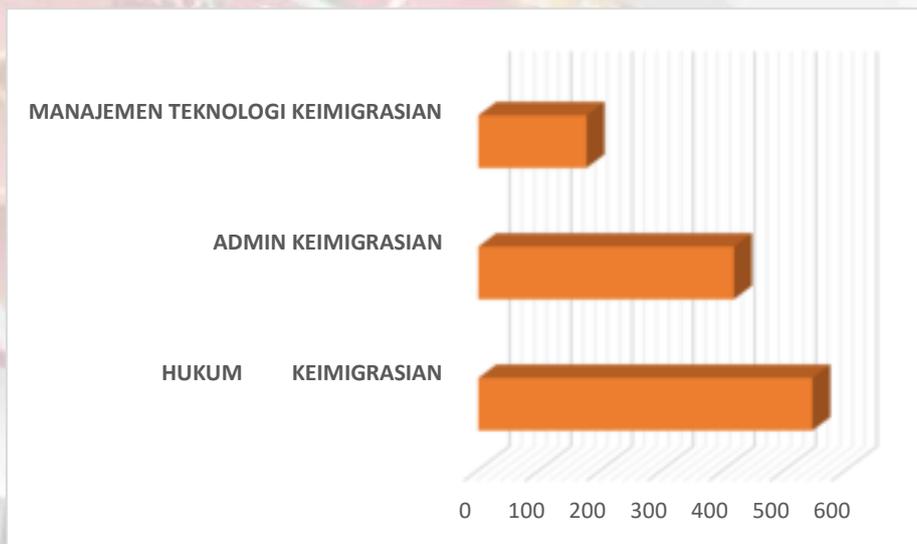
Pada Politeknik Ilmu Keimigrasian (POLTEKIM), untuk tahun 2021 terdapat 1141 (seribu seratus empat puluh satu) taruna yang menjalani pendidikan. Dimana 26,2% dari total tersebut merupakan taruna Tingkat I, 26,3% merupakan taruna tingkat II dan 25,8% merupakan taruna tingkat III. Dari total taruna tersebut dapat dilihat dari program diploma yang dijalani yang terbagi menjadi tiga program diploma yaitu Hukum Keimigrasian, Administrasi Keimigrasian dan Manajemen Teknologi Keimigrasian. Untuk Program Diploma Hukum Keimigrasian terdapat 47,85% taruna dari total tersebut, untuk Program Diploma Administrasi Keimigrasian terdapat 36,6% taruna dari total taruna tersebut dan untuk Program Diploma Manajemen Teknologi Keimigrasian terdapat 15,5% taruna dari total taruna yang ada di POLTEKIM. Adapun

jumlah dosen yang mengajar di Politeknik Imigrasi sebanyak 38 dosen yang terdiri dari :

Grafik 3. 6 Jumlah Taruna Poltekim Berdasarkan Tingkat (Angkatan)



Grafik 3. 7 Jumlah Taruna Poltekim Berdasarkan Program



Pada grafik terlihat perbandingan capaian lulusan Politeknik Imigrasi (Poltekim) pada tahun 2019, tahun 2020 dan Tahun 2021. Pada Tahun 2021 terjadi kenaikan yang sangat signifikan pada lulusan Politeknik Imigrasi yaitu sebanyak 234 lulusan dimana pada Tahun 2019 lulusan Poltekim berjumlah 64, mengalami kenaikan sebesar 265,6% atau 170 orang lebih banyak dari jumlah lulusan tahun 2019 yang sebesar 64 orang lulusan. Berikut jumlah taruna Politeknik Imigrasi pada tahun 2019

Sama halnya dengan Poltekip dalam hal proses pengajaran di masa pandemi, Poltekim juga menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh memanfaatkan teknologi informasi seperti aplikasi *Whatsapp*, *Google Meet*, *Zoom* dan aplikasi daring lainnya. Selain memanfaatkan



aplikasi-aplikasi tersebut, Poltekim juga menerapkan pola yang berbeda yaitu jadwal pelatihan dari hari Senin-Jumat menjadi Senin-Sabtu, dimana pada hari Sabtu taruna tetap masuk untuk mengikuti materi tambahan serta setiap hari jumat taruna menerima siraman rohani dari masing pemuka agama yang dianut.

Namun keadaan seperti saat ini menimbulkan persepsi diantara taruna bahwa bagaimanapun hasil pembelajaran taruna pasti akan diluluskan sehingga taruna tidak serius dalam mengikuti setiap kegiatan yang dijadwalkan oleh dosen dan pembina. Serta pembina tidak bisa maksimal mengawasi dan memantau taruna dalam setiap kegiatan. Kendala yang sering dialami dalam metode ini antara lain jaringan internet sebagai pendukung utama metode ini. Disamping itu taruna harus mengeluarkan biaya transport dari tempat tinggal taruna ke UPT terdekat. Ditambah lagi apabila UPT harus dilockdown, maka pelaksanaan pembelajaran tidak berjalan dengan maksimal.

b. Ketarunaan

Taruna Politeknik Imigrasi banyak mengikuti perlombaan maupun kejuaraan di berbagai bidang berikut ini adalah prestasi yang berhasil di capai oleh para taruna Poltekim:

Tabel 3. 32 Prestasi Taruna Poltekim Pada Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan 2021

NO	NAMA	PRESTASI	PENYELENGGARA	TANGGAL LOMBA	TINGKAT
1	Reynald Christian	-JUARA 2 ASEAN-IPR PEACE VIDEO MESSAGE COMPETITION	ASEAN-IPR	10 Februari 2021	ASEAN

2	Yoga Fauzan Renardi	-JUARA 2 ASEAN-IPR PEACE VIDEO MESSAGE COMPETITION	ASEAN INSTITUTE FOR PEACE AND RECONCILIATION	11 Februari 2021	ASEAN
3	Muhammad Azzam Alfarizi	Juara 2 Lomba Event ASEAN Innovative Science Environmental and Entrepreneur Fair (AISEEF) Tahun 2021	INDONESIAN YOUNG SCIENTIST ASSOCIATION	23 Februari 2021	Internasional
4	Ridha Nikmatus Syahada	Juara 2 Lomba Event ASEAN Innovative Science Environmental and Entrepreneur Fair (AISEEF) Tahun 2021	INDONESIAN YOUNG SCIENTIST ASSOCIATION	24 Februari 2021	Internasional
5	Rafsanjani Is Marus	Juara 2 Lomba Event ASEAN Innovative Science Environmental and Entrepreneur Fair (AISEEF) Tahun 2021	INDONESIAN YOUNG SCIENTIST ASSOCIATION	24 Februari 2021	Internasional
6	Billy Cahyadi	Juara 2 Lomba Event ASEAN Innovative Science Environmental and Entrepreneur Fair (AISEEF) Tahun 2021	INDONESIAN YOUNG SCIENTIST ASSOCIATION	24 Februari 2021	Internasional
7	Rizky Dikara Priatama	Juara 2 Lomba Event ASEAN Innovative Science Environmental and Entrepreneur Fair (AISEEF) Tahun 2021	INDONESIAN YOUNG SCIENTIST ASSOCIATION	25 Februari 2021	Internasional

8	I Ketut Adi Wardana	JUARA 1 LOMBA KARYA TULIS ILMIAH YOUTH NATIONAL SCIENCE FAIR (YNSF) 2021	IYSA (Indonesian Young Scientist Association) dengan Science Hunter Indonesia, Malaysia	5 Maret - 8 April 2021	Nasional
9	Wisnu Muhammad Fauzi	JUARA 1 LOMBA KARYA TULIS ILMIAH YOUTH NATIONAL SCIENCE FAIR (YNSF) 2021	IYSA (Indonesian Young Scientist Association) dengan Science Hunter Indonesia, Malaysia	6 Maret - 8 April 2021	Nasional
10	Muhammad Azzam Alfarizi	Juara 1 Gold Medal Lomba Youth Nasional Science Fair (YNSF)	INDONESIAN YOUNG SCIENTIST ASSOCIATION	16-Apr-21	Nasional
11	Ridha Nikmatu Syahada	Juara 1 Gold Medal Lomba Youth Nasional Science Fair (YNSF)	INDONESIAN YOUNG SCIENTIST ASSOCIATION	17-Apr-21	Nasional
12	Lisa Arianti Kusuma	Juara 1 Gold Medal Lomba Youth Nasional Science Fair (YNSF)	INDONESIAN YOUNG SCIENTIST ASSOCIATION	18-Apr-21	Nasional
13	Atsil Syah Gibran	Juara 1 Lomba Olimpiade Sains Mahasiswa POSI Tahun 2021	POSI	5 Mei 2021	Nasional
14	Regita Cahyani	Juara 1 Lomba Esai ESPONA	UNNES	6 Mei 2021	Nasional
15	Respati Triana Putri	Juara 3 Karya Tulis Akhwat	FOKRI	2 Mei 2021	Nasional
16	Febri Tursandi Arrasyid	Juara 3 Dai Ikhwan	FOKRI	2 Mei 2021	Nasional
17	Kahfi Eki Cahyadi	Juara 3 Adzan	FOKRI	2 Mei 2021	Nasional
18	Shadira Wiratami	Juara 2 Fotografi Akhwat	FOKRI	2 Mei 2021	Nasional
19	Athallah Alvinur Wibowo	Juara 2 Fotografi Ikhwan	FOKRI	2 Mei 2021	Nasional

20	M Audatan Octarizal Arrasyidi, Ja'far Alief Rahman, Muh.Alif Jamil Pratama, Iqbal Kurnia Fajar, Briyantama Kusuma Nugraha.R	Juara 1 Nasyid	FOKRI	2 Mei 2021	Nasional
21	Ahmad Rifki	Juara 2 Lomba Seruan Aksi	FMKI	15 Mei 2021	Nasional
22	Yoga Fauzan Renardi & Reynald Christian	Juara Harapan 2 Lomba Video Pendek BPIP dan MPR	BPIP RI dan MPR RI	17 Mei 2021	Nasional
23	Respati Triana Putri, Felix Ferdin Bakker, M. Alvi Ghazy	Juara 3 Essai Nasional <i>Be Young Excecutive</i>	Institut Pertanian Bogor (IPB)	13 April s.d 20 Mei 2021	Nasional
24	Atsyil Syah Gibran	Juara 1 Bidang Geografi	POSI	29 s.d 30 Mei 2021	Nasional
		Juara 1 Bidang Sejarah	POSI	29 s.d 30 Mei 2021	Nasional
		Juara 2 Bidang Geografi	OASE Edukasi	29 s.d 30 Mei 2021	Nasional
		Juara 3 Bidang Kebumian	OASE Edukasi	29 s.d 30 Mei 2021	Nasional
25	Muhammad Luthfi, Adhitya Antomarta, M. Dimas Furqan Suriyo M, Deva Ghita Anggraini, Tresia Margareta	Juara 1 Lomba Videografi Universitas Muhammadiyah Jakarta	Universitas Muhammadiyah Jakarta	04 Juni 2021	Nasional
26	Dhimas Triand Noviansyah	Juara 2 Lomba <i>Photoshoot</i>	BPSDM	10 Juni 2020	Nasional
27	R. Yohanes Dhimas Agung Wijanarko	Juara 2 Lomba <i>Photoshoot</i>	BPSDM	10 Juni 2020	Nasional
28	M. T. Gilbert Agasfa	Juara 3 Lomba <i>Photoshoot</i>	BPSDM	10 Juni 2020	Nasional
29	Andrianus Bagas	Juara 1 Lomba <i>Photoshoot</i>	BPSDM	10 Juni 2020	Nasional
30	Yoga Fauzan Renardi	Juara 1 Lomba <i>Generation Restoration ID</i>	Kedutaan Besar Eropa	9 Juli 2021	Nasional
31	Esla Wira Yustisia Putri	Juara 2 Lomba Cipta Puisi Nasional	<i>Event Lomba Online</i>	23 Juli 2021	Nasional

32	Muhammad Irfan Singke	Juara 2 Juara 2 Lomba Esai Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	SATMA UNIV. AL-AZHAR	24 Agustus 2021	Nasional
33	Atsil Syah Gibran	Medali Emas Lomba Independence Science Competition OASE Edukasi Tahun 2021	OASE Edukasi	19 Agustus 2021	Nasional
46	Atsil Syah Gibran	Medali Emas Bidang Geografi Lomba Olimpiade <i>Advanced Science Olympiad</i>	POSI	18 Juli 2021	Nasional
		Medali Perunggu Bidang Sejarah Lomba Olimpiade <i>Advanced Science Olympiad</i>	POSI	18 Juli 2021	Nasional
		Delegasi Terbaik Lomba Aceh Youth Conference On Violence	Katalisator Muda Aceh	28 Juli 2021	Nasional
		Katalisator Muda Aceh			
		Medali Emas Bidang Sejarah Lomba <i>Social and Language Competition</i>	OASE Edukasi	29 Juli 2021	Nasional
		Oase Edukasi			
47	Panca Cahyas Kusuma	Medali Perak Bidang Sosiologi Lomba <i>Social and Language Competition</i>	OASE Edukasi	29 Juli 2021	Nasional
		Medali Emas Pekan Olahraga Nasional	PON	5 Oktober 2021	Nasional

48	Muhammad Azzam Alfarizi, Felix Ferdin Bakker, M. Alvi Ghazy, Respati Triana Putri, Regita Cahyani Rahmat	Medali Perunggu Bidang Inovasi <i>Social-Science</i>	Indonesian Young Scientist Association (IYSA)	9 Oktober 2021	Nasional
49	Atsil Syah Gibran	Juara 2 Lomba Fotografi	IAIN SALATIGA	3 Oktober 2021	Nasional
50	<i>Della Palupi Anggraeni</i>	Juara 2 Lomba Solo Vokal	PORSIMAPTAR	17 Oktober 2021	Nasional
51	Dendis Zain Rozansyah	Juara 2 Video Pendek	Universitas Udaya	24 Oktober 2021	Nasional
52	Lalu Muhammad Ferry Akbar	Juara 2 Video Pendek	Universitas Udaya	24 Oktober 2021	Nasional
53	Muhammad Irfan Singke	Juara 2 Video Pendek	Universitas Udaya	24 Oktober 2021	Nasional
54	Muhammad Irfan Singke	Juara 3 Lomba Esai Nasional PRJ IX	HIMAKOM Fakultas MIPA Universitas Lampung	24 Oktober 2021	Nasional
55	Muhammad Irfan Singke	Juara 2 Video Pendek	Universitas Udaya	24 Oktober 2021	Nasional
56	Muhammad Irfan Singke	Juara 3 Lomba Esai Nasional PRJ IX	HIMAKOM Fakultas MIPA Universitas Lampung	24 Oktober 2021	Nasional
57	Atsil Syah Gibran	Juara Favorit Lomba Fotografi	UIN Ar Raniry	3 Oktober 2021	Nasional
58	Atsil Syah Gibran, William Hans Natanael	Juara 3 Lomba Fotografi	Universitas Syiah Kuala	25 Oktober 2021	Nasional
59	Ferdyan Samuel Karunia	Juara 3 Lomba <i>Essay</i>	<i>Texaz English Course</i> Jember	18 Oktober 2021	Nasional
60	Atsil Syah Gibran	Juara 3 Lomba Fotografi	Universitas Negeri Semarang	20 Oktober 2021	Nasional
61	Binsar Bonardo Sianturi	Juara 3 <i>Virtual Run</i>	Unviersitas Padjadjaran	29 Oktober 2021	Nasional
62	Muhammad Rizky Novianto, Muhammad Refinaldi, Arzaq Zain Abdillah, Revan Setiaji Lesmana, Ryan Petrus Justin Saragih	Juara 2 Lomba Mobile Legends	IMIGRASI	17 Oktober 2021	Nasional
63	Halba Alfath Afwa Ashari, Dimasyati Nusa Al Fath, M. Naufal Gebiota, Redo Feruzi Armando	Juara 3 Lomba Mobile Legends	IMIGRASI	17 Oktober 2021	Nasional

64	Reza Achmad Fauzi, Abdan Irfandy, Rendro Aji Satrio, M Farhan Zaqi Zhilal	Juara 3 Lomba Mobile Legends	IMIGRASI	17 Oktober 2021	Nasional
65	Atsil Syah Gibran	Medali Emas Bidang Sejarah	OASE Edukasi	25 Oktober 2021	Nasional
66	Atsil Syah Gibran	Medali Perak Bidang Sosiologi	OASE Edukasi	25 Oktober 2021	Nasional
67	Atsil Syah Gibran	Medali Emas Bidang Geografi	POSI	25 Oktober 2021	Nasional
68	Muhammad Ammar	Juara 3 Cover Jingle BPSDM Hukum dan HAM	BPSDM Hukum dan HAM	29 Oktober 2021	Nasional
69	Binsar Bonardo Sianturi, Abdan Irfandy	Juara 3 Cover Jingle BPSDM Hukum dan HAM	BPSDM Hukum dan HAM	29 Oktober 2021	Nasional
70	Ardhiansyah Rindharizky Setiawan, Della Dinda Bevani, Hana Farah Dhiba, Josyia Eka Wiranata, M. Dafa Burhani, Reynald Christian, Yoga Fauzan Renardi, I Ketut Adi Wardana, Kirana Puspa Githa Zuliha, Raden Bayan Dipa Koesoemadilaga, Lalu Muhammad Ferry Akbar	Juara Favorit Lomba Short Movie	PORSIMAPTAR	22 Oktober 2021	Nasional
71	Hana Farah Dhiba, Ridha Nikmatu Syahada, Abraham Yuan Arthanta Simanjuntak	Juara 1 Lomba Esai	Universitas Sumatera Utara	05-Nov-21	Nasional
72	Abraham Yuan Arthanta Simanjuntak, Abharina Afiah Ghassani Afrah	Juara 2 Lomba Esai	Universitas Trunojoyo Madura	07-Nov-21	Nasional
73	Kevin Yudhistira Sugianto, Anwaresa Putra A, Cinde Salsabii	Juara 3 Lomba Poster	UPN Veteran Jakarta	27-Nov-21	Nasional

74	Atsil Syah Gibran, Muhammad Irfan Singke, Pande Putu Haykal Mahesa Agni	Juara 2 Lomba Karya Tulis Ilmiah	Edutainer	06-Nov-21	Nasional
75	Atsil Syah Gibran	Juara 1 Lomba Fotografi	Unviersitas Syiah Kuala	25 Oktober 2021	Nasional
76	Ridha Nikmatus Syahada, Hana Farah Dhiba	Juara 1	Universitas Negeri Yogyakarta	22 November 2021	Nasional
77	Ifatul Afifah, <i>Dhiya Farah Ramadhani</i>	Juara 2	Universitas Negeri Yogyakarta	22 November 2021	Nasional
78	Naufal Hadi	Juara 2 Lomba Poster	Cerdas Muda Indonesia	29-Nov-21	Nasional
79	Muhammad Azzam Alfarizi, Ale Alfero Deputra	Juara 1	Universitas Airlangga	28-Nov-21	Nasional
80	Ad'lbra Muhammad, Dikky Firsthio Damas, Hendrick Alif Arsyandy, Muhammad Fariz Akbar, Reno Putra Ramdo, Zordy Ridhollah, Ahmad Murshal Pratama Ali, M. Aryaguna Penan, Muhammad Nabiel Fathan Habbib, Irfan Adinata M. Naufal Gebiota, Mochamad Gozzi Arofah, Muhammad Bagas Prayoga, Muzni Fhadlan, Rayhan Galuh Gupawa	Juara 1 Lomba Futsal	Himpunan Mahasiswa Kedinasan Lampung	5 Desember 2021	Nasional

81	Felix Ferdin Bakker, Muhammad Alvi Ghazy, Respati Triana Putri, Muhammad Akram Hutasuhut, I Pande Putu Haykal Mahesa Agni, Fazril Habib Manurung, Ifrans Aqidah, Atsil Syah Gibran, Regita Cahyani Rahmat, Lalu Muhammad Ferry Akbar	Medali Emas International Invention Inovation Competition (I3C) Malaysia Tahun 2021	IYSA & MIICA	12 Desember 2021	Internasional
----	--	--	--------------	---------------------	---------------

c. Layanan Perkantoran

Politeknik Imigrasi dalam menjalankan kegiatannya di dukung dengan layanan perkantoran yang menunjang kegiatan sehari-hari, berikut rincian anggaran Politeknik Imigrasi:

Tabel 3. 33 Realisasi Anggaran Poltekim

No	Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	Pendidikan Taruna Tingkat I	3.634.100.000	3.633.719.500	99
2	Pendidikan Taruna Tingkat II	3.553.750.000	3.553.750.000	1
3	Pendidikan Taruna Tingkat III	3.605.945.000	3.605.941.350	99
4	Pendidikan Taruna Tingkat IV	3.034.522.000	3.034.442.400	99
5	Masa basis calon taruna politeknik ilmu masyarakat	2.770.600.000	2.770.510.100	99
6	Layanan SDM	2.619.731.000	2.642.701.350	100
7	Layanan sarana internal	1.789.116.000	1.788.931.355	99
8	Layanan umum	1.789.116.000	1.788.931.355	99
9	Gaji dan Tunjangan	5.725.950.000	5.640.897.510	98
10	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.746.713.000	2.745.074.084	99
11	Layanan monitoring dan evaluasi internal	603.315.000	603.115.000	99
	Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran	4.710.000	4.710.000	1
	Jumlah	31.877.568.000	31.812.724.004	0.997966

Dari sisi anggaran capaian Politeknik Imigrasi (Poltekim) pada tahun 2019 terealisasi sebanyak Rp. **30.704.347.416,-** (99,8%) dari pagu anggaran yang telah ditargetkan sebesar Rp. **30.754.684.000,-**.

7. Balai Pendidikan Pelatihan Diklat Hukum dan HAM

Capaian kinerja Balai Diklat Hukum dan HAM pada Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 34 Capaian Kinerja Balai Diklat Hukum dan HAM

Indikator	Kinerja		Anggaran (Rp)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah Penyelenggaraan Diklat di Wilayah	288	288		
Jumlah Lulusan Diklat Wilayah	13.023	13.023	38.656.349.000.	38.126.126.093
Total	13.311	13.311		
Prosentase Capaian	100%		98,6%	

Tabel capaian kinerja di atas memberikan informasi kepada kita, bahwa selama Tahun 2021, Target dan realisasi dari badiklat Hukum dan HAM sebesar 100%. Untuk penyerapan anggaran, secara akumulatif ketiga Balai Diklat mampu menyerap anggaran sebesar Rp. 38.126.126.093,- (98,6%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 38.656.349.000,-.

Tabel 3. 35 Capaian Pelatihan Pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM

No.	Balai Diklat Hukum dan HAM	Nama Pelatihan	Penutupan	Peserta	Lulus
1.	Jawa Tengah	Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Dasar Pada Lapas dan Rutan	15 Jan - 1 Feb	40	40
		Pelatihan Teknis Pengawasan Keimigrasian	18 Jan - 29 Jan	40	40
		Webinar dengan Tema Tumbuhkan Nasionalisme dan Budaya Nilai Pancasila para ASN	17 Februari	889	889
		Pelatihan Teknis Untuk Pelaksana Pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat	22 Feb - 25 Feb	80	80
		Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Lanjutan Pada Lapas dan Rutan	19 Mar - 5 Apr	40	40

	Pelatihan Pengelola Barang dan Jasa	19 Mar - 18 Apr	40	40
	Pelatihan MTSL bagi CPNS Angkatan I - XLI	29 Mar – 10 Agustus	1584	1584
	Pelatihan Dasar CPNS	16 Apr – 23 November	1,582	1,582
	Pelatihan RB bagi CPNS Angkatan I – XLI	Oktober - November	1.584	1.584
	Pelatihan Public Speaking	6 – 7 November	40	40
	Pelatihan Capacity Building	20 – 21 November	22	22
	FGD Pemajuan Produk Hukum Daerah	29 November	70	70
	JUMLAH		6.011	6.011
2	Kepulauan Riau	Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat dasar	150	150
		Pelatihan Pengamanan Tingkat lanjutan	40	40
		Pelatihan Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas	40	40
		Pelatihan Pendetensian dan Deportasi	40	40
		Pelatihan Yankomas	110	110
		Pelatihan Reformasi Birokrasi Gelombang Gelombang I s.d IV	1.009	1.009
		Pelatihan MTSL Gelombang I s.d IV	1.009	1.009
		Latsar Gelombang I s.d V	1.009	1.009
	JUMLAH		3.407	3.407
3	Sulawesi Utara	Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Dasar	80	80
		Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Lanjut	80	80
		Pelatihan Yankomas	60	60
		Pelatihan Dasar CPNS	1.045	1.045
		Reformasi Birokrasi	1.045	1.045
		MTSL	1.045	1.045

Pelatihan Teknis Pelayanan Dokumen Perjalanan RI	80	80
Pelatihan Status Keimigrasian	80	80
Pelatihan Protokoler	60	60
Pelatihan Kehumasan	30	30
JUMLAH	3.605	3.605
TOTAL		

B. Implementasi Reformasi Birokrasi

Berdasarkan sasaran dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi yang tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor MHH-19.OT.03.01 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2021-2024 dapat diinformasikan implementasi reformasi birokrasi Tahun 2021 sebagai berikut

**Tabel 3. 36 Tabel Implementasi Reformasi Birokrasi
BPSDM Hukum dan HAM**

No	Program	Indikator Kegiatan (Road Map RB Kemenkumham)	Implementasi
1	<i>Manajemen Perubahan</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan 2. Penguatan nilai integritas 3. Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan role model 4. Pengembangan budaya kerja dan carakerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0 	<ul style="list-style-type: none"> • SK Tim RB BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2021 • SK Tim Agen Perubahan BPSDM Hukum dan HAM • Pelatihan Agen Perubahan melalui diklat PKN, PKP dan PKA • Agen Perubahan Menyusun Rencana Kerja sesuai dengan peran dan tugasnya • Implementasi Rencana Kerja Agen Perubahan Tahun 2021 • Pelatihan Asesor PMPRB • Melakukan Internalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Internalisasi secara berkala dan berkesinambungan tentang program-program percepatan RB (RKT) • Evaluasi Pelaksanaan RB secara Berkala • Kegiatan <i>Benchmarking</i> ke Badiklat Kejaksanaan DKI Jakarta Untuk Mengetahui

			Capaian dan Hambatan dalam Percepatan Pelaksanaan RB
2.	Deregulasi Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup IP (menghilangkan overlapping peraturan) 2. Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi 3. Penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup IP 4. Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan 5. Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun 	<ul style="list-style-type: none"> • Matriks analisis dan evaluasi peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia • Statuta Poltekik dan Poltekim
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Assessment</i> organisasi berbasis kinerja 2. Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan IP berdasarkan hasil <i>assessment</i> 3. Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi dan Analisa Revisi Struktur dan Fungsi Organisasi BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2021
4	Penataan Tatalaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Tata Kelola SPBE 2. Penerapan Manajemen SPBE 3. Penerapan Layanan SPBE 4. Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan 5. Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital) 6. Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan 7. Mengimplementasikan digitalisasi arsip 8. Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku 9. Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi SOP • Penyusunan dan Penambahan SOP Layanan Unggulan (Strategis) • Penyusunan Bisnis Proses di Kemenkumham • Evaluasi Bisnis Proses di Kemenkumham • Digitalisasi Arsip Kemenkumham

		<p>10. Pengembangan proses bisnis instansi dan unit</p> <p>11. Penyelarasan Proses bisnis dan SOP</p>	
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	<p>1. Menerapkan prinsip-prinsip manajemen ASN secara professional</p> <p>2. Implementasi manajemen ASN berbasis merit system</p> <p>3. Penetapan ukuran kinerja individu</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala</p> <p>5. Penguatan implementasi Reward and Punishment berdasarkan kinerja</p> <p>6. Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi</p> <p>7. Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN</p> <p>8. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN</p> <p>9. Pengembangan implementasi Manajemen Talenta (Talent pool)</p> <p>10. Penguatan <i>database</i> dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Kebutuhan Pegawai Kemenkumham • Evaluasi Implementasi Peningkatan Disiplin Pegawai • Reviu Peraturan Terkait Peningkatan Disiplin • Internalisasi dan Publikasi Kode Etik Pegawai • Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan • Asesmen Individu Berdasarkan Kompetensi • Penguatan Asesor Internal dan Pengelola Asesmen Center • Evaluasi Fungsi Asesmen Center • Rekrutmen dan Seleksi Jabatan Fungsional Asesor SDM • <i>Coaching and Mentoring</i> Secara Berkala pada Setiap Bagian dengan Agenda : <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 1 bulan 2. Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan 1 bulan 3. Penguatan Integritas Organisasi • Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
6	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	<p>1. Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sektor (<i>collaborative and crosscutting</i>)</p> <p>2. Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan, Penyempurnaan, Cascading, Evaluasi Periodik IKU dan Pencapaian Target IKU • Penyajian Pelaporan Akuntabilitas (LAKIP) yang meliputi 5 (Lima) Komponen Besar Manajemen Kinerja • Pelaksanaan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi reviu Tim Pemeriksa Internal • Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kinerja dan keuangan secara periodik

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (goal and strategy cascade) 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala 5. Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran 6. Penguatan implementasi value for money dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja 	<p>melalui (e-Monev, SMART, e-Tarja dan E-Performance)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Publikasi dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada website Kemenkumham
7	Penguatan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi 2. Meningkatkan Kompetensi APIP 3. Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas) 4. Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku 5. Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan 6. Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM 7. Penguatan pengendalian gratifikasi 8. Penguatan penanganan pengaduan dan komplain 9. Penguatan efektivitas manajemen risiko 10. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan perolehan PNPB • Laporan pelaksanaan pengelolaan BMN • Penyusunan dan Evaluasi standar bangunan gedung Kantor Kementerian Hukum dan HAM • Penetapan SK Satgas tentang Penyelenggaraan SPIP • Monitoring dan Laporan pelaksanaan SPIP secara berkala • Tindak lanjut rekomendasi SPIP (Berita Acara) dari Inspektorat Jenderal • Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK • Pembuatan SK Tim tentang Benturan Kepentingan • Identifikasi situasi yang berpotensi mengandung benturan kepentingan • Pengendalian gratifikasi • Pemetaan, Identifikasi dan penanganan pengaduan masyarakat • Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Unit Pengendalian Gratifikasi • Pemetaan benturan kepentingan • Pemenuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN sampai 100% • Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SISUMAKER dalam pelaksanaan tugas sehari-hari • Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

<p>8</p>	<p>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM) 2. Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan 3. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik 4. Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau 5. Penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik 6. Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik 7. Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala 8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala 9. Mendorong K/L/D untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi dan internalisasi standar pelayanan di Kemenkumham • Pelaksanaan kerjasama/kolaborasi dengan Unit Layanan pada instansi lain atau pihak ketiga dalam memberikan layanan • Pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan • Pengelolaan pelayanan publik • Pengelolaan kehumasan di Kemenkumham • Inovasi pelayanan publik • Pengembangan layanan yang telah berbasis e-Government yang mendukung proses manajemen • Pelaksanaan survei mandiri dengan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga survei setempat (IPK-IKM) • Implementasi pengembangan government yang selaras dengan Grand Design IT Kementerian Hukum dan HAM
----------	--	--	--

10. Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.

C. Kegiatan Kerjasama BPSDM Hukum dan HAM

Selain melaksanakan kegiatan di dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, BPSDM Hukum dan HAM juga melaksanakan kegiatan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun non-pemerintahan baik dalam maupun luar negeri. Kerjasama yang baru dilakukan dan masih berjalan di Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 37 Tabel Kegiatan Kerjasama BPSDM Hukum dan HAM

NO	NOTA KESEPAHAMAN/ PERJANJIAN KERJA SAMA	TAHUN DAN JANGKA WAKTU	RUANG LINGKUP	BENEFIT	IMPLEMENTASI KERJA SAMA
1	BPSDM HUKUM DAN HAM DAN FAKULTAS UIN SYARIF HIDAYATULLAH Tentang Pendidikan, Magang, Penelitian Psikologi dan Pengabdian kepada Masyarakat	2 juni 2019 5 Tahun	a. Pendidikan, termasuk kuliah/ praktik; b. Penelitian; dan c. Pengabdian kepada masyarakat	a. Perkembangan keilmuan dalam bidang psikologi yang memberikan manfaat, kemaslahatan kedua belah pihak dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui Tri Dharma perguruan Tinggi	Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN magang atau praktek kerja lapangan di BPSDM
2	BPSDM HUKUM DAN HAM DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL RI Tentang Pemanfaatan dan Pengembangan	5 Sept 2019 3 tahun	a. Pengembangan sumber daya manusia bidang perpustakaan dan kepastakawanan; b. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dibidang perpustakaan; c. Pengembangan pangkalan data Katalog Induk Nasional (KIN) dan Repository Digital Indonesia One Search (IOS); d. Pengembangan dan pemanfaatan Bersama koleksi perpustakaan; e. Pertemuan ilmiah, penelitian, publikasi Bersama, dan pengabdian masyarakat dalam bidang perpustakaan dan kepastakawanan; f. Penghipunan dan pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR); dan g. Kegiatan lain yang disepakati para pihak.	a. Menyediakan SDM pengelolaan Perpustakaan b. Menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan c. Menyediakan <i>repository digital</i> koleksi perpustakaan d. Menyediakan data dan informasi koleksi langka e. Mengimplementasikan standar nasional perpustakaan f. Melaksanakan pelestarian perpustakaan g. Meningkatkan pemanfaatan perpustakaan dan h. Melakukan penghipunan pengelolaan KCKR di lingkungan BPSDM sebagai <i>repository</i> instansi	

3.	BPSDM HUKUM DAN HAM DAN FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS Indonesia tentang Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang Ilmu Administrasi	3 Tahun 14 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan dan Pengajaran b. Penelitian dan Pengembangan c. Pengabdian Kepada Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan kesempatan kepada Pimpinan dan Staf di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melanjutkan pendidikan pada Program Sarjana, Magister, dan Doktor di bidang Ilmu Administrasi b. Memberikan kesempatan kepada Pimpinan dan Staf di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mengikuti Credit Earning Program c. Melaksanakan Program Pengembangan Eksekutif (Executive Development Program) d. Memberikan Konsultasi, Pendampingan dan Kajian dalam rangka implementasi Corporate University e. Memberikan Konsultasi, Pendampingan dan Kajian dalam pelaksanaan Penilaian Kompetensi yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia f. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa FIA UI untuk melaksanakan Program Magang dalam rangka mendukung Program Merdeka Belajar
----	--	-------------------------	---	--

D. Prestasi BPSDM Hukum dan HAM

Selain berhasil melaksanakan tugas dan fungsi sebagai organisasi yang bertanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi sumber daya manusia hukum dan HAM, BPSDM juga berhasil memperoleh beberapa prestasi antara lain:

1. Peringkat I Satker Teraktif Menerapkan Digipay Marketplace oleh Kementerian Keuangan



2. Kerja sama Penyelenggaraan Gemar Belajar dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM Inspektorat Jenderal



3. Akreditasi Program Studi Pada Politeknik Imigrasi



4. Predikat Wilayah Bebas Korupsi (POLTEKIP dan Badiklat Sulawesi Utara)



5. Target Kinerja BPSDM Hukum dan HAM 2021

Menurut Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-11.PR.01.03 Tahun 2018, diperlukan penyusunan Target Kinerja untuk peningkatan kinerja dan mensinergikan pelaksanaan tugas dan fungsi melalui implementasi e-gov di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tujuan dari Target Kinerja bertujuan untuk:

1. Mempercepat pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi, reformasi hukum berbasis e-gov di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Meningkatkan peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka peningkatan kualitas pembentukan dan pelayanan hukum serta pemenuhan/pemajuan hak asasi manusia
3. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia hukum dan hak asasi manusia; dan
4. Mendorong terwujudnya penguatan perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat.

Berikut ini merupakan Capaian Target Kinerja dari BPSDM Hukum dan HAM tahun 2021 :

Tabel 3. 38 Tabel Target Kinerja BPSDM Hukum dan HAM

No	Target Kinerja	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Capaian
1	Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan	85% Alumni Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yang diangkat/ menjadi Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan Kompetensi Bidang tugasnya	B03 Penyelenggaraan Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Angkatan I	Laporan Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Akt. 35 (I) Th 2021	100
			B06 Penyelenggaraan Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Angkatan II s.d III	Laporan Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Akt. 36 (II) dan Akt. 35 (III) Th 2021.	100
			B09 Penyelenggaraan Diklat Pembimbing Kemasyarakatan Angkatan IV s.d VI	B09 Laporan Kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan penyelenggaraan Diklat Pembimbing Kemasyarakatan Angkatan IV s.d VI	100
			B12 penyelenggaraan Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Angkatan V s.d VIII	B12 1.Laporan Kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan penyelenggaraan Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Angkatan V s.d VIII 2.Surat Keterangan Pengangkatan JFT PK	100
2	Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi di Bidang Pelatihan Terpadu SPPA bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya	80 % alumni peserta Diklat SPPA yang telah meningkat kompetensinya 80% alumni peserta telah menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	B03 Pelaksanaan Diklat SPPA Angkatan I	Laporan Penyelenggaraan Pelatihan SPPA Angkatan I	100
			B06 Pelaksanaan Diklat SPPA Angkatan II s/d II	Laporan Penyelenggaraan Pelatihan SPPA Angkatan II dan III	100

			B09 Pelaksanaan Diklat SPPA Angkatan IV s/d VII	B09 Laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan penyelenggaraan Diklat SPPA Angkatan IV s/d VII beserta SK Pengajar dan SK Peserta Diklat	100
			B12 Pelaksanaan Diklat SPPA Angkatan VIII s/d IX	B12 Laporan dan Evaluasi kegiatan seta dokumentasi pelaksanaan penyelenggaraan Diklat SPPA Angkatan VIII s/d IX beserta SK Pengajar dan SK Peserta Diklat Surat Keterangan Penempatan Peserta Diklat SPPA AKT I s/d IX	100
3	Penyelenggaraan Penilaian Preferensi Kompetensi Metode online di lingkungan Kemenkumham	Tersedianya Profil Preferensi Kompetensi di lingkungan Kemenkumham	B03 3.300 pegawai Kemenkumham telah dilakukan Penilaian Preferensi Kompetensi Metode online	Laporan Hasil, SK Kegiatan, Berita Acara dan Surat Pemanggilan	100
			B06 3.000 pegawai Kemenkumham telah dilakukan Penilaian Preferensi Kompetensi Metode online	Laporan Hasil, SK Kegiatan, Berita Acara dan Surat Pemanggilan	100
			B09 3.000 pegawai Kemenkumham telah dilakukan Penilaian Preferensi Kompetensi Metode online	B09 1. SK Kegiatan Preferensi kompetensi 2. Laporan Hasil	100
			B12 3.000 pegawai Kemenkumham telah dilakukan Penilaian Preferensi Kompetensi Metode online	B12 1. SK Kegiatan Preferensi kompetensi 2. Laporan Hasil	100

4.	Implementasi proyek perubahan di Kementerian Hukum dan HAM	Terimplimentasikan nya proyek perubahan Lemhanas, PKN1, PKN2, PKA, PKP	B03 Inventarisasi pegawai yang telah mengikuti DiklatPIM dan daftar proyek perubahannya dari Tahun 2019-2020	Daftar pegawai dan judul proyek perubahan diklat PIM	100
			B06 Pemetaan proyek perubahan yang telah terimplementasi	Laporan Pemetaan Proyek Perubahan	100
			B09 Progress pelaksanaan proyek perubahan yang telah terimplementasi (50-100 %)	B09 Data dan Laporan	100
5	Akreditasi pada Politeknik	1. Seluruh Program Studi pada POLTEKIP mendapatkan akreditasi dengan kriteria baik 2. Kelembagaan Perguruan Tinggi POLTEKIP mendapatkan akreditasi dengan kriteria baik	B03 1. Persiapan Pengajuan Akreditasi Program Studi pada POLTEKIP 2. Persiapan Pengajuan Akreditasi Kelembagaan Perguruan Tinggi POLTEKIP	SK Tim Penyusunan Borang Akreditasi, Laporan Sosialisasi Akreditasi BAN-PT, SK Tim Borang Akreditasi, Serifikat Akreditasi Program Studi Potlekip	100
			B06 Penyusunan Draft Borang Pengajuan Akreditasi Program Studi pada POLTEKIP Penyusunan Draft Borang Pengajuan Akreditasi Kelembagaan Perguruan Tinggi POLTEKIP	SK Tim Borang Akreditasi, Serifikat Akreditasi Program Studi Potlekip	100
			B09: 1. Finalisasi Borang Pengajuan Akreditasi Program Studi pada POLTEKIP 2. Finalisasi Borang Pengajuan Akreditasi Kelembagaan Perguruan Tinggi POLTEKIP	B09: 1. Dokumen Borang Pengajuan Akreditasi Program Studi pada POLTEKIP 2. Dokumen Borang Pengajuan Akreditasi Kelembagaan Perguruan Tinggi POLTEKIP	100
			B12: 1. Pengajuan Akreditasi	B12 : 1. Dokumentasi pada Sistem	100

			Program Studi pada POLTEKIP 2. Pengajuan Akreditasi Kelembagaan Perguruan Tinggi POLTEKIP 3. Penilaian/Evaluasi Akreditasi Program Studi dan Kelembagaan POLTEKIP oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT)	Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO) 2. Dokumen Penilaian Angka Kecukupan Assesor BAN PT 3. Berita Acara Assessment Lapangan Assesor BAN PT	
		Terlaksananya Instrumen /borang Akreditasi BAN PT pada POLTEKIM	B03 Penyelenggaraan Tim Instrumen/ borang Akreditasi BAN PT	SK Tim Penyusun Borang Akreditasi, Laporan Visitasi Akreditasi	100
			B06 Penyusunan Instrumen /borang Akreditasi BAN-PT	Laporan Asesmen Akreditasi Prodi, Sertifikat Akreditasi Program Studi Poltekim	100
			B09: Luaran dan Capaian Tridharma	B09: Laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan penyelenggaraan keluaran produk penelitian. Laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan penyelenggaraan meliputi sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), Peserta didik, kurikulum, sarana prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan), dan kerjasama.	100
			B12: Laporan Evaluasi	B12: Laporan visitasi Akreditasi BAN PT atas instrumen / borang Prodi Hukum Keimigrasian Prodi Aministrasi Keimigrasian	100

Target Kinerja BPSDM Hukum dan HAM pada Tahun 2021 mendapatkan nilai kinerja 100% atau berwarna hijau yang berarti bahwa seluruh kegiatan yang menjadi Target Kinerja terlaksana 100% dan data dukung sesuai dengan target capaian yang telah

ditetapkan. Namun demikian perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPSDM Hukum dan HAM yang menjadi Target Kinerja untuk peningkatan capaian pelaksanaan Target Kinerja di Tahun 2022.

Sebagai salah satu institusi penegak hukum, Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini BPSDM Hukum dan HAM turut serta dalam program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Program ini merupakan usaha pemerintah dalam mengendalikan penyalahgunaan NAPZA yang mengamanahkan kepada seluruh Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah untuk menjalani program-program P4GN sebagaimana yang tertuang pada Intruksi Presiden No.2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Berikut rencana aksi P4GN yang dilaksanakan oleh BPSDM Hukum dan HAM:

Tabel 3. 39 Tabel Rencana Aksi BPSDM Hukum dan HAM Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)

No	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Data Dukung Capaian	Penanggung Jawab
1	Tes urine kepada taruna/taruni pendidikan kedinasan	Terlaksananya tes urine kepada taruna/taruni di seluruh pendidikan kedinasan	3% dari jumlah taruna/ tahun	Laporan dan dokumentasi Tes Urine Taruna dan Taruni pada POLTEKIP dan POLTEKIM	POLTEKIP dan POLTEKIM
2	Pengembangan topik anti narkotika dan prekursor narkotika ke dalam salah satu materi pada seluruh lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai ASN dan pendidikan kedinasan	Termuatnya dan tersampainya topik anti narkotika dan prekursor narkotika ke dalam salah satu materi pada seluruh lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai ASN dan pendidikan kedinasan	73 kementerian dan lembaga, 34 provinsi, dan 514 kabupaten/kota	Laporan Kegiatan dan Dokumentasi Kegiatan, sambutan pembukaan pelatihan SPPA dan PK BAPAS	POLTEKIP, POLTEKIM dan BPSDM

Dari 2 (dua) yang menjadi target kinerja P4GN Tahun 2021, Rencana aksi tes urine kepada taruna/taruni Pendidikan kedinasan tidak dapat dilaksanakan sehubungan

dengan kegiatan pembelajaran taruna dilaksanakan secara daring (PJJ) karena pandemi Covid 19.

Selain melaksanakan target kinerja dan rencana aksi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM, terdapat beberapa target kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang berkaitan dengan BPSDM Hukum dan HAM. Berikut target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang berkaitan dengan BPSDM Hukum dan HAM tahun 2021:

Tabel 3. 40 Target Kinerja Kantor Wilayah

No	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung
1	Peningkatan kapasitas SDM Wilayah di bidang dukungan manajemen dan teknis melalui implementasi Corporate University	Meningkatnya kapasitas SDM di wilayah	Terlaksananya workshop/sosialisasi/ bimtek yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah dan UPT	B03 Pelaksanaan workshop/sosialisasi / bimtek Bidang Administratif Fasilitatif	B03 Laporan pelaksanaan
				B06 Pelaksanaan workshop/sosialisasi / bimtek Bidang Imigrasi	B06 Laporan pelaksanaan
				B09 Pelaksanaan <i>workshop/sosialisasi</i> /bimtek Bidang Pemasarakatan	B09 Laporan pelaksanaan
				B12 Pelaksanaan <i>workshop/sosialisasi</i> /bimtek Bidang Pelayanan Hukum dan HAM	B12 Laporan pelaksanaan
		Tersusunnya Best practice di Kantor Wilayah	4 (empat) Best practice Kementerian Hukum dan HAM Corporate University di Kantor Wilayah	B03 -	B03 -
				B06 Tersusunnya 2 (dua) best practice Kementerian Hukum dan HAM Corporate University dalam bidang Pemasarakatan dan Imigrasi	B06 2 (dua) best practice Kementerian Hukum dan HAM Corporate University dalam bidang Pemasarakatan dan Imigrasi
				B12	B12

				<p>Tersusunnya 2 (dua) <i>best practice</i> Kementerian Hukum dan HAM <i>Corporate University</i> dalam bidang Dukungan Manajemen dan Pelayanan Hukum dan HAM</p>	<p>2 (dua) <i>best practice</i> Kementerian Hukum dan HAM <i>Corporate University</i> dalam bidang Dukungan Manajemen dan Pelayanan Hukum dan HAM</p>
--	--	--	--	---	---



BAB IV

PENUTUP

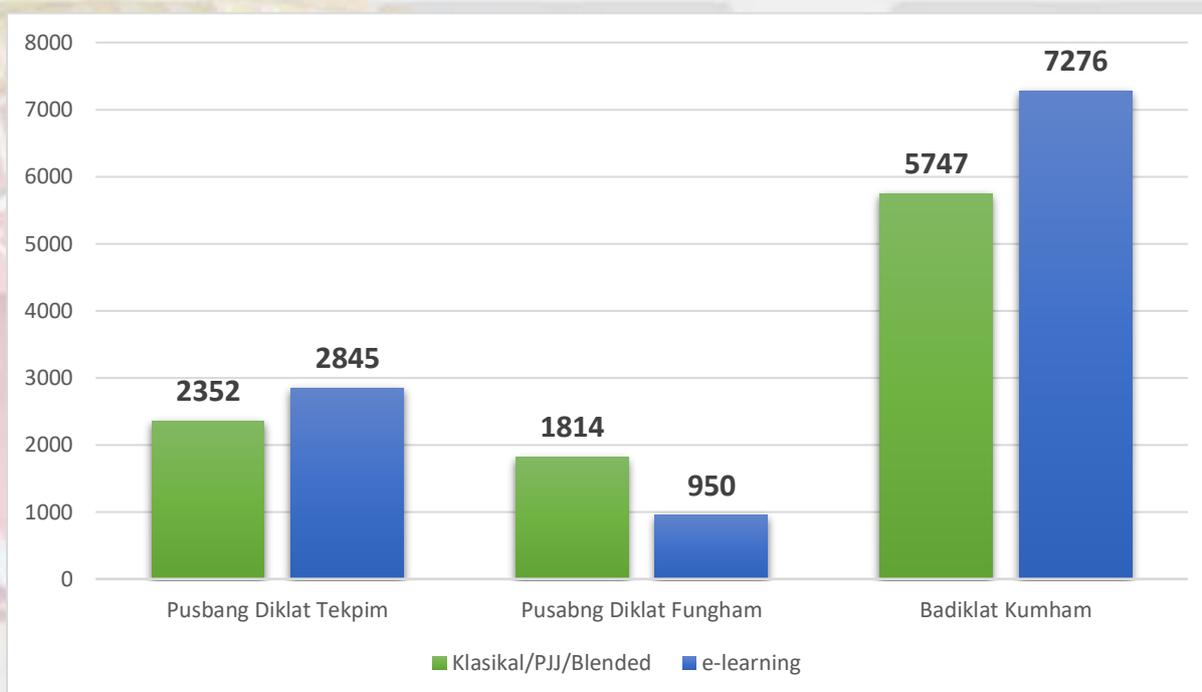


BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

1. Pada tahun 2021 BPSDM Hukum dan HAM telah berhasil melakukan pengembangan kompetensi kepada 20.984 orang pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM baik menggunakan DIPA BPSDM Hukum dan HAM maupun anggaran PNPB dari Unit Eselon I lainnya dengan rincian sebagai berikut :

Grafik 4. 1 Capaian Peserta Pelatihan Tahun 2021

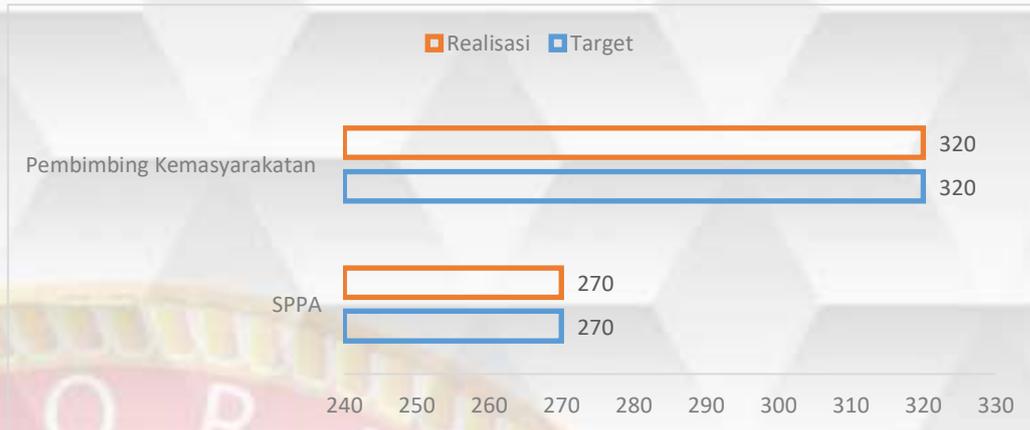


Dari grafik di atas dapat diperoleh informasi bahwa dari 20.984 pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi di BPSDM Hukum dan HAM, sebanyak 9.913 pegawai mengikuti pelatihan yang diselenggarakan dengan metode klasikal, PJJ, dan *blended learning*, sementara sisanya sebanyak 11.071 pegawai mengikuti pelatihan berbasis *e-learning*. Metode Pembelajaran Jarak Jauh digunakan untuk mengatasi situasi pembatasan berskala besar yang diterapkan oleh pemerintah dalam mengurangi penyebaran covid-19 di Indonesia.

2. BPSDM Hukum dan HAM juga melakukan pengembangan kompetensi terhadap Aparatur Kementerian Hukum dan HAM, pada tahun 2021 BPSDM Hukum dan HAM telah

melakukan pengembangan kompetensi terhadap 590 Aparatur Penegak Hukum dan Instansi terkait lainnya yang termasuk dalam prioritas nasional melalui penyelenggaraan diklat Pembimbing Kemasyarakatan sebanyak 320 orang dan diklat Sistem Peradilan Pidana Anak sebanyak 270 orang, Berikut rincian:

Grafik 4. 2 Capaian Diklat Prioritas Nasional



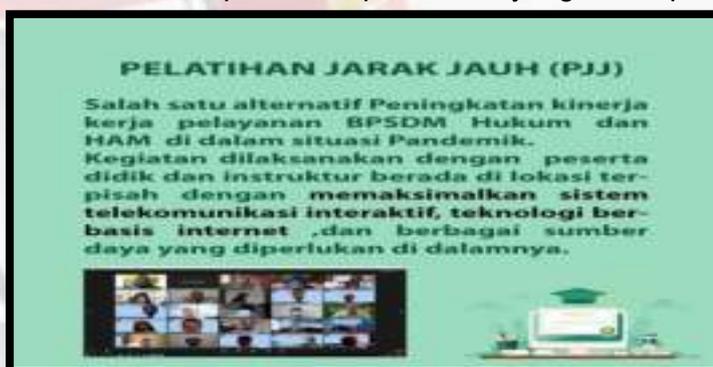
3. Selain bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan BPSDM Hukum dan HAM juga memiliki tugas melakukan penilaian kompetensi aparatur Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini merupakan tanggung jawab Pusat Penilaian Kompetensi sebagai salah satu Unit Eselon II di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM melaksanakan tugas tersebut dengan menyelenggarakan kegiatan Uji Kompetensi, *Assessment Center*, Penilaian Kompetensi, terhadap pegawai di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM yang total selama tahun 2021 sebanyak 19.281 pegawai.
4. BPSDM Hukum dan HAM menyelenggarakan kegiatan pendidikan kedinasan di bidang Pemasyarakatan dan Keimigrasian. Pendidikan kedinasan di bidang Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Politeknik Ilmu Pemasyarakatan pada tahun 2021 berhasil meluluskan taruna sebanyak 250 orang. Sedangkan pendidikan kedinasan di bidang Imigrasi diselenggarakan oleh Politeknik Imigrasi, pada tahun 2021 telah meluluskan 248 taruna.
5. Penyerapan Anggaran BPSDM Hukum dan HAM Per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 277.973.836.683,-** atau telah mencapai **98,8%** dari anggaran yang terdapat dalam DIPA BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2021 sebesar **Rp. 281.179.671.000,-**, berikut rinciannya:

Tabel 4. 1 Realisasi Anggaran BPSDM Hukum dan HAM

NO	BAGIAN/SATKER	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	Penyelenggaraan Diklat Fungsional dan HAM	8.192.143.000	7.720.877.405	94,24
2	Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi	2.008.155.000	1.985.067.530	98,85
3	Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Kepemimpinan	9.425.186.000	9.072.108.285	96,25
4	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BPSDM (SEKRETARIAT)	162.054.702.000	160.412.511.784	98,98
5	POLTEKIM	30.088.452.000	29.952.798.170	99,5
6	POLTEKIP	30.754.684.000	30.704.347.416	99,84
7	BADIKLAT Kep. Riau	10.855.306.000	10.639.337.982	98,01
8	BADIKLAT Jawa Tengah	12.532.658.000	12.361.494.512	98,63
9	BADIKLAT Sulawesi Utara	15.268.385.000	15.125.293.599	99,06
Jumlah		281.179.671.000	277.973.836.683	98,89

6. BPSDM Hukum dan HAM selaku penyelenggara diklat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi SDM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2021 terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

a) Pandemi Covid-19 mengharuskan penghentian kegiatan pendidikan dan pelatihan secara klasikal di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM. Hal ini berdampak pada perubahan metode pembelajaran klasikal menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ)



b) Dalam pelaksanaan pembelajaran metode PJJ, kendala yang sering dihadapi adalah kualitas jaringan yang kurang memadai sehingga mempengaruhi kualitas belajar mengajar. Disamping itu kurangnya interaksi langsung antara pengajar dan peserta

serta interaksi antar peserta juga mempengaruhi kualitas hasil pelatihan dibanding pembelajaran dengan tatap muka langsung.

- c) Metode pelatihan *e-learning* sebagai salah satu cara pengembangan kompetensi pegawai, tetapi pada kenyataannya masih kurang diminati oleh pegawai, hal ini bisa dilihat dari masih banyaknya jumlah peserta yang dinyatakan tidak lulus.
- d) Kurangnya jumlah tenaga asesor yang ada dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM jika harus melakukan penilaian kompetensi kepada 15 ribu orang pegawai per tahunnya.
- e) Masih terdapat revisi kegiatan diklat sehingga mengganggu jadwal pelaksanaan kegiatan diklat dan *disburstmen plan* yang telah disusun pada awal tahun, hal ini berdampak pada kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
- f) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi belum memperhatikan Target Indikator pada Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, sehingga terdapat beberapa Indikator yang tidak tercapai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan kinerja BPSDM hukum dan HAM kedepannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dengan metode pembelajaran jarak jauh perlu segera dilakukan pelatihan tentang penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh bagi tenaga pengajar dan penyelenggara pelatihan.
2. Untuk meningkatkan jumlah lulusan peserta pelatihan *e-learning* perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Pembekalan atau pengarahan kepada para pimpinan unit kerja dan satuan kerja untuk mendukung pegawai dilingkungan kerjanya dalam mengikuti pelatihan metode *e-learning*;
 - Memberlakukan sistem *reward and punishment* pada pelaksanaan pelatihan *e-learning*, contohnya memasukkan kegiatan pelatihan ke dalam Sasaran Kinerja Pegawai, sehingga kelulusan peserta diklat bisa berpengaruh terhadap nilai SKP pegawai yang bersangkutan.
 - Melakukan evaluasi terhadap metode dan kurikulum penyelenggaraan pelatihan metode *e-learning* yang telah dilaksanakan secara berkala.
3. Penambahan pegawai jabatan fungsional tertentu assessor di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM baik melalui jalur inpassing maupun perekrutan CPNS.
4. Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan *disburstmen plan* atau kalender diklat dan Rencana Penarikan Dana yang telah ditentukan serta lebih selektif dalam melakukan pergeseran anggaran revisi DIPA.

5. Pemantauan terhadap capaian Perjanjian Kinerja Pimpinan Tinggi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM secara berkala sehingga dapat dipantau perkembangan dan kendala yang dihadapi.





C O R P O R A T E

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSI



PENGAYAMAN



KAMI
PASTI
Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif

U N I V E R S I T Y